



LKIP KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan dokumen LKIP Kota Cimahi Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Cimahi Tahun 2018-2022, Rencana Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2019 mendapatkan nilai **66,00** atau predikat "**B**", pada Tahun 2020 mengalami penurunan nilai menjadi **65,07** atau predikat "**B**", pada Tahun 2021 memperoleh nilai **65,88** atau predikat B dan mengalami kenaikan sebanyak 0,81 poin dan pada Tahun 2022 memperoleh nilai **65,14** Nilai Evaluasi SAKIP Kota Cimahi tahun 2022 mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan nilai SAKIP pada tahun 2021 meskipun masih berada pada predikat yang sama yaitu B dengan penurunan sebanyak 0,74 poin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi PD. Dari catatan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB Tahun 2022 telah kami tindaklanjuti dalam penyusunan dokumen LKIP Tahun 2022 ini.

2. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP KOTA CIMAHI

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kota Cimahi yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2018-2022 .

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

4. KONDISI KOTA CIMAHI

4.1 Data Geografis Wilayah

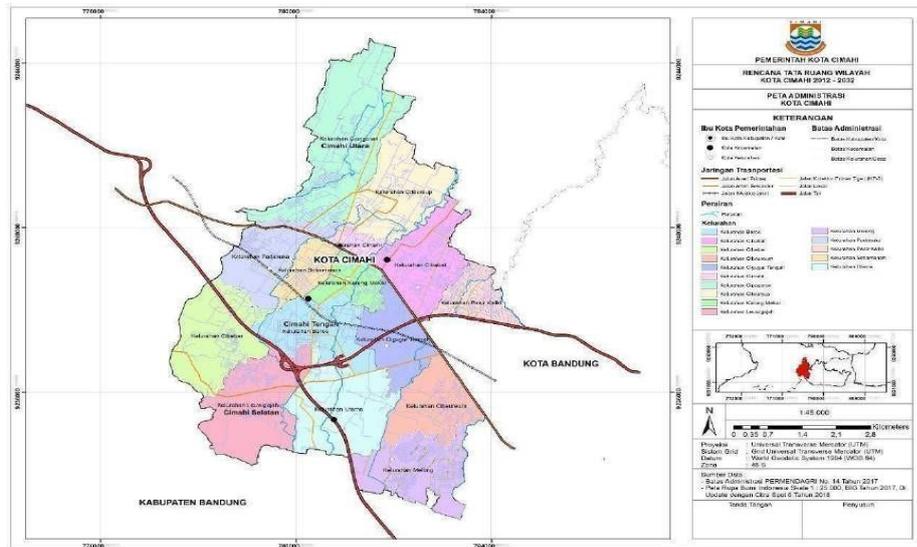
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir Kota Bandung;
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, maka

luas wilayah administrasi Kota Cimahi adalah 4.243,10 Ha. Secara grafis wilayah administrasi Kota Cimahi disajikan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Cimahi



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Tabel 1.2.

Luas Wilayah Berdasarkan Pembagian Kelurahan

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (HA)
CIMAHI SELATAN	CIMAHI SELATAN	1.742,98
	CIBEBER	365,51
	LEUWIGAJAH	405,53
	MELONG	314,57
	UTAMA	400,18
	CIBEUREUM	257,19
CIMAHI TENGAH	CIMAHI TENGAH	1.090,71
	BAROS	282,8
	CIGUGUR TENGAH	236,52
	CIMAHI	57,56
	KARANG MEKAR	133,5
	PADASUKA	262,26
	SETIAMANAH	118,07

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (HA)
CIMAHI UTARA	CIMAHI UTARA	1.414,41
	CIBABAT	301,52
	CIPAGERAN	617,99
	CITEUREUP	341,61
	PASIR KALIKI	153,29
TOTAL		4.243,10

Sumber : Keputusan Mentei Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022

Letak astronomi wilayah Kota Cimahi berdasarkan penegasan batas wilayah yakni berada di 108°30'37" – 107°34'34" Bujur Timur dan 6°49'38" – 6°55'58" Lintang Selatan. Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi – Padalarang – Purwakarta, serta kereta api Bandung – Jakarta. Berdasarkan letak geografis, Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang sangat dinamis.

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600m hingga +1.000m diatas permukaan laut, kondisi tersebut berdampak pada sebagian wilayah Kota Cimahi menjadi bagian Kawasan Bandung Utara (KBU), kegiatan pembangunan di kawasan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah yang memiliki kemiringan lereng 0-2% dominan terletak di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan, daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-15% dominan terletak di Kecamatan Cimahi Utara, daerah yang memiliki kemiringan lereng 15-25%, 25-40% dan lebih besar 40% dominan di wilayah Cimahi Utara dan Selatan.

Secara rinci luasan wilayah Kota Cimahi per Kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total (Km ²)
		0 – 2%	2 – 15%	15 –25%	25– 40%	>40%	
1.	Cimahi Selatan	9,75	3,03	0,82	0,97	0,29	14,86
2.	Cimahi Tengah	10,33	2,89	0,14	0,11	0,02	13,48

3.	Cimahi Utara	2,61	9,85	1,06	0,51	0,12	14,14
	Total (ha)	22,69	15,77	2,01	1,59	0,43	42,48

Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan, namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ruang, sebagai berikut :

- a. Sebagian wilayah Kota Cimahi ($\pm 20\%$ luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 49 tahun 2000, termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas.
- b. Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi, yaitu 1446,59 Ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna.
- c. Berdasarkan hasil Kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi Geologi Lingkungan Metropolitan Bandung yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Kota Cimahi termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gunung api I, yaitu apabila terjadi letusan besar Gunung Tangkubanperahu. Selain itu, di Kota Cimahi juga termasuk pada jalur patahan Lembang yang bersiko terjadi bencana gempa tektonik.
- d. Berdasarkan data matriks luasan kawasan lindung yang tercantum dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, diterangkan bahwa Kota Cimahi memiliki kawasan yang berfungsi lindung seluas 367,9 Ha, atau sekitar 8,82% dari luas Kota Cimahi. Kawasan itu terdiri dari :
 1. Kawasan resapan air : 57,6 Ha
 2. Kawasan rawan letusan gunung api : 98,0 Ha
 3. Kawasan rawan gerakan tanah : 212,3 Ha
- e. Hambatan lain yang berupa hambatan fisik dan geografis dalam pengembangan Kota Cimahi adalah terdapatnya lembah-lembah sungai di kawasan Cimahi bagian utara, jalan tol, dan jalur kereta api yang mengakibatkan Kota Cimahi terpecah menjadi beberapa kawasan yang sulit berinteraksi.

Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, tidak menjadikan Kota Cimahi menjadi stagnan, namun justru menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam pengembangan dan pembangunan kota sehingga pengembangan dan pembangunan Kota Cimahi menjadi sangat dinamis dan selalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada.

1.1.1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Cimahi pada akhir semester 1 tahun 2022 penduduk Kota Cimahi berjumlah 562.160 jiwa dengan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Cimahi Tahun 2022 mencapai angka 41,04 Angka ini mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 yaitu sebesar 40,94. Angka beban ketergantungan tinggi ada di Kecamatan Cimahi Utara yaitu sebesar 41,83. Untuk kelurahan yang tertinggi jumlah rasio ketergantungan ada di Kelurahan Pasirkaliki sebesar 44.31. Rincian lebih lengkapnya diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 1.4.

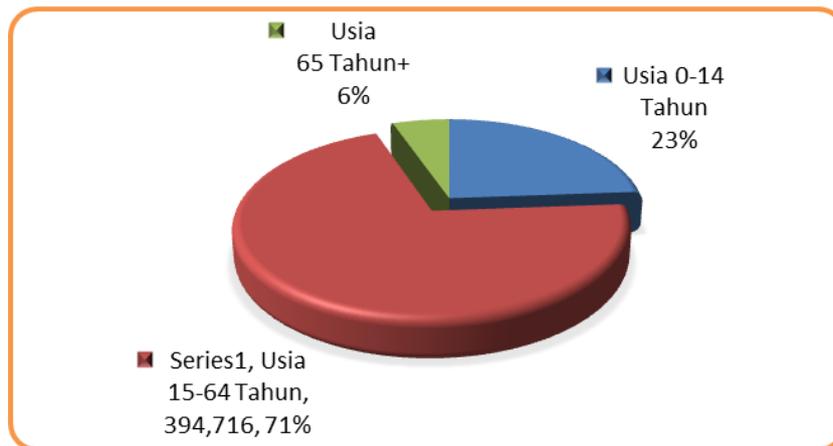
Jumlah Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Kelompok Usia Produktif dan Rasio Ketergantungan Semester I Tahun 2022

No	Kelurahan/ Kecamatan	Usia 0-14 Tahun	Usia 15- 64 Tahun	Usia 65 Tahun+	Rasio Ketergantungan		
					0-14 Tahun	65 Tahun+	Total
1	MELONG	15.189	45.385	3.857	33,47	8,50	41,97
2	CIBEUREUM	14.498	43.358	3.046	33,44	7,03	40,46
3	UTAMA	8.099	24.555	1.438	32,98	5,86	38,84
4	LEUWIGAJAH	10.793	33.119	2.449	32,59	7,39	39,98
5	CIBEBER	6.987	20.966	1.506	33,33	7,18	40,51
	Cimahi Selatan	55.566	167.383	12.296	33,20	7,35	40,54
6	BAROS	4388	14.569	1.349	30,12	9,26	39,38
7	CIGUGUR TENGAH	11.042	33.401	2.092	33,06	6,26	39,32
8	KARANGMEKA R	3.628	11.559	1.178	31,39	10,19	41,58
9	SETIAMANAH	5.413	16.603	1.463	32,60	8,81	41,41
10	PADASUKA	9.805	28.627	2.430	34,25	8,49	42,74
11	CIMAH	2.967	9.324	980	31,82	10,51	42,33
	Cimahi Tengah	37.243	114.083	9.492	32,65	8,32	40,97
12	PASIRKALIKI	4.242	12.926	1.486	32,82	11,50	44,31
13	CIBABAT	13.013	38.531	3.311	33,77	8,59	42,37
14	CITEUREUP	9.783	29.035	2.298	33,69	7,91	41,61
15	CIPAGERAN	12.129	36.620	2.723	33,12	7,44	40,56
	Cimahi Utara	39.167	117.112	9.818	33,44	8,38	41,83

KOTA CIMAHI	131.976	398.578	31.606	33,11	7,93	41,04
--------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	-------------	--------------

Sumber : Database Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan Semester I Tahun 2022

Gambar 1.2.
Prosentase Penduduk Kota Cimahi berdasarkan Kelompok Usia Produktif
Semester I Tahun 2022



Sumber : Database Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan Semester I Tahun 2022

Angka beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk yang belum atau tidak produktif dibanding dengan penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Semakin tinggi prosentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan prosentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Perlu kehati-hatian dalam menerjemahkan angka beban ketergantungan karena naik turunnya angka beban ketergantungan tidak bisa secara langsung diartikan sebagai naik turunnya tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif. Meskipun penduduk usia kurang 15 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun termasuk penduduk tidak produktif faktanya banyak diantara mereka yang bekerja membantu ekonomi rumah tangga.

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut tempat tinggal. Persebaran penduduk di Kota Cimahi di setiap kelurahan tidaklah merata. Terdapat kelurahan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, seperti Kelurahan Melong dengan jumlah mencapai 64.431 Jiwa atau sebanyak 11.46% dari penduduk Kota Cimahi. Sedangkan Kelurahan Cimahi memiliki jumlah penduduk terkecil, yakni sebanyak 13.271 jiwa atau sebanyak 2.36% penduduk Kota Cimahi. Dilihat per Kecamatan, persebaran penduduk di Kota Cimahi paling banyak berada di wilayah

Kecamatan Cimahi Selatan, sebanyak 235.245 jiwa atau sebanyak 41,85% dari penduduk Kota Cimahi. Sedangkan persebaran penduduk yang terkecil adalah di Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu sebanyak 160.818 jiwa atau sebanyak 28,61% penduduk Kota Cimahi bertempat tinggal di Kecamatan Cimahi Tengah, sementara kecamatan Cimahi Utara berjumlah 166.097 jiwa atau sekitar 29,55%.

Tabel 1.5.
Persebaran Penduduk / Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi
Semester I Tahun 2022

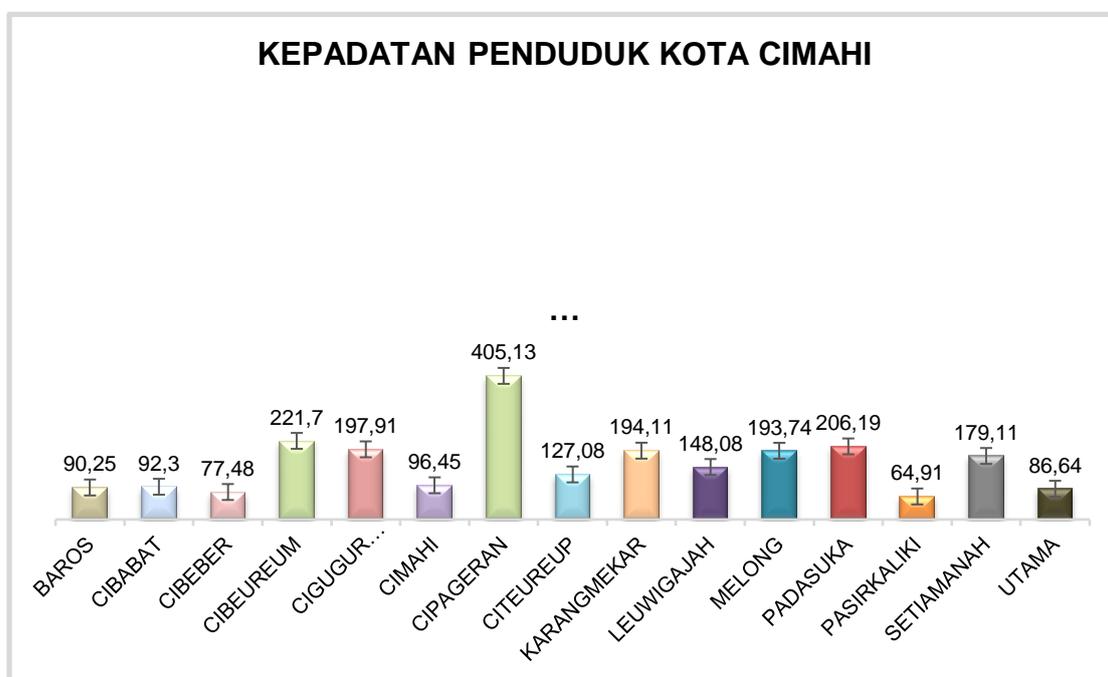
No	Kelurahan/ Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk	Persentase Kepadatan Jiwa / Ha
1	MELONG	332,56	64.431	193,74
2	CIBEUREUM	274,71	60.902	221,70
3	UTAMA	393,47	34.092	86,64
4	LEUWIGAJAH	313,06	46.361	148,08
5	CIBEBER	380,20	29.459	77,48
	CIMAHI SELATAN	1.694,00	235.245	138,86
6	BAROS	225,00	20.306	90,25
7	CIGUGUR TENGAH	235,13	46.535	197,91
8	KARANGMEKAR	84,31	16.365	194,11
9	SETIAMANAH	131,09	23.479	179,11
10	PADASUKA	198,18	40.862	206,19
11	CIMAHI	137,59	13.271	96,45
	CIMAHI TENGAH	1.011,30	160.818	159,02
12	PASIRKALIKI	287,38	18.654	64,91
13	CIBABAT	594,32	54.855	92,30
14	CITEUREUP	323,54	41.116	127,08
15	CIPAGERAN	127,05	51.472	405,13
	CIMAHI UTARA	1.332,29	166.097	124,67
	KOTA CIMAHI	4.037,59	562.160	139,23

Sumber : Database Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan Semester I Tahun 2022

Dengan Luas Wilayah 4037.59 Ha dan jumlah total penduduk 562.160 jiwa, Kota Cimahi memiliki tingkat kepadatan rata-rata 139,23 jiwa/Ha. Kecamatan Cimahi Tengah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 159.02 jiwa/ha, Kecamatan Cimahi Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk sebanyak 138,86 jiwa/ha, dan Kecamatan Cimahi Utara memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 124,67 jiwa/ha. Kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kelurahan Cipageran yaitu 405,13 jiwa/ha. Sedangkan Kelurahan Pasirkaliki merupakan Kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah, yaitu 64,91 jiwa/ha.

Tingginya kepadatan penduduk di Kelurahan Cipageran diantaranya disebabkan oleh banyak dibangunnya lahan pemukiman baru.

Gambar 1.3
Persebaran Penduduk / Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi
Semester I Tahun 2022



Sumber : Database Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan Semester I Tahun 2022

Untuk Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat yang paling tinggi yaitu sebesar 176.883 jiwa atau 31,46% dari jumlah penduduk Kota Cimahi. Sedangkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan Strata III menjadi yang paling kecil yaitu sebesar 530 Jiwa atau 0.09%.

5. GAMBARAN UMUM ORGANISASI SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

Kota Cimahi pada tahun 2021 Telah melakukan Evaluasi Kelembagaan pada perangkat daerah yaitu pada Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, kearsipan dan perpustakaan, dan Kantor Kesatuan Bangsa.

Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sd September 2021 fokus pada 9 (Sembilan) Perangkat Daerah, memastikan tidak terjadi tumpang tindih /duplikasi tusi pada perangkat daerah. Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai amanat Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan telah ditetapkan ke dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

(1) Tipologi dan urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

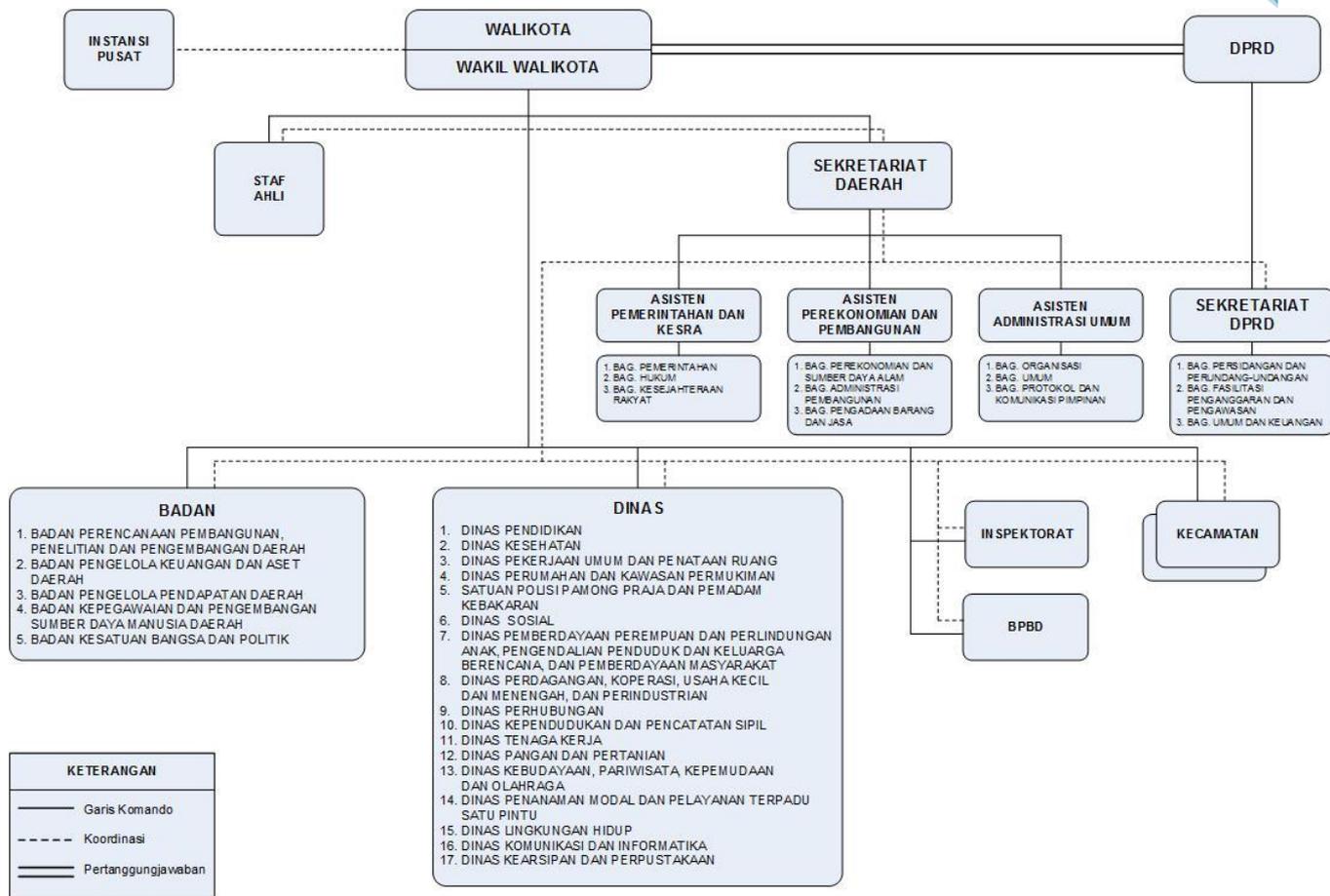
- a. Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum - 6 - serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
- f. Dinas Sosial dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan sosial;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan masyarakat;
- h. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan perindustrian;

- 
- i. Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi;
 - l. Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - m. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, urusan pariwisata, serta urusan kepemudaan dan olahraga;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan energi dan sumber daya mineral;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; dan
 - q. Dinas Arsip Daerah dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan;
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A; dan
 - c. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A.
- (5) Kecamatan Cimahi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
- a. Kelurahan Cipageran;
 - b. Kelurahan Citeureup;
 - c. Kelurahan Cibabat; dan
 - d. Kelurahan Pasirkaliki.

- 
- (6) Kecamatan Cimahi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
- a. Kelurahan Padasuka;
 - b. Kelurahan Setiamanah;
 - c. Kelurahan Karangmekar;
 - d. Kelurahan Baros;
 - e. Kelurahan Cimahi; dan
 - f. Kelurahan Cigugur Tengah.
- (7) Kecamatan Cimahi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, memiliki kelurahan yang terdiri dari:
- a. Kelurahan Cibeureum;
 - b. Kelurahan Cibeber;
 - c. Kelurahan Leuwigajah;
 - d. Kelurahan Utama; dan
 - e. Kelurahan Melong.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

TAHUN 2022



6. DATA KEPEGAWAIAN

Jumlah PNS Kota Cimahi hingga 31 Desember 2022 sebanyak 4267 orang dengan rincian sebagai berikut :

**JUMLAH ASN KOTACIMAH BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2022 SEBANYAK 4267 ORANG**



SUMBER DATA BKPSDMD KOTA CIMAH TAHUN 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah ASN dan P3K di Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebanyak 40267 orang. Jumlah PNS terbanyak berasal dari Dinas pendidikan sebanyak 1860 orang atau setara dengan 46 % dari total PNS Pemerintah Kota Cimahi. Dilihat dari tingkat jenjang pendidikan, terdapat 2413 orang merupakan lulusan Sarjana (S1) atau setara 56,55% dan merupakan komposisi terbesar dari keseluruhan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Selain itu masih terdapat 25 orang PNS yang merupakan lulusan terendah yaitu Sekolah Dasar (SD) atau setara 0,58%. Sedangkan untuk lulusan paling tinggi yaitu S3 sebanyak 6 orang atau setara 0,14%.

7. ISU STRATEGIS

Isu strategis Kota Cimahi dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kota Cimahi yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan, isu internasional, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, dan isu/kebijakan Kota Cimahi, termasuk hasil KLHS. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan *stakeholder*, maka ditetapkan sejumlah isu strategis pembangunan Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022, meliputi:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan, dilihat dari 2 (dua) indikasi yaitu meningkatnya garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang, namun jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi tahun 2019 masih tinggi yaitu sebanyak 26.910 jiwa. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih optimal untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, penduduk miskin Kota Cimahi yang pada tahun 2020 sebesar 31,64% atau 31.640 jiwa meningkat menjadi 32,48% pada



tahun 2021 atau menjadi 32.480 jiwa. Pandemi *Covid-19* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penduduk Kota Cimahi mengalami peningkatan.

Angka kemiskinan ini jauh lebih tinggi dari target RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sehingga terkait angka kemiskinan menjadi PR besar yang harus diselesaikan pada tahap rencana pembangunan transisi dimana program-program pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama sehingga penduduk miskin Kota Cimahi tidak bertambah.

2. Penanggulangan Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 9 persen dan pada tahun 2018 angkanya menjadi 7,93 persen. Namun, pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi sedikit mengalami peningkatan sehingga angkanya naik menjadi 8,08 persen atau sekitar 23.960 orang. Pengangguran merupakan salah satu isu utama di Kota Cimahi, dikarenakan pada tahun 2020 angka pengangguran di kota Cimahi mengalami peningkatan dengan jumlah angka pengangguran sebanyak 39.055 orang atau 13,30 persen. Jumlah pengangguran di Kota Cimahi sendiri sempat naik drastis saat pandemi COVID-19 mewabah tahun 2020. Bahkan menempati urutan terbesar kedua dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan jumlah 39.055 orang. Pada tahun 2021 jumlah pengangguran di kota Cimahi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah pengangguran di kota Cimahi pada tahun 2021 mencapai 38.193 orang atau sekitar 13.03 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase pengangguran terbuka yang ada di kota Cimahi sebetulnya telah mengalami penurunan. Dari yang semula 38.000 orang pada tahun 2020 namun di tahun 2021 menjadi 30 ribuan masyarakat angkatan kerja.

3. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan

Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan pendapatan menengah. Selama periode 2015-2016 indeks gini Kota Cimahi menurun sebesar 0,021 poin, yang semula 0,41 di tahun 2015 menjadi 0,42 di tahun 2016. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan 2019 indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,363 di tahun 2019. Hal ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional ini menunjukkan bahwa kesenjangan pemerataan pendapatan di Kota Cimahi lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan aktifitas perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang diperkirakan lebih terasa imbasnya pada masyarakat kelas bawah dibandingkan dengan kelas menengah dan kelas atas sehingga ketimpangan meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya capaian indeks gini pada tahun 2020 menjadi 0,38 dan pada tahun 2021 menjadi 0,415. Pada tahun 2021 Target Indeks Gini Kota Cimahi adalah 0,39 dengan realisasi 0,415 dan Capaian kinerja 93,59%.

4. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana yang berpotensi besar melanda wilayah kota Cimahi adalah rawan bencana hidrometeorologi yaitu rawan bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor hingga angin puting beliung. Wilayah kota Cimahi yang berpotensi mengalami rawan bencana tanah longsor adalah berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah longsor berpotensi terjadi pada daerah dengan kelerengan di atas 15 persen, selain itu kondisi tanah di Cimahi ternyata memiliki soliditas yang cukup rendah ketimbang wilayah lainnya hal ini disebabkan karena tanah Cimahi bekas letupan gunung berapi, kekuatannya beda dengan daerah lain yang bukan dari gunung meletus. Jika kemarau tanahnya renggang, jika musim hujan potensi longsornya besar karena terisi air. Sedangkan wilayah yang berpotensi banjir yaitu wilayah Cimahi Selatan. Sementara itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan berbagai bencana yang berpotensi terjadi di Kota Cimahi juga turut memberikan kontribusi terhadap isu ini. Kota Cimahi melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana. Serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, agar masyarakat paling tidak mampu mengambil tindakan awal penanggulangan bencana.

5. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi

Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan, menjadi penyebab arus lalu lintas menjadi tidak optimal. Penyebab lainnya adalah kapasitas jalan yang ada di Kota Cimahi belum memadai/ memenuhi standar fungsi jalan, untuk menampung jumlah kendaraan dari luar daerah yang melintas/ memasuki Kota Cimahi sehingga menambah kepadatan lalu lintas. Intervensi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan transportasi di Kota Cimahi adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan yang memadai. Melakukan penambahan kapasitas ruas jalan, rekayasa lalu lintas, serta perlu adanya pembatasan volume kendaraan dan harus mendorong perubahan penggunaan moda transportasi di masyarakat (dari kendaraan pribadi ke transportasi umum/sepeda).

6. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang rendah dapat di indikasikan dengan banyaknya rumah atau lingkungan/ kawasan permukiman yang tidak layak huni atau kumuh, hal ini dapat dilihat dari SK Kumuh tahun 2015 bahwa kawasan kumuh di kota cimahi seluas 176,77 Ha, dan sudah di tuntaskan tahun 2019 seluas 162,56 Ha sehingga masih ada sisa kawasan kumuh yang harus di tangani seluas 14,21 Ha, dan pada tahun 2021 sudah di tuntaskan seluas 176,52 Ha sehingga masih ada sisa kawasan kumuh yang harus di tangani seluas 0,18 Ha. Untuk memastikan tidak tumbuhnya kawasan kumuh baru perlu di lakukan kembali identifikasi dan verifikasi terkait dengan luas kawasan kumuh di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020, terindikasi bahwa di 10 kelurahan dibutuhkan penanganan kekumuhan yaitu Cibabat, Padasuka, Cigugur Tengah, Karangmekar, Setiamanah, Cibeureum, Leuwigajah, Melong, Utama dan Cimahi



Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan kawasan permukiman, salah satunya adalah dengan pembangunan Rumah Susun Sewa (rusunawa) dan penataan kawasan kumuh.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan isu kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi yaitu tidak adanya lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah kota, kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena dengan luas Kota Cimahi yang terbatas, rendahnya kualitas air akibat limbah industri, pertanian, domestik dan peternakan, menurunnya kualitas udara akibat polusi udara dari kendaraan dan industri.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Cimahi yaitu melalui upaya peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruang adalah poin strategis yang sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan Kota Cimahi. Selain itu dilakukan juga program pemulihan air baku dengan salah satunya adalah program konservasi air tanah melalui penanaman pohon dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk kebutuhan air bersih akan dikaji dengan teknologi yang tepat guna agar dapat menjaga ketersediaan air bersih dalam tanah tapi tetap dapat dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Cimahi.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara penguatan didalam implementasinya baik dalam pengendalian ijin dan pengawasan kesesuaian ijin dengan kenyataan dilapangan, ditandai dengan adanya koordinasi diantara instansi terkait.

8. Optimalisasi Kualitas Pendidikan

Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Cimahi yang hanya 10,98 tahun. Hal ini dapat di artikan bahwa rata-rata penduduk Kota Cimahi hanya mencapai lulus SMP atau hanya mencapai kelas 2 SMA. Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, Pemerintah Kota Cimahi telah memberikan perhatian besar salah satunya yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor Pendidikan sebesar 20% dari APBD yang didalamnya untuk pelaksanaan program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan/rehabilitasi fasilitas pendidikan dan Beasiswa Bidik Misi.

9. Optimalisasi Kualitas Kesehatan

Untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dibutuhkan kondisi kesehatan SDM yang baik. Karena dengan kondisi kesehatan yang baik, akan meningkatkan kualitas hidup yang baik sehingga bisa memaksimalkan potensi diri dalam turut serta melaksanakan pembangunan demi kemajuan bersama di Kota Cimahi. Oleh karena itu, isu terkait kualitas kesehatan ini perlu terus ditindaklanjuti melalui berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat Kota Cimahi baik yang sifatnya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Isu utama dalam sektor kesehatan di Kota Cimahi yaitu Angka Rasio Kematian Ibu (AKI), Angka Rasio Kematian Bayi (AKB), stunting dan kasus gizi buruk, selanjutnya, pandemi *Covid-19* juga masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara bersama di Kota Cimahi mengingat belum berakhirnya pandemi tersebut meskipun perkembangan kasusnya yang mulai melandai.



Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita di Kota Cimahi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); pengembangan mekanisme pelayanan kesehatan inklusif; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

10. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Penanganan PMKS dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial, dengan tujuan meningkatkan modal sosial di Kota Cimahi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pula pemberdayaan masyarakat. Permasalahan PMKS di Kota Cimahi yaitu masih kurangnya koordinasi penanganan PMKS untuk wilayah lintas batas yaitu adanya PMKS yang datang dari kabupaten/kota sekitar.

11. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat

Di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal jumlah pemberdayaan lembaga yang tidak mengalami perkembangan, pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah.

Untuk mewujudkan iklim pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu ditingkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pendekatan pemberdayaan yang berprespektif gender, peningkatan pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan pengawasan tumbuh kembang anak, peningkatan pengelolaan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.

12. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Pengendalian penduduk merupakan usaha untuk mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan terutama keluarga berencana dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan. Pengendalian penduduk perlu dilakukan mengingat laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang mencapai 1,31 pertahun dengan kebijakan keluarga berencana dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan.

13. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada

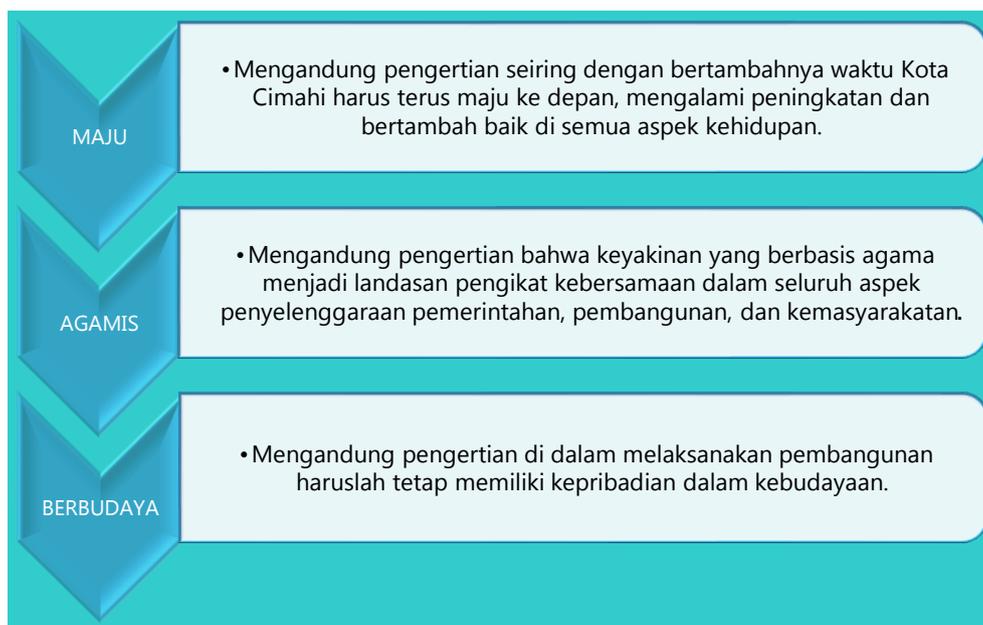
kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama untuk membawa masyarakat Kota Cimahi menuju arah yang lebih maju.

1. RENSTRA KOTA CIMAH

VISI DAN MISI KOTA CIMAH

VISI KOTA CIMAH

“MEWUJUDKAN CIMAH BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”



MISI KOTA CIMAH



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.



Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.



Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan



Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.



Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

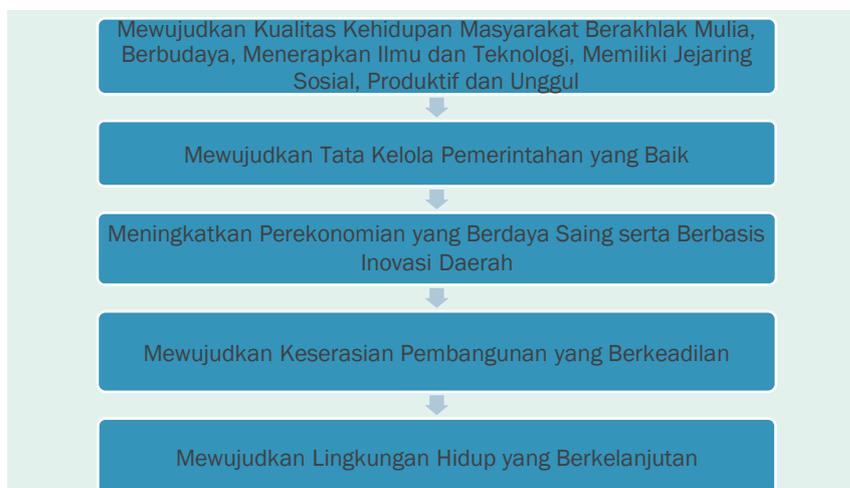
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta kabupaten/kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005-2025.

RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

CIMAHI KOTA “CERDAS”

<i>Creative</i>	}	• dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif
<i>Egalitarian</i>	}	• memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita
<i>Religious</i>	}	• sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen
<i>Developable</i>	}	• kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun
<i>Accretive</i>	}	• kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang
<i>Sustainable</i>	}	• tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi

Dengan demikian, visi **CIMAHI KOTA “CERDAS”** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka Panjang Kota Cimahi, yaitu:





Kurun waktu tahun 2017-2022 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.

Dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, terutama dengan adanya berbagai perubahan kebijakan maupun kebijakan baru Pemerintah Pusat serta kondisi Indonesia saat ini yang juga sangat berpengaruh pada pembangunan Kota Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan rencana pembangunan, maka Perubahan RPJMD ini diikuti dengan perubahan seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022. Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Rencana pembangunan menjadi tolok ukur bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah Kota Cimahi periode 2017-2022. Untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan tidak hanya kinerja keluaran (output), namun berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact). Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 di atur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi sebelum dilakukan perubahan RPJMD adalah sebanyak 21 Sasaran dan 25 Indikator, dan setelah dilakukan perubahan RPJMD Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi adalah sebanyak 21 Sasaran dan 23 Indikator

PERJANJIAN KINERJA

a. Target Kinerja Dalam perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi Tahun 2022 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ada dalam RPJMD Perubahan Tahun 2017-2022. Perjanjian Kinerja terdiri dari 21 Sasaran dan 23 Indikator. Penyajian target-target pada Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kota Cimahi Perubahan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
	1	2	3
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul			
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,12
2	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	74,9
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,12
4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1%
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik			
5	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B)
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Tinggi
8	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP
9	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	62
10	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	83,20
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19

MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan			
11	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	PDRB perkapita	37,77
12	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	5,11%
13	Meningkatkan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,38
14	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,02%
15	Menurunnya tingkat pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	11,37%
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan			
16	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service (LOS)</i>	C
17	Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,18%
18	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kelas resiko sedang
19	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	36,07
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan			
20	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	82%
21	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,60

Tabel 2.2
Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
Kota Cimahi Tahun 2022

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	826.574.379.808,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	127.059.906.749,00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	251.052.700,00
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64.862.640.595,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.145.574.200,00
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	69.629.000,00
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.905.500,00
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	196.448.569.474,00
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.996.755.362,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	32.100.684.269,00
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	292.000.000,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.481.774.200,00
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.471.644.972,00
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.586.350.735,00
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.412.607.500,00
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.999.274.589,00
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	947.705.400,00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.631.124.740,00
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.859.123.750,00
20	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.881.971.750,00
21	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.199.176.700,00
22	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.790.109.210,00
23	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.958.093.100,00
24	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.570.387.100,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.851.130.880,00
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.421.962.400,00
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.057.125.240,00
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	778.973.000,00
29	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.006.678,00
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.687.298.100,00
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	607.011.300,00
32	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.211.257.200,00
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	962.865.000,00
34	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	131.170.000,00
35	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	60.405.000,00
36	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	210.438.700,00
37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	737.972.600,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
38	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	39.832.600,00
39	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	28.039.500,00
40	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	247.680.110,00
41	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.390.517.112,00
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.742.484.900,00
43	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	4.354.400,00
44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LING	966.300.700,00
45	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	113.050.300,00
46	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	172.240.400,00
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	28.527.223.900,00
48	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	486.749.000,00
49	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	356.785.000,00
50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	618.354.200,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
51	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	16.799.800,00
52	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	45.790.900,00
53	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	852.496.900,00
54	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	489.469.400,00
55	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.417.558.900,00
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.420.929.700,00
57	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.543.853.555,00
58	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.384.057.700,00
59	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.778.149.120,00
60	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.700.000,00
61	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	447.198.000,00
62	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	276.946.500,00
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	106.000.000,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	452.177.600,00
65	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.246.366.900,00
66	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	376.969.900,00
67	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	392.574.100,00
68	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.225.482.000,00
69	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	488.123.100,00
70	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	382.731.400,00
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.118.729.400,00
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	32.412.949.400,00
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	263.938.600,00
74	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	368.964.000,00
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.326.673.600,00
76	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	605.563.200,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
77	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	352.663.500,00
78	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	177.400.000,00
79	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	14.692.000,00
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	590.060.100,00
81	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	94.524.600,00
82	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.474.238.950,00
83	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	192.493.800,00
84	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	673.817.000,00
85	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	33.310.100,00
86	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.059.195.600,00
87	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	468.556.200,00
88	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	94.160.000,00
89	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.694.776.900,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
90	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	621.096.000,00
91	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	762.538.000,00
92	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	390.475.900,00
93	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	218.937.600,00
94	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.052.786.000,00
95	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	70.791.000,00
96	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	168.477.000,00
97	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	13.805.000,00
98	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.471.178.100,00
99	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.839.144.400,00
100	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	38.506.617.200,00
101	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.058.873.600,00
102	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.031.838.400,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
103	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.203.893.313,00
104	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30.842.163.500,00
105	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.279.637.300,00
106	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.038.227.600,00
107	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.762.004.200,00
108	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	870.526.600,00
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	457.128.000,00
110	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	609.132.000,00
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.730.418.700,00
112	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.744.596.188,00
113	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.084.231.050,00
114	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.748.544.528,00
115	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	445.803.100,00

NAMA PROGRAM		ANGGARAN
116	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE	2.179.094.450,00
117	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	484.506.100,00
118	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	259.682.600,00
119	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	1.793.904.000,00
JUMLAH		1.614.782.803.477

Sumber data: APBDP BPKAD Tahun 2022

Tabel 2.3
Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul					
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,12	78,77	101%
2	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	74,9	75,76	101%
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,12	83,85	101%
4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1%	0,63%	137%
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik					
5	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B)	B (62,96)	104%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B	B	100%
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Tinggi	Belum Rilis	-
8	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	Belum Rilis	WTP

9	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	62	57,23	93%
10	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	83,20	83,61	100,49%
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19	3,09	97%

MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

11	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	PDRB perkapita	37,77	42,86	113,48%
12	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	5,11%	5,92%	116%
13	Meningkatkan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,38	0,408	93%
14	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,02%	5,11%	116%
15	Menurunnya tingkat pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	11,37%	10,77%	105%

MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

16	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service (LOS)</i>	C	C	100%
17	Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,18%	0,036	180%

18	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko bencana	Kelas resiko sedang	Kelas resiko sedang	100%
19	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	36,07	48,002	133%
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan					
20	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	82%	Belum rilis	-
21	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75	Belum rilis	-
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,60	91,97	99%

Sumber data: BPS dan Bappelitbangda Kota Cimahi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi yang terdiri dari 21 Sasaran dan 23 Indikator pada tahun 2022, sebagai berikut :

Misi 1, semua indikator berhasil dicapai,

Misi 2 Nilai LPPD (nilai dari Kemendagri belum rilis), Opini BPK (belum rilis), Indeks Profesionalitas ASN, Nilai SPBE belum tercapai,

Misi 3 satu indikator tidak tercapai yaitu: Indeks Gini,

Misi 4 semua indikator tercapai, dan

Misi 5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak tercapai, Indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Indikator Pemberdayaan Gender (IDG) capaian kerjanya belum rilis.

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL

SASARAN 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

INDIKATOR : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu

Indikator	Target	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	RPJMD Tahun 2018-2022	Tahun 2021			Tahun 2022		
Indeks Pembangunan Manusia	78,12	77,86	78,06	100,23%	78,12	78,77	101%

Angka IPM mengukur kesejahteraan manusia berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Semakin tinggi angka IPM, semakin tinggi pula taraf kehidupan masyarakat di suatu

daerah. Capaian IPM Kota Cimahi selama beberapa tahun terakhir konsisten berada di atas Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2022 capaian IPM Jawa Barat yaitu 73,12. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan Pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih pesat dibandingkan Kota/Kab lain di Jawa Barat. Pada tahun 2022 IPM Kota Cimahi dari target sebesar 78,12 realisasi IPM Kota Cimahi adalah sebesar 78,77 menempati ranking keempat setelah Kota Depok. Angka ini masuk dalam kategori tinggi dengan tingkat capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 101%. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Kota Cimahi Tahun 2021, realisasi capaian IPM pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat di Kota Cimahi sudah cukup baik. Namun demikian perlu dicatat bahwa data ini mungkin berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan lain-lain.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Penilaian IPM berdasarkan tiga tujuan akhir dari pembangunan:

1. Masa hidup yang diukur dengan angka harapan hidup,
2. Pengetahuan yang dinilai berdasarkan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah, serta
3. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli.

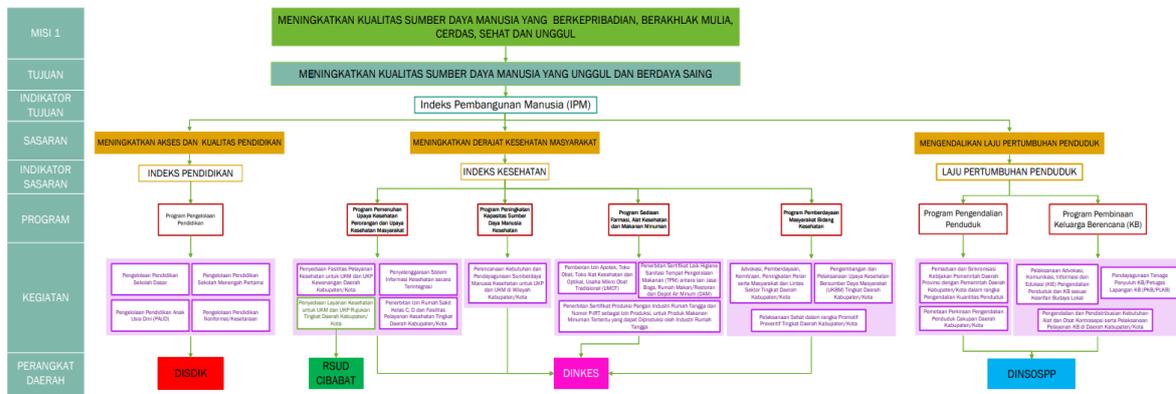
Uraian	Capaian	
	2021	2022
IPM	78,06	78,77
Indeks Pendidikan	75,29	75,76
Indeks Kesehatan	83,40	83,85

Sumber: BPS tahun 2022

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih baik sejak pemekaran. Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2021, IPM Kota Cimahi telah mencapai 78,06 dan meningkat menjadi 78,77 pada tahun 2022, begitupun dengan komponen IPM yaitu indeks pendidikan dan indeks kesehatan capaian realisasi tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2021.

URAIAN	TARGET RPJMD	CAPAIAN 2022
IPM	78,12	78,77
INDEKS PENDIDIKAN	74,84	75,76
INDEKS KESEHATAN	82,94	83,85

Dari data di atas target yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2022 ditetapkan target IPM tahun 2021 adalah 78,12 sementara capaian realisasi pada tahun 2022 angka IPM untuk Kota Cimahi yang dikeluarkan BPS adalah 78,77 sehingga realisasi capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.



Crosscutting IKU IPM (sumber data Bappeltibangda Kota Cimahi)

SASARAN 2 : MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN
INDIKATOR : INDEKS PENDIDIKAN

SASARAN 2 : MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

INDIKATOR : INDEKS PENDIDIKAN



1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Indeks Pendidikan	74,90	75,76	101%

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Indeks Pendidikan	74,20	74,87	100,81%	74,84	75,29	100,60%	74,90	75,76	101%

3. Perbandingan Realisasi Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target RPJMD yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Indikator	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Indeks Pendidikan	74,90	74,90	75,76	101%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional (SPM)

Indikator	Target SPM	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Indeks Pendidikan	100%	74,90	75,76	101%

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	74.90	75,76	101%

Tabel 2
Pencapaian Sasaran Dinas Pendidikan Kota Cimahi
Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,97 tahun	11,21 tahun	102,19%
		Harapan Lama Sekolah	13,80 tahun	13,82 tahun	100,14%
	<i>Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan</i>				101,17%
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Capaian SNP Jenjang PAUD	36,64	74,00	201,97%
		Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SD	86,57	84,16	97,22%
		Persentase siswa kelas 2 SD paham literasi	90,00%	92,94%	103,27%
		Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMP	72,34	80,09	101,71%
		Rata-Rata Capaian SNP Jenjang DIKMAS	51,26	76,00	148,26%
	<i>Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan</i>				130,49%
Rata-Rata Capaian Sasaran					115,83%

Berdasarkan data pada Tabel 1, capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan indikator kinerja utama (IKU Kota Cimahi) "Indeks Pendidikan" tahun 2022 dinyatakan "**berhasil**" dan melebihi target 100% dengan capaian 101,15% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan pembangunan khususnya di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Cimahi.

a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk serta dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi mencatat, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota



Cimahi tahun 2022 mencapai 11,08 tahun, tumbuh 0,12 poin dibandingkan dengan tahun 2021, yang berarti secara rata-rata penduduk dewasa Kota Cimahi yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,08 tahun atau kelas 11 (sebelas) SMA/SMK.

Jika dibandingkan target IKU RLS tahun 2022 yaitu 10,97 tahun dengan realisasinya sebesar 11,21 tahun, maka capaian kinerjanya adalah 102,19% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi mencatat, HLS anak dengan usia 7 tahun di Kota Cimahi tahun 2022 sebesar 13,81 tahun, tumbuh 0,01 dibandingkan pada tahun 2020. Ini berarti rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,81 tahun atau hampir setara dengan Diploma II. Jika dibandingkan target IKU HLS tahun 2022 yaitu 13,80 tahun dengan realisasinya sebesar 13,82 tahun, maka capaian kinerjanya adalah 100,14% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

c) Rata-rata Capaian SNP Jenjang PAUD

Rata-rata capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Jenjang PAUD, SD, SMP, dan Dikmas menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian peningkatan mutu pendidikan di Kota Cimahi berdasarkan penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan. penerapan 8 SNP pada jenjang PAUD oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat dengan hasil pencapaian mutu pendidikan/ rapor mutu jenjang PAUD di Kota Cimahi secara rerata adalah 74,00.

Dari 8 SNP tersebut, capaian tertinggi ada pada Standar Proses yaitu 89,00 sedangkan capaian terendah ada pada Standar Pembiayaan yaitu 44,00 dikarenakan masih banyak Lembaga yang hanya mengandalkan bantuan serta iuran dari orang tua tanpa mencari solusi lain dalam menutup masalah kekurangan anggaran serta belum paham tentang penyusunan RAPBS. Jika dibandingkan target IKU Rata-rata Capaian SNP Jenjang PAUD tahun 2022 yaitu 36,64 dengan realisasinya sebesar 74,00, maka capaian kinerjanya adalah 201,97% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

d) Rata-rata Capaian SNP Jenjang SD

Hasil pencapaian mutu pendidikan/ rapor mutu jenjang SD di Kota Cimahi secara rerata adalah 84,16 dengan metode perhitungan berbeda dari tahun sebelumnya. Dari 8 SNP tersebut, capaian tertinggi ada pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu 93,65 dengan penjelasan dari 5 (lima) indikator untuk mengukur standar ini, empat indikator capaiannya seimbang kecuali indikator ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan karena seluruh SD di Kota Cimahi belum memiliki Laboran. Sedangkan capaian terendah ada pada Standar Sarana dan Prasarana yaitu 68,86 dengan penjelasan dari 3 (tiga) indikator untuk mengukur standar ini, indikator kapasitas daya tampung sekolah memadai yang terendah karena peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah kurang optimal serta luas lahan sekolah dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi.

Jika dibandingkan target IKU Rata-rata Capaian SNP Jenjang SD tahun 2022 yaitu 86,57 dengan realisasinya sebesar 84,16, maka capaian kinerjanya adalah 97,22% dan di bawah target yang telah ditetapkan.

e) Rata-rata Capaian SNP Jenjang SMP

Hasil pencapaian mutu pendidikan jenjang SMP di Kota Cimahi secara rerata adalah 80,09. Dari 8 SNP tersebut, capaian tertinggi ada pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu 60,9 dengan penjelasan dari 5 (lima) indikator untuk mengukur standar ini, satu indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan telah mencapai SNP, tiga indikator capaiannya rendah dan satu indikator paling rendah yaitu indikator ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan karena terdapat SMP di Kota Cimahi belum memiliki Laboran. Sedangkan capaian terendah ada pada Standar Sarana dan Prasarana yaitu 48,2 dengan penjelasan dari 3 (tiga) indikator untuk mengukur standar ini, indikator kapasitas daya tampung sekolah memadai yang terendah disebabkan ada beberapa sekolah belum memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan.

Jika dibandingkan target IKU Rata-rata Capaian SNP Jenjang SMP tahun 2022 yaitu 72,34 dengan realisasinya sebesar 80,09, maka capaian kinerjanya adalah 101,71% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan.

f) Rata-rata Capaian SNP Jenjang Dikmas

SNP pada jenjang Dikmas oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat dengan hasil pencapaian mutu pendidikan jenjang Dikmas di Kota Cimahi secara rerata adalah 76,00. Dari 8 SNP tersebut, capaian tertinggi ada pada Standar Kompetensi Kelulusan yaitu 100 sedangkan capaian terendah ada pada Standar Sarana dan Prasarana yaitu 47 dikarenakan antara lain kurangnya dokumen kepemilikan lahan dan penggunaan lahan dan gedung yang digunakan lembaga Dikmas serta kurangnya dokumen jenis dan jumlah peralatan pembelajaran yang layak pakai dan difungsikan dalam proses pembelajaran pada setiap jenis program di lembaga Dikmas.

Jika dibandingkan target IKU Rata-rata Capaian SNP Jenjang Dikmas tahun 2022 yaitu 51,26 dengan realisasinya sebesar 76,00 maka capaian kinerjanya adalah 148,26% dan melebihi target yang telah ditetapkan.

g) Persentase Siswa Kelas 2 SD paham literasi

Persentase Siswa Kelas 2 SD paham literasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur sasaran meningkatnya kualitas pendidikan.

Rumusan menghitung Persentase Siswa Kelas 2 SD paham literasi:

$$\begin{aligned} & \text{rsentase Siswa Kelas 2 SD Paham Literasi} \\ & = \frac{\text{Jumlah siswa kelas 2 SD paham literasi}}{\text{Jumlah siswa kelas 2 SD}} \times 100\% \end{aligned}$$

Pengukuran dilakukan terhadap 116 SD di Kota Cimahi dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana tersebut di atas. Jumlah siswa kelas 2 SD yang paham literasi sebanyak 6.645 siswa (terdiri dari 3.278 siswa laki-laki dan 3.367 siswa perempuan) dibagi dengan jumlah seluruh siswa kelas 2 SD sebanyak 7.150 siswa (terdiri dari 3.576 siswa laki-laki dan 3.574 siswa perempuan), sehingga diperoleh persentase siswa kelas 2 SD paham literasi sebesar 92,94%. Jika dibandingkan

target IKU Persentase siswa kelas 2 SD Pahami Literasi tahun 2022 yaitu 90,00% dengan realisasinya sebesar 92,94%, maka capaian kinerjanya adalah 103,27% dan melampaui target yang telah ditetapkan.

h) Berikut Adalah Analisis Penyebab Keberhasilan/Belum Tercapainya Target Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Berdasarkan Setiap IKU.

a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Utama RLS dan HLS

RLS dan HLS merupakan indikator untuk mengukur aksesibilitas pendidikan. Capaian kinerja kedua IKU ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu untuk RLS capaiannya 11,21 tahun dan HLS capaiannya 13,82 tahun berdasarkan data BPS Kota Cimahi Tahun 2022. Keberhasilan pencapaian kedua indikator ini didukung adanya kemudahan aksesibilitas pendidikan di Kota Cimahi yaitu sebaran sekolah baik jenjang SD maupun SMP yang merata di setiap kelurahan serta faktor luas wilayah Kota Cimahi.

Untuk dapat mencapai target RLS dan HLS tersebut, Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan dengan 3 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan serta sub kegiatan antara lain : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jenjang SD, Pengadaan Perlengkapan Siswa Jenjang SD/SMP/Dikmas (mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan), Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD/SMP/Dikmas (mendukung 21 Program Prioritas Wali Kota), Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP, serta Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. Sub kegiatan-sub kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian target IKU Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

b) Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Target Indikator Kinerja Utama RLS dan HLS

Dalam upaya mencapai target IKU RLS dan HLS, alternatif solusi adalah melakukan prioritas alokasi anggaran bagi sub kegiatan-sub kegiatan yang menunjang perluasan aksesibilitas pendidikan yaitu mengalokasikan anggaran sebesar 26,27% dari total anggaran Dinas Pendidikan Kota Cimahi pada tahun anggaran 2022.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan perlu dukungan sumber daya. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber dana/anggaran. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya khususnya sumber dana/anggaran pada tahun anggaran 2022 dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pendidikan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	IKU	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	- Rata-rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah	101,17	89,95	11,22
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	- Rata-Rata Capaian SNP Jenjang PAUD - Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SD - Persentase Siswa Kelas 2 SD Paham Literasi - Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMP - Rata-rata capaian SNP Jenjang Dikmas	130,49	95,53	34,96
Capaian keseluruhan			115,83	90,94	24,89

Catatan : tingkat efisiensi = capaian kinerja – penyerapan anggaran

Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran, digunakan rumus yaitu tingkat efisiensi merupakan hasil pengurangan dari capaian kinerja terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan Tabel 3 di atas, Dinas Pendidikan Kota Cimahi pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan hasil capaian yang sangat memuaskan, hal ini ditunjukkan oleh pencapaian kedua sasaran strategis yang rata-rata di atas 100% dengan tetap melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran.

Untuk sasaran pertama Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan, capaian kinerjanya 101,17% dan penyerapan anggarannya 89,95% sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 11,16%. Sedangkan untuk sasaran kedua Meningkatkan Kualitas Pendidikan, capaian kinerjanya 130,49% dan penyerapan anggarannya 95,53% sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang cukup tinggi yaitu 34,96%. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Cimahi sebesar 115,83% dan penyerapan anggarannya sebesar 90,94% sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 24,89%.

Untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program pada tahun 2022 juga dilakukan analisis yang diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam Pelaksanaan Program Tahun 2022

No.	Program	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	98,50	90,92	7,58
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100,45	100,00	0,45
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	105,00	78,77	26,23

Catatan : tingkat efisiensi = capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan Tabel 4 di atas, Program Pengelolaan Pendidikan, capaian kinerjanya 98,50% dan penyerapan anggarannya 90,92% sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7,58%, untuk Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan capaian kinerjanya 100,45 dengan penyerapan anggaran 100% dengan efisiensi sebesar 0,45%. Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerjanya 105,00% dan penyerapan anggarannya 78,77% sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang cukup tinggi yaitu 26,23% disebabkan oleh kuota PPPK Tahun 2022 belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

a) Capaian Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis yang terkait dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan, ditetapkan 1 (satu) sasaran program dengan 13 (tiga belas) indikator program yang pencapaian target kinerjanya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Program,
dan Target Kinerja Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	103,04	100,47	97,51%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,08	95,05	97,91%
3		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	97,73	99,52	101,83%
4		Angka Putus Sekolah SD	0,014%	0,028%	50,00%
5		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	90,08%	100,32%	111,37%
6		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	76,64%	82,26%	107,33%
7		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	79,59%	89,50%	112,45%
8		Angka Putus Sekolah SMP	0,01%	0,02%	50,00%
9		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	96,56%	93,18%	96,50%
10		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	77,35%	79,33%	102,56%
11		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	77,35%	79,33%	102,56%
12		Angka Melek Huruf (AMH)	99,99%	99,99%	100%
13		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	68,06%	29,09%	42,74%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
Rata-rata Capaian Kinerja					90,21%

Sumber data: Kemendikbud, Disdik dan Kemenag Kota Cimahi

Berdasarkan data pada Tabel 5, rata-rata capaian kinerja dari sasaran program ini di tahun 2022 dapat dikategorikan “berhasil” dengan capaian sebesar **90,21%**. Dari 13 (tiga belas) indikator program, terdapat tujuh indikator yang mencapai target dan enam indikator yang belum mencapai target.

b. Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target Indikator Kinerja Program: Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi dapat juga dipengaruhi oleh sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi, yang salah satu kemungkinannya adalah apabila peserta didik baru tidak diterima di satuan pendidikan negeri sesuai zonasinya ada kemungkinan peserta didik baru tersebut melanjutkan pendidikannya ke satuan pendidikan di luar Kota Cimahi.

c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Target Indikator Kinerja Program: Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM)

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Pengadaan Perlengkapan Siswa dalam rangka mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar berupa pemberian bantuan SPP gratis bagi peserta didik kurang mampu pada satuan pendidikan swasta, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

d. Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target Indikator Kinerja Program: Angka Putus Sekolah SD

Belum tercapainya target Angka Putus Sekolah SD Tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu:

1. Berpindahnya peserta didik ke lembaga pendidikan keagamaan lainnya tanpa melaporkan ke Dinas Pendidikan, sehingga dinas Pendidikan mengalami kesulitan dalam menelusuri keberadaan peserta didik.
2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian keluarga sehingga anak memutuskan membantu perekonomian keluarga.
3. Faktor psikologis peserta didik yang malas untuk mengikuti Pendidikan.

e. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Target Indikator Kinerja Program: Angka Putus Sekolah SD

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Angka Putus Sekolah SD, melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan sub kegiatan antara lain Pengadaan Perlengkapan Siswa dalam rangka mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar berupa pemberian bantuan SPP gratis bagi peserta didik kurang mampu pada satuan pendidikan swasta, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Program: Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM)/Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

Tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP bahkan melebihi 100% disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kebijakan Pemerintah Pusat dalam optimalisasi angka partisipasi pendidikan melalui penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun sehingga meningkatkan kesadaran orang tua yang memiliki anak untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan SMP serta Program Prioritas Wali Kota Cimahi berupa bantuan SPP gratis bagi peserta didik kurang mampu di satuan pendidikan swasta sehingga memberikan peluang untuk semua anak usia SMP termasuk yang kurang mampu untuk dapat bersekolah.

Tercapainya angka partisipasi jenjang SMP juga didukung oleh kebijakan pendirian 3 (tiga) sekolah baru jenjang SMP pada tahun 2020 lalu yaitu SMP Negeri 14, SMP Negeri 15, dan SMP Negeri 16 sehingga meningkatkan daya tampung.

g. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Target Indikator Kinerja Program: Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM)/Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM)/Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP, melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub Kegiatan antara lain Pengadaan Perlengkapan Siswa dalam rangka mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama berupa pemberian bantuan SPP gratis bagi peserta didik kurang mampu pada satuan pendidikan swasta, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

h. Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target Indikator Kinerja Program: Angka Putus Sekolah SMP

Belum tercapainya target Angka Putus Sekolah SMP Tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu :

1. Berpindahannya peserta didik ke lembaga pendidikan keagamaan lainnya tanpa melaporkan ke Dinas Pendidikan, sehingga dinas Pendidikan mengalami kesulitan dalam menelusuri keberadaan peserta didik.
2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian keluarga sehingga anak memutuskan membantu perekonomian keluarga.

3. Faktor psikologis peserta didik yang malas untuk mengikuti Pendidikan.

i. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Target Indikator Kinerja Program: Angka Putus Sekolah SMP

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Angka Putus Sekolah SMP, melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub kegiatan antara lain Pengadaan Perlengkapan Siswa dalam rangka mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah berupa pemberian bantuan SPP gratis bagi peserta didik kurang mampu pada satuan pendidikan swasta, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

j. Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target Indikator Kinerja Program: Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)

Belum tercapainya target indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) Tahun 2022 didukung oleh beberapa faktor penyebabnya yaitu masih berlanjutnya bencana nonalam yang bersifat global dan nasional yaitu pandemi Covid-19.

k. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Target Indikator Kinerja Program: Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs), melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Siswa untuk jenjang SD dan SMP dalam rangka mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah berupa pemberian bantuan SPP gratis bagi peserta didik kurang mampu pada satuan pendidikan swasta, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

l. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Target Indikator Kinerja Program: Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini, melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sub kegiatan antara lain Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dalam rangka mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pengelolaan Dana BOP PAUD.

j. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Program: Angka Melek Huruf (AMH)

Tercapainya target Angka Melek Huruf (AMH) disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah perkembangan zaman dan teknologi berupa penggunaan buku digital menjadi salah satu alternatif memangkas angka buta huruf.

L. Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target Indikator Kinerja Program: Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Belum tercapainya target indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Berpindahnya peserta didik ke lembaga pendidikan keagamaan lainnya tanpa melaporkan ke Dinas Pendidikan, sehingga dinas Pendidikan mengalami kesulitan dalam menelusuri keberadaan peserta didik.
2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian keluarga sehingga anak memutuskan membantu perekonomian keluarga.
3. Faktor psikologis peserta didik yang malas untuk mengikuti Pendidikan.

m. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai Target Indikator Kinerja Program: Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

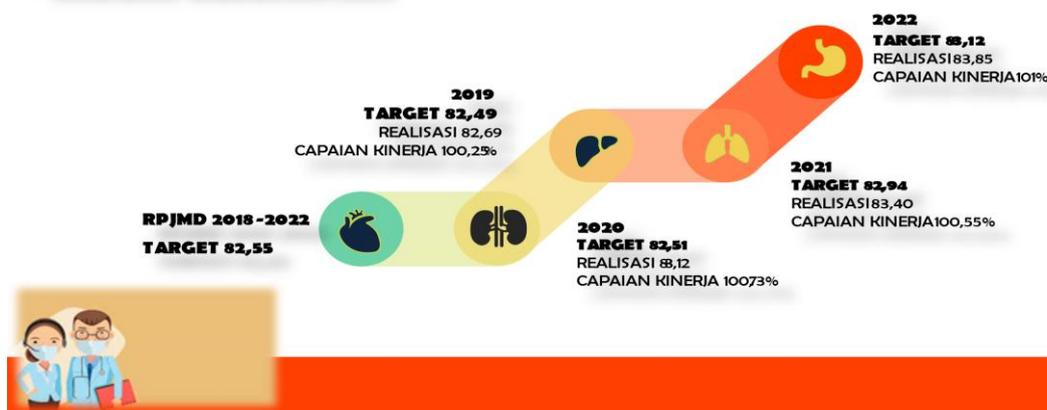
Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan sub kegiatan antara lain Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam rangka mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

SASARAN 3 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR : INDEKS KESEHATAN

SASARAN 3 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

• INDEKS KESEHATAN



1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Kesehatan	82,91	83,12	100,25	82,94	83,40	100,55	83,12	83,85	101%

Sumber: Dinkes Kota Cimahi

Capaian indeks kesehatan tahun 2020 sebesar 83,12 (100,25%) diatas target yang telah ditetapkan. Peningkatan Indeks Kesehatan Tahun 2020 dibanding tahun 2021 sebesar 0,30%. Capaian Kinerja Indeks Kesehatan Tahun 2020 sebesar 100,25%. Capaian indeks kesehatan mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pada pembangunan kesehatan di Kota Cimahi. Pencapaian indeks kesehatan Kota Cimahi pada tahun 2022 yaitu 83,85 yaitu terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 0,45.

2. Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target RPJMD yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Indikator	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Indeks Kesehatan	83,12	83,12	83,85	101%

Sumber: Dinkes Kota Cimahi

Indeks Kesehatan diukur dari umur panjang dan sehat, pencapaian indeks kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 sebesar 83,85 dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 sebesar 83,12. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat di Kota Cimahi lebih baik dengan ditunjang oleh pelayanan kesehatan yang baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan SPM

Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	98,70	98,70
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	99,05	99,05
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	98,45	98,45
Pelayanan kesehatan balita	100	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	99,49	99,49
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	100	100
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang terduga TB	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan	100	100	100

tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)			
---	--	--	--

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pada pembangunan kesehatan di Kota Cimahi. Keberhasilan peningkatan Indeks Kesehatan Kota Cimahi dapat disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan Rumah Sakit di Kota Cimahi : 7 Rumah Sakit umum dan 1 Rumah Sakit Khusus dalam mendukung pelayanan
- Ketersediaan 13 Puskesmas di Kota Cimahi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (3 Puskesmas PONED, 10 Puskesmas non perawatan dan 2 Puskesmas Pembantu)
- Ketersediaan klinik
- Ketersediaan Tenaga Kesehatan
- Adanya Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (Posbindu, Posyandu, Pos UKK)
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 yang belum memenuhi target yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan pada usia produktif.

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

- Data penerima layanan
Data penerima layanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi mutu layanan pada setiap indikator SPM. Pelayanan SPM beberapa indikator yang belum mencapai target 100% seperti ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan pada usia produktif, telah sesuai dengan jumlah real yang ada di masing-masing Puskesmas. Realisasi ini akan menjadi dasar penetapan target tahun berikutnya.
- Sarana/Data barang dan jasa
Data terkait sarana belum tersedia secara lengkap baik dari Puskesmas atau jejaring fasilitas kesehatan.
- Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian SPM Tahun 2022 sebesar 11.342.670.406,- Rupiah, bersumber dari dana APBD dan APBN (Bantuan Operasional Kesehatan). Realisasi Anggaran SPM Pada Dinas Kesehatan 2022 sebesar 5.703.661.395,- Rupiah atau 63,33%. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan BOK karena Menu dan Juknis tidak tersedia sejak awal tahun anggaran.
- Sistem pencatatan dan pelaporan
Pelaporan Standar Pelayanan Minimal dari baik dari Puskesmas atau jejaring fasilitas kesehatan belum menyampaikan hasil pelayanan SPM beserta capaian standar mutu layanan SPM masing masing indikator.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

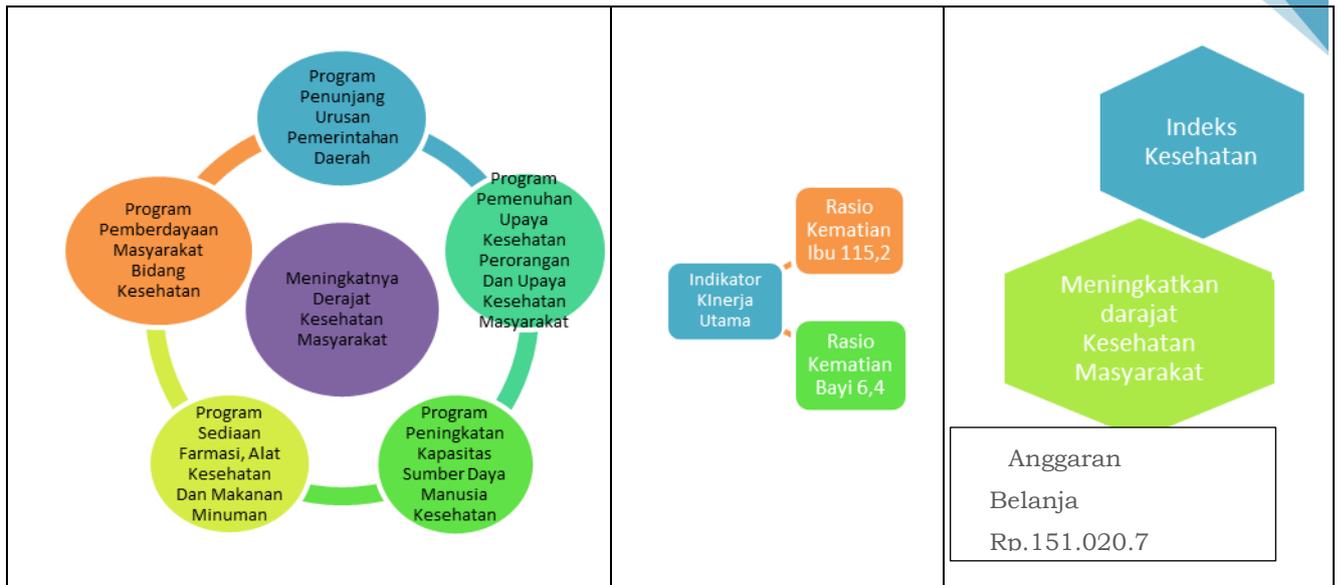
Capaian kinerja keuangan berdasarkan APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 151.020.796.331,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 122.846.723.245,- (81,34%) dengan realisasi Kinerja program sebesar 99,41%. Realisasi anggaran program untuk mewujudkan sasaran strategis diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasasi Anggaran Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.742.047.036	70.850.612.531	85,63	11.891.434.505
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.862.640.595	49.676.907.810	76,59	15.185.732.785
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.145.574.200	2.027.914.803	64,47	1.117.659.397
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	69.629.000	53.649.800	77,05	15.979.200
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.905.500	123.312.400	61,38	77.593.100
	TOTAL	151.020.796.331	122.846.723.245	81,34	28.174.073.086

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pernyataan Kinerja (Cross Cutting Program Kegiatan)

Dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan mencapai indikator sasaran, Dinas Kesehatan ditunjang oleh 5 program yang saling berkaitan dengan masing-masing indikator sasaran. Keterkaitan antara program yang mendukung capaian IKU dinas kesehatan dan indikator kinerja kepala daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



SASARAN 4 : MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

INDIKATOR : LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK



Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah sebesar 0,76 persen, angka ini melebihi target RPJMD Kota Cimahi sebesar 1.02 dengan capaian kinerja 125,65%. Laju pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi yang sebesar 0,76 % mempunyai konsekuensi dalam pemenuhan fasilitas

umum dan pelayanan dasar bukan hanya dari kuantitas tapi juga kualitas, terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang tidak merata berdampak pada kemacetan di waktu waktu tertentu karena mobilitas penduduk yang tinggi dengan kondisi wilayah yang terbatas.

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 hingga tahun 2021, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 0,76 % atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,19 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk Cimahi sebanyak 571.632 jiwa pada Tahun 2021 tersebar di 3 (tiga) kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 234.848 jiwa. Walau Kecamatan Cimahi Selatan memiliki penduduk terbanyak, namun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 16.009 jiwa/km². Kepadatan ini bahkan berada diatas rata-rata kepadatan penduduk Kota Cimahi yaitu 14.160 jiwa/km².

MISI 2 : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH, PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN EKONOMIS YANG BERBASIS PADA SISTEM PENGANGGARAN YANG PRO PUBLIK

SASARAN 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI

- MISI 2 MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH, PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN EKONOMIS YANG BERBASIS PADA SISTEM PENGANGGARAN YANG PRO PUBLIK



1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC	Tidak Tercapai	B (60,43)	B (60,01)	99,31%	B (60,73)	B (62,96)	104%

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 semula adalah **60,01** dengan Predikat “**B**”, pada Tahun 2020 menjadi **59,22** dengan Predikat “**CC**”, dan pada Tahun 2021 nilai naik Kembali menjadi **60,01** dengan Predikat “**B**”. Pada tahun 2022, Indeks RB Kota Cimahi kembali mengalami peningkatan sebesar **2,95** poin dengan total nilai **62,96** predikat “**B**” dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

NILAI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2022 HASIL EVALUASI KEMENPAN DAN RB

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
			2022
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	11,49

	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,93
	III. Reform	30,00	14,95
Total Komponen Pengungkit		60,00	32,37
NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,56
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,41
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,15
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,47
Total Komponen Hasil		40,00	30,59
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		100,00	62,96

2. Terdapat 10 hasil antara perubahan Pemerintah Kota Cimahi yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	225,00	KASN
2.	Profesionalitas ASN	0-5	53,58	57,23	BKN
3.	Implementasi SPBE	0-100	2,75	3,09	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-5	22,00	24,80	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,02	4,60	Kementerian PANRB
6.	Maturitas SPIP	0-5	1	2	BPKP
7.	Kapabilitas APIP	0-100	2	2	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	69,04	75,10	Ombudsman Republik Indonesia
9.	Kualitas Pengelolaan	0-100	64,17	67,02	ANRI

	Arsip				
10.	Reformasi Hukum	0-100	-	68,45	Kementerian Hukum dan HAM

Pada tahun 2020 hasil antara menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan pada kualitas hasil antara yaitu profesionalitas ASN, implementasi SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, maturitas SPIP, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip. Penilaian hasil antara pada Kota Cimahi yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu penilaian sistem merit dan penilaian terhadap reformasi hukum menunjukkan hasil yang cukup baik.

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Cimahi memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2.	NILAI SAKIP	0-100	65,14 (Baik)	Kementerian PAN dan RB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	94,10	Kementerian PAN dan RB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	81,45	SPI Eksternal Oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	88,25	SPI Internal Oleh KPK

3. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi telah melakukan beberapa upaya yaitu dengan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, antara lain:

- a. Memperkuat peran Tim RB pada Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan konsistensi pelaksanaan RB pada seluruh Perangkat Daerah (PD);
- b. Melaksanakan pendampingan pengendalian kebijakan dan penyusunan naskah akademis kebijakan;

- 
- c. Mengoptimalkan aplikasi SIMAKCI untuk seluruh pelaporan data dukung IP ASN dan *merelease* capaian IP ASN PD, dan media penilaian mandiri sistem merit, serta hasilnya dijadikan dasar sebagai pemberian *punishment*,
 - d. Menyusun kebijakan pengawasan internal ditandai dengan Peraturan Walikota Cimahi nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Keputusan Walikota Cimahi nomor: 700/Kep.1201-Inspektorat/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Peraturan Walikota Cimahi nomor 56 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pemerintah Kota Cimahi;
 - e. Membangun layanan publik berbasis elektronik berupa portal layanan publik cimahi *smart city* yg berbasis *web* dan *mobile* (android dan iOS) (<https://smartcity.cimahikota.go.id>) dan *landing page portal website* resmi Pemda Cimahi (<https://cimahikota.go.id>).

4. Berdasarkan catatan hasil evaluasi RB tahun 2022 dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Pemerintah Daerah Kota Cimahi, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB di Kota Cimahi yaitu:

- a. Mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, Core Values ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
- b. Melakukan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) agar dapat menjamin efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun;
- c. Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Peraturan Menpan No. 20 Tahun 2018;
- d. Menetapkan peta proses bisnis pada PD yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal;
- e. Melaksanakan *assessment* terhadap seluruh pegawai dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi dan mengimplementasikan aturan tentang manajemen talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;
- f. Membangun aplikasi pengukuran kinerja organisasi dan individu dan memastikan pemanfaatannya agar terwujud manajemen kinerja yang baik dan konsisten;
- g. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas serta meningkatkan peran Inspektorat untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pemanfaatan aplikasi Cimahi *Smart City*;
- i. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh PD dan memastikan tindak lanjut dari hasil SKM kepada seluruh layanan agar dapat dilakukan strategi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pengguna layanan.

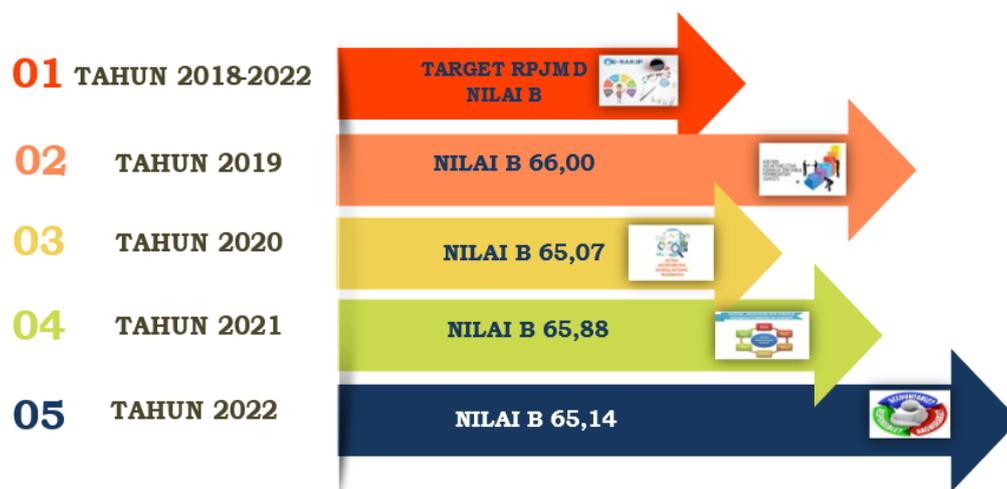
TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I ATAS REKOMENDASI KEMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2022

- a) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, Core Values ASN BerAkhlaq, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
- b) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) agar dapat menjamin efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun;
- c) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melaksanakan Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Peraturan Menpan No. 20 Tahun 2018;
- d) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan menetapkan peta proses bisnis pada PD yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal;
- e) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melaksanakan *assessment* terhadap seluruh pegawai dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi dan mengimplementasikan aturan tentang manajemen talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;
- f) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan membangun aplikasi pengukuran kinerja organisasi dan individu dan memastikan pemanfaatannya agar terwujud manajemen kinerja yang baik dan konsisten;
- g) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas serta meningkatkan peran Inspektorat untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
- h) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pemanfaatan aplikasi Cimahi *Smart City*;
- i) Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh PD dan memastikan tindak lanjut dari hasil SKM kepada seluruh layanan agar dapat dilakukan strategi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pengguna layana

SASARAN 6 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR : NILAI SAKIP

SASARAN 6 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH



1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Hasil evaluasi SAKIP menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2019 mendapatkan nilai **66,00** atau predikat “**B**”, pada Tahun 2020 mengalami penurunan nilai menjadi **65,07** atau predikat “**B**”, pada Tahun 2021 memperoleh nilai **65,88** atau predikat B dan mengalami kenaikan sebanyak 0,81 poin dan pada Tahun 2022 memperoleh nilai **65,14** Nilai Evaluasi SAKIP Kota Cimahi tahun 2022 mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan nilai SAKIP pada tahun 2021 meskipun masih berada pada predikat yang sama yaitu B dengan penurunan sebanyak 0,74 poin. Rincian Penilaian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
			2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	16,33
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,52
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,19
Nilai Hasil Evaluasi		100	65,14
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B



Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kota Cimahi menunjukkan bahwa nilai sebesar **65,14** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi PD.

Beberapa catatan hasil evaluasi Sakip yang akan kami tindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen Perjanjian Kinerja level Wali Kota sampai Kepala Dinas untuk memastikan sasaran yang *outcome*, indikator yang SMART dan target yang ditetapkan menantang untuk perbaikan kinerja tahun berjalan;
2. Menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi;
3. Membangun aplikasi pengukuran kinerja organisasi yang terintegrasi dengan individu, selanjutnya memastikan pemanfaatannya pada seluruh PD hingga level individu agar terwujud manajemen kinerja yang baik dan konsisten sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
4. Meningkatkan kualitas laporan monev reaksi dengan menetapkan strategi dalam mempercepat capaian kinerja;
5. Mendorong PD untuk dapat secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dan melakukan monev secara berkala dan hasilnya dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* di internal PD;
6. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan menyusun laporan kinerja triwulanan, sebagai bahan *monitoring* capaian kinerja dan memanfaatkan
7. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor di Inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi- rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP;
8. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi internal AKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP.

Rencana Tindak Lanjut Pemerintah Daerah Kota Cimahi atas Hasil Rekomendasi Kemenpan dan RB adalah sebagai berikut :

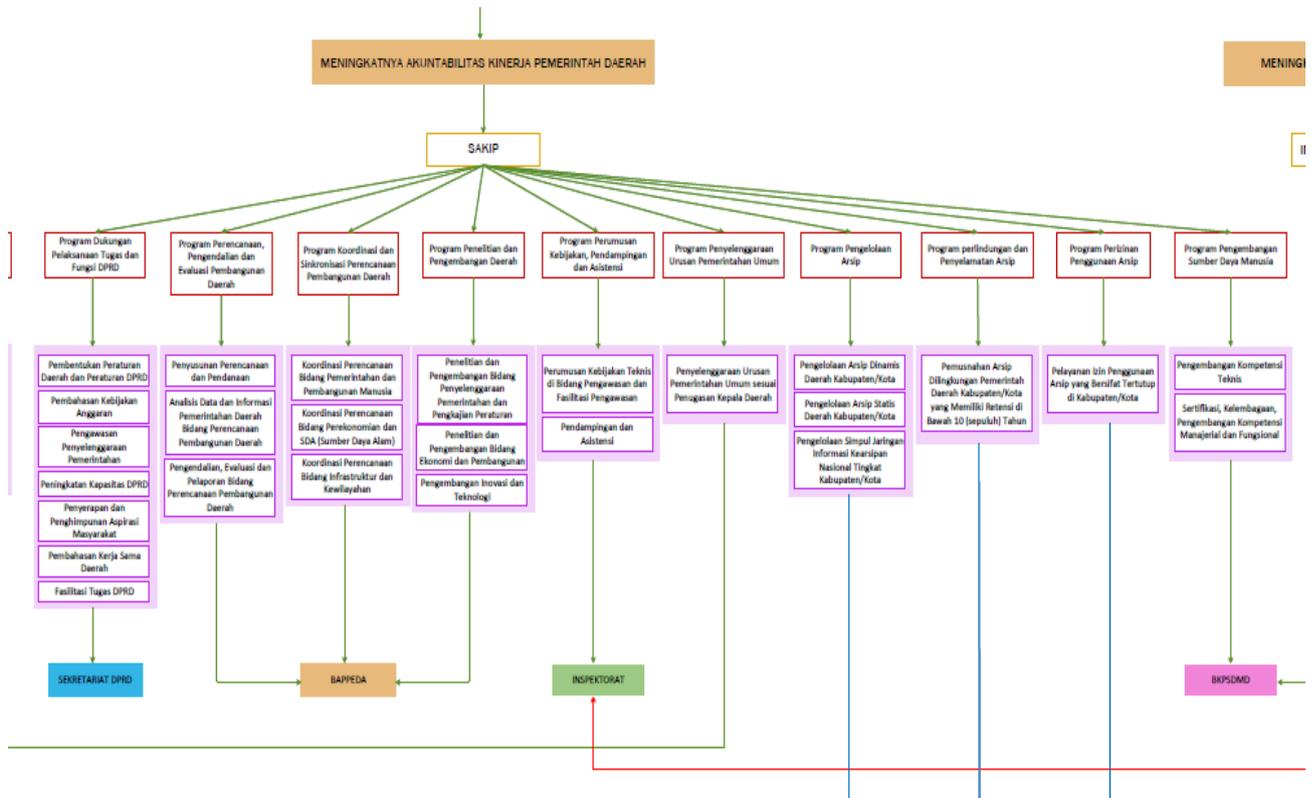
1. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan reviu terhadap dokumen Perjanjian Kinerja level Kepala Dinas untuk memastikan sasaran yang *outcome*, indikator yang SMART dan target yang ditetapkan menantang untuk perbaikan kinerja tahun berjalan;
2. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Wali Kota sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi;
3. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan membangun aplikasi pengukuran kinerja organisasi yang terintegrasi dengan individu, selanjutnya memastikan pemanfaatannya pada seluruh PD hingga level



individu agar terwujud manajemen kinerja yang baik dan konsisten sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*;

4. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan meningkatkan kualitas laporan monev renaksi dengan menetapkan strategi dalam mempercepat capaian kinerja;
5. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan membangun aplikasi pengukuran kinerja organisasi yang terintegrasi dengan individu, selanjutnya memastikan pemanfaatannya pada seluruh PD hingga level individu agar terwujud manajemen kinerja yang baik dan konsisten sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
6. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan monev secara berkala dan hasilnya dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* di internal PD;
7. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan meningkatkan kualitas Laporan Kinerja PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan menyusun laporan kinerja triwulanan, sebagai bahan *monitoring* capaian kinerja dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
8. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan mendorong PD untuk dapat secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dan melakukan monev secara berkala dan hasilnya dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* di internal PD;
9. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SOM yang mengelola SAKIP maupun auditor di Inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi- rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP;
10. Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan menyusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi internal AKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PERNYATAAN KINERJA (CROSS CUTTING PROGRAM/KEGIATAN)



SASARAN 7 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR : NILAI LPPD

SASARAN 7 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR : NILAI LPPD



1. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Tar get	Realisa si	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Nilai LPPD	Tinggi	Nilai tidak Keluar	-	Tin ggi	Nilai tidak Keluar	-	Tinggi	Nilai belum rilis	-

Pada penyusunan LPPD Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (4) bahwa penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Sesuai dengan amanat Kementerian Dalam Negeri untuk penyusunan LPPD Tahun 2020 sudah mulai menggunakan SI LPPD, tapi belum dilakukan evaluasi melalui SI LPPD tersebut, hal ini disebabkan masih adanya beberapa mekanisme teknis evaluasi yang belum terakomodir dalam SI LPPD jadi tidak menghasilkan skor kinerja dan pemeringkatan. Penilaian atas LPPD Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Provinsi Jawa Barat maupun Tim Pusat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dilakukan pada Tahun 2022, namun hasil penilaian Tingkat Pusat akan keluar pada Tahun 2023. Sedangkan untuk Penilaian atas LPPD Tahun 2022 dilakukan oleh Tim Provinsi Jawa Barat maupun Tim Pusat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun 2023.

5. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dengan Target RPJMD Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Indikator	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Nilai belum rilis	

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Lampiran Format Sistematika BAB IV Metode Penetapan Peringkat, Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, adanya perubahan pada klasifikasi Skor dan Status Kinerja. Hasil penilaian atas LPPD Kota Cimahi Tahun 2018 skor kinerja adalah 3,4699 status kinerja Sangat Tinggi. Namun nilai tersebut berubah menjadi status kinerja "Tinggi" dengan skor kinerja antara 3.41 – 4.20, sedangkan status kinerja "Sangat Tinggi" dengan skor kinerja antara 4.21 – 5.00. hal ini menyebabkan penyesuaian target Skor dan Status Kinerja untuk tahun 2020 menjadi "Tinggi".



6. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- a. adanya dukungan dari Pimpinan terhadap kegiatan tersebut
- b. adanya komitmen dari masing-masing kepala OPD beserta Tim Penyusun
- c. adanya tahapan pelaksanaan kegiatan yang jelas diantaranya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, FGD dan Asistensi terhadap data dukung.
- d. adanya reward pimpinan terhadap tim penyusun dari masing-masing OPD

SASARAN 8 : OPTIMALNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
INDIKATOR : OPINI BPK

SASARAN 8 : OPTIMALNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
INDIKATOR : OPINI BPK



1. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Targe	Realisa	Capaia	Targe	Realisa	Capaia	Targe	Realisa	Capaia
	t	si	n	t	si	n	t	si	n
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan Mandiri. Dalam menjalankan tugasnya BPK RI didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam ruang lingkup pemeriksaan, BPK RI memiliki kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaaan dengan Tujuan Tertentu.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah Kota Cimahi dalam perjalanannya semenjak tahun 2004 telah dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK RI berkaitan dengan pemeriksaan keuangan yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Tahun	Opini
1	Pemeriksaan Keuangan	2004-2012	WDP
2	Pemeriksaan Keuangan	2013-2022	WTP

Pada tahun 2004 sampai dengan 2012 Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) BPK RI yang dikarenakan penatausahaan Barang Milik Daerah di Kota Cimahi yang masih belum teradministrasi dengan baik yang dapat dilihat dari segi pengamanan aset berupa batas kepemilikan tanah atau sertifikat kepemilikan aset, pencatatan barang di setiap SKPD yang belum sesuai, pemilahan dan penanganan barang rusak berat dan pemanfaatan aset yang belum maksimal. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk memperbaiki penatausahaan barang milik daerah dengan meningkatkan koordinasi, menyusun regulasi yang kemudian disosialisasikan, melaksanakan sensus barang milik daerah, adanya monitoring dan evaluasi penatausahaan BMD yang berkala dan peningkatan kompetensi pengelola barang.

Dari segi pengelolaan keuangan penggunaan sistem informasi menjadi salah satu faktor penunjang perolehan capaian opini yang baik. Hal tersebut dikarenakan sistem dapat membantu para pengelola keuangan di Perangkat Daerah dalam melaksanakan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pemerintah Kota Cimahi sejak tahun 2011 menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dari Kemendagri sebagai sistem informasi yang membantu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Semenjak tahun 2021 Kemendagri merilis aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan yang baru.

Selain sistem informasi, pembinaan pengelola keuangan menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik dan berefek kepada capaian opini. Para aktor pengelola keuangan diberikan pelatihan terkait kebijakan-kebijakan teknis dan pemahaman pengelolaan keuangan.

Salah satu hal yang mendasar menjadi faktor capaian opini yang baik yaitu adanya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Penyusunan kebijakan dilihat dari amanat peraturan-peraturan atau undang-undang dari Pemerintah Pusat yang perlu diterjemahkan kedalam kebijakan teknis yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut membuahkan hasil berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI bagi Kota Cimahi dan dipertahankan 10 tahun berturut-turut hingga tahun 2022.

SASARAN 9 : MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR

INDIKATOR : INDEKS PROFESIONALITAS ASN



Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2022		
IP ASN	62	57,23	93%

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja IP ASN pada tahun 2021 yaitu sebesar 53,58, capaian IP ASN pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,65 walaupun capaian kinerja ini belum sepenuhnya bisa mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai Indeks 62 pada tahun 2022.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja									
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
IP ASN	77	46,65	60,58%	79	53,23	67,38%	58	53,58	92,38%	62	57,23	93%

3. Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target RPJMD yang Terdapat dalam Dokumen Renstra.

Indikator	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Indeks Profesionalitas ASN	62	62	57,23	93%

4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Target dan Realisasi IP ASN Tahun 2022

No	Dimensi	Target	Realisasi	Keterangan
1	Kualifikasi (25%)	14	13,10	
2	Kompetensi (40%)	18	15,77	
3	Kinerja (30%)	25	23,52	
4	Disiplin (5%)	5	4,98	
IP ASN		62	57,37	Sangat Rendah

- Ket : - Jumlah ASN yang diukur indeks profesionalisme : 3.653 orang
 - Data realisasi diambil DJASN.BKN per 1 Desember 2022

Penyebab belum tercapainya target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Kualifikasi : tidak tercapai target disebabkan ada sebagian ASN yang pensiun dengan kualifikasi pendidikan sarjana (S1) ke atas yang memiliki bobot penilaian tinggi sebesar kurang lebih 250 orang pertahun dan ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan DII/DI/SMA sebanyak 569 orang atau 15 % dari jumlah pegawai ada beberapa belum menyelesaikan pendidikan S1 nya dan sebagian lagi tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
2. Dimensi Kompetensi : Kompetensi ASN Cimahi sudah baik hanya saja Kompetensi yang diperoleh oleh ASN dari berbagai diklat yang telah diikuti baik diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional belum

seluruhnya terinput dalam sistem informasi kepegawaian, dan juga disebabkan oleh ada kebijakan penyederhanaan birokrasi dimana Pejabat Administrator dan Pengawas yang beralih menjadi Pejabat Fungsional sebanyak 110 orang dan belum mengikuti Diklat Fungsional sehingga nilai bobot kompetensinya 0 (nol), serta masih banyak pegawai yang belum mengikuti diklat teknis 20 jp dan seminar/workshop, sebagai berikut :

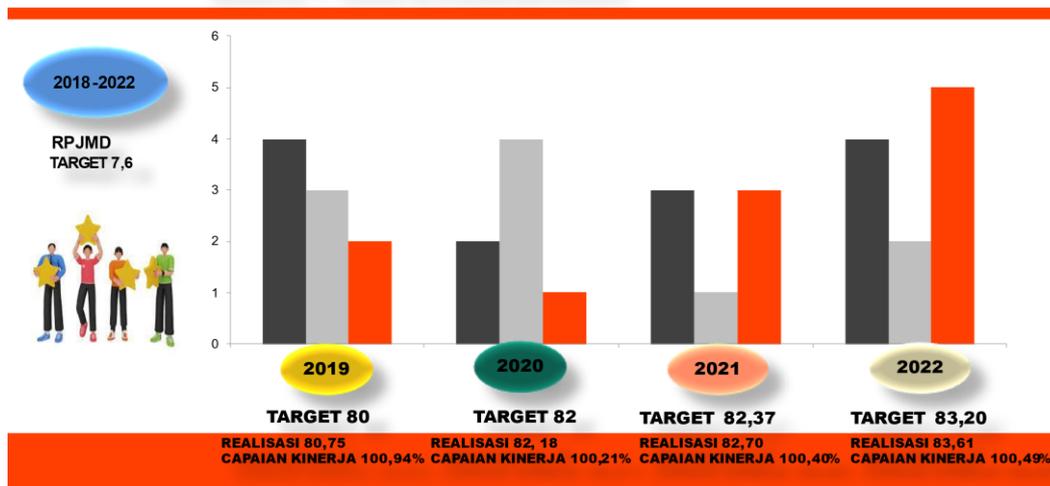
- Pejabat struktural yang belum mengikuti diklatpim sebanyak 136 orang (37,98%);
 - Pejabat fungsional hasil penyederhanaan birokrasi yang belum mengikuti fungsional sebanyak 110 orang (100 %).
 - pegawai yang belum mengikuti diklat teknis sebanyak 3.393 orang (88,77%) ;
 - pegawai yang belum mengikuti seminar/workshop sebanyak 1.348 orang (35,26%);
3. Dimensi Kinerja : bobot diukur dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan, sebagian pegawai ada yang belum mengirimkan laporan SKP nya kurang lebih 1000 orang sehingga tidak terinput di sistem informasi kepegawaian yang menyebabkan nilai bobot dimensi kinerja tidak maksimal.
4. Dimensi Disiplin : tidak mencapai target karena ada pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin (berat, sedang dan ringan) sebanyak 4 orang dari jumlah total pegawai 3.653 orang.
- Adapun solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :
1. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai melalui kegiatan Pemberian Tugas belajar dan Ijin belajar;
 2. Upaya pengembangan kompetensi pegawai melalui kerjasama dengan BKN, BKD Provinsi, Perguruan Tinggi, kementerian/lembaga dalam rangka peningkatan pengembangan Kompetensi Pegawai bagi para PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan meningkatkan keikutsertaan webinar/seminar/workshop bersertifikat;
 3. Optimalisasi pembiayaan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dimana sesuai peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah harus menganggarkan 0,16% dari total APBD untuk pengembangan kompetensi pegawai;
 4. Melaksanakan rakor dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaporan/update data kepegawaian beserta berkas-berkas kepegawaian lainnya;
 5. Mengontrol dan mengoptimalkan pelaporan penyajian data dukung IP ASN individu, pada masing-masing Perangkat Daerah, melalui aplikasi SIMAKCI;
 6. Merelease capaian IP ASN individu dan IP ASN Perangkat Daerah pada aplikasi SIKONCI di perangkat masing-masing pegawai;
 7. Mendorong peningkatan IP ASN dengan menjadikan IP ASN sebagai salah satu Indikator sasaran di masing- masing Perangkat Daerah.

SASARAN 10 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR 1 : SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

SASARAN 10 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR 1 : SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2022		
Survey Kepuasan Masyarakat	83,20	83,61	100,49%

Sumber data: Bag. Organisasi Setda Kota Cimahi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja									
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		

Survey Kepuasan Masyarakat	80	80,75	100,94%	82	82,18	100,21%	82,37	82,70	100,40%	83,20	83,61	92,53%
----------------------------	----	-------	---------	----	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	--------

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Sumber data: Bag. Organisasi Setda Kota Cimahi

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk kegiatan evaluasi terhadap keberhasilan atau kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan bagi pelayanan publik dimasa yang akan datang. Berdasarkan Gambaran dan analisis hasil capaian Survei Kepuasan Masyarakat yang di lakukan oleh beberapa Dinas / Badan, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan beberapa UPTD yang di sajikan dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas persepsi masyarakat terhadap unit pelayanan publik di Kota Cimahi cukup baik. Namun demikian pada setiap unit pelayanan publik masih mempunyai beberapa kekurangan - kekurangan yang harus mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan - perbaikan agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Cimahi semakin baik.

Berikut rekapitulasi hasil survey kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Publik di Kota Cimahi Tahun 2022, Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2022 83,61 dari jumlah 63 UPP. Total jumlah UPP di Kota Cimahi yaitu 79 unit, dan yang telah melaksanakan SKM yaitu 63 UPP.

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN PUBLIK KOTA CIMAH I TAHUN 2022

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Kota Cimahi Tahun 2022

No	UPP	HASIL PENGUKURAN IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1.	SEKRETARIS DPRD KOTA CIMAHI	77,19	B	Baik
2.	INSPEKTORAT KOTA CIMAHI	86,64	B	Baik
3.	DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI	83,7	B	Baik
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI	79,06	B	Baik
5.	DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI	89,361	A	Sangat Baik
6.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI	84,465	B	Baik
7.	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA CIMAHI	83,576	B	Baik
8.	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI	80,50	B	Baik
9.	DINAS PANGAN & PERTANIAN KOTA CIMAHI	80,30	B	Baik
10.	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI	80,56	B	Baik
11.	DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI	87,46	B	Baik
12.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN & OLAHRAGA KOTA CIMAHI	93,37	A	Sangat Baik
13.	DPMTSP	83,28	B	Baik
14.	BPKAD	80,03	B	Baik
15.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI	86,85	B	Baik
16.	BKPSDMD	80,06	B	Baik
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN & PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI	81,31	B	Baik
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	85,09	B	Baik
19.	BADAN KESATUAN BANGSA	88,36	A	Sangat Baik
20.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI	99,27	A	Sangat Baik
21.	BAGIAN HUKUM SETDA	80,642	B	Baik
22.	BAGIAN KESRA SETDA	80,4	B	Baik
23.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA	87,38	B	Baik
24.	BAGIAN UMUM SETDA	88,12	B	Baik
25.	BAGIAN ORGANISASI SETDA	88,12	B	Baik
26.	KECAMATAN CIMAHI UTARA	90,88	A	Sangat Baik
27.	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	88,76	A	Sangat Baik
28.	UPTD PUSKESMAS CIBEBER	84,05	B	Baik
29.	UPTD PUSKESMAS CIMAHI UTARA	82,80	B	Baik
30.	UPTD PUSKESMAS PASIRKALIKI	81,02	B	Baik
31.	UPTD PUSKESMAS CIPAGERAN	80,23	B	Baik
32.	UPTD PUSKESMAS CIGUGUR TENGAH	81,40	B	Baik
33.	UPTD PUSKESMAS CIMAHI SELATAN	81,7	B	Baik

34.	UPTD PUSKESMAS CIBEUREUM	80,14	B	Baik
35.	UPTD PUSKESMAS CIMAH TENGGAH	81,57	B	Baik
36.	UPTD PUSKESMAS PADASUKA	82,44	B	Baik
37.	UPTD PUSKESMAS CITEUREUP	81,9	B	Baik
38.	UPTD PUSKESMAS MELONG ASIH	80,45	B	Baik
39.	UPTD PUSKESMAS MELONG TENGAH	80,38	B	Baik
40.	UPTD PUSKESMAS LEUWIGAJAH	80,07	B	Baik
41.	UPTD RUSUNAWA	70,95	B	Baik
42.	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	90,80	A	Sangat Baik
43.	UPTD AIR MINUM	80,30	B	Baik
44.	UPTD PASAR KOTA	82,020	B	Baik
45.	UPTD METROLOGI LEGAL	86,81	B	Baik
46.	UPTD CIMAH TECHNOPARK	85,25	B	Baik
47.	UPTD BALAI BENIH IKAN TAWAR	84,42	B	Baik
48.	UPTD PUSKESWAN	85,10	B	Baik
49.	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	79,52	B	Baik
50.	KELURAHAN PASIRKAI IKI	86,07	B	Baik
51.	KELURAHAN CIPAGERAN	81,7	B	Baik
52.	KELURAHAN PADASUKA	80,50	B	Baik
53.	KELURAHAN KARANGMEKAR	81,98	B	Baik
54.	KELURAHAN SETIAMANAH	81,85	B	Baik
55.	KELURAHAN LEUWIGAJAH	84,80	B	Baik
56.	KELURAHAN CITEUREUP	83,63	B	Baik
57.	KELURAHAN BAROS	80,56	B	Baik
58.	KELURAHAN CIMAH	80,19	B	Baik
59.	KELURAHAN CIGUGUR TENGAH	85,44	B	Baik
60.	KELURAHAN CIBEUREUM	89,44	A	Sangat Baik
61.	KELURAHAN CIBEBER	87,35	B	Baik
62.	KELURAHAN UTAMA	87,33	B	Baik
63.	KELURAHAN MELONG	79,00	B	Baik
	NILAI IKM	83,61	B	BAIK

Sumber data: Laporan SKM Kota Cimahi Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai Unit Pelayanan Publik berada pada level 76,6 - 88,30 dengan mutu pelayanan Baik. IKM terendah (77,19) adalah Sekretaris DPRD, sedangkan IKM tertinggi (99,27) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dengan mutu pelayanan Sangat Baik.

Unit Pelayanan Publik di Kota Cimahi belum seluruhnya menyamakan unsur pelayanan sebagai indikator survei sesuai dengan Peraturan Kementerian PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 dan sebagian Unit Pelayanan Publik belum menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Tahun 2022.

Berdasarkan gambaran dan analisis hasil capaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh beberapa Dinas/Badan, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan beberapa UPTD dapat disimpulkan bahwa mayoritas persepsi masyarakat terhadap unit pelayanan publik di kota Cimahi cukup baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang harus mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan-perbaikan agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Cimahi semakin baik.

INDIKATOR 2 : INDEKS SPBE



1. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE Kota Cimahi Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	capaian kinerja
	Tahun 2022		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19	3,09	97%

Tahun 2022 Pemerintah Kota Cimahi berupaya untuk meningkatkan Indeks SPBE dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menyusun Arsitektur SPBE, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Daerah. Keberhasilan penerapan SPBE Daerah dalam penyelenggaraan alur hidup pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE dalam institusi. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara Proses bisnis, Data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh Manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Strategi ini telah berhasil meningkatkan Indeks SPBE Tahun 2022 menjadi 3,09. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2020			2021			2022		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.30	3.25	100%	3,18	2,75	86,47%	3.19	3,09	97%

Pada tahun 2020 capaian Indeks SPBE Kota Cimahi mencapai target yang telah ditetapkan dari target Indeks SPBE 3.30, capaian indeks SPBE pada tahun 2020 berdasarkan hasil penilaian mandiri indeks SPBE yang adalah sebesar 3.25 sehingga capaian kinerja Tahun 2020 mencapai 100%. Pada tahun 2021 capaian Indeks SPBE adalah 2,75 dengan predikat baik, dengan target 3,18. Jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 0,5 poin. Penyebab penurunan capaian kinerja indeks SPBE pada tahun 2021 adalah:

1. Bertambahnya Indikator Tingkat Kematangan dari 35 Indikator menjadi 47 Indikator yang termasuk Domain Manajemen SPBE.
2. *Assesment* dilaksanakan secara virtual, melalui aplikasi monev.menpan.go.id ada kemungkinan mempunyai keterbatasan dalam visualisasi dokumen pendukung dan miskomunikasi antara Assesor dengan tim Koordinasi SPBE Kota Cimahi.
3. Pemkot Cimahi belum mempunyai Peraturan terkait Kebijakan SPBE baik berupa Perwal/Perda, sehingga dari sisi kebijakan internal Tata Kelola SPBE nilainya rendah.
4. Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE bernilai cukup, hal ini disebabkan belum adanya arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
5. Dari sisi Domain Layanan SPBE tingkat kematangannya mencapai 3,32 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator tingkat kematangan Domain Layanan SPBE sudah berkategori **Baik**, dan perlu perbaikan dari beberapa indikator antara lain Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai, Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka dan Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

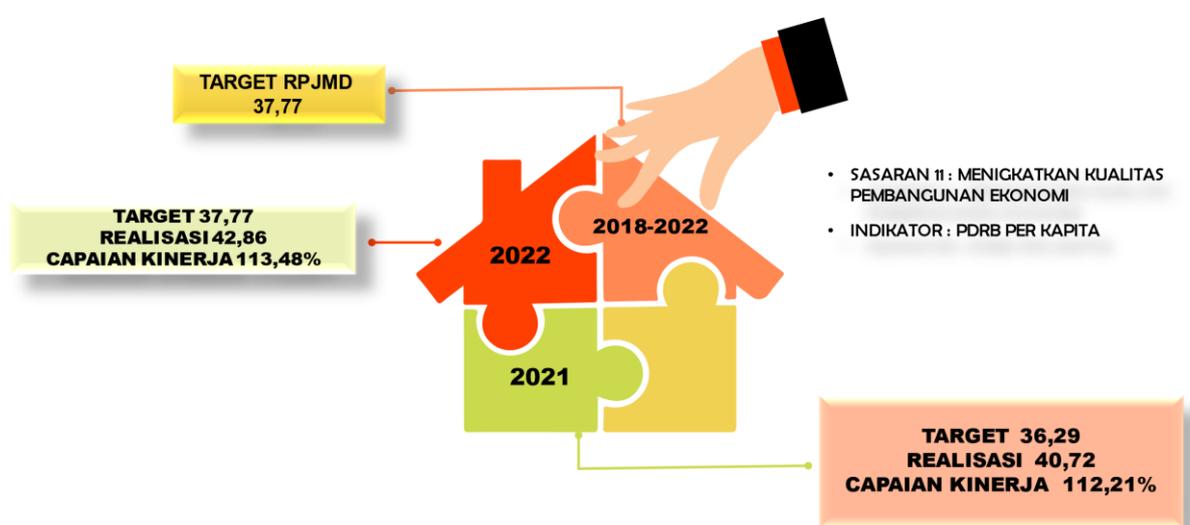
Pada tahun 2022, capaian indeks SPBE mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE tahun 2021, yaitu sebesar 0,34 atau sebesar 10,39%. Hal ini karena berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks SPBE yaitu:

1. Memperkuat fungsi dan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Cimahi
2. Memperkuat komitmen semua Perangkat Daerah terkait implementasi SPBE di masing-masing perangkat daerah terutama berkaitan dengan Peraturan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE
3. Telah tersusunnya Arsitektur SPBE

**MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS EKONOMI
KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR
JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN**

**SASARAN 11 : MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI
INDIKATOR : PDRB PER KAPITA**

**MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA
PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN**



Indikator PDRB Kota Cimahi merupakan IKU Baru di level Kota, yang merupakan IKU Kota yang masuk pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2022. Mulai meningkatnya produktivitas perekonomian daerah pada tahun 2022 juga ditunjukkan dengan meningkatnya **PDRB perkapita** (ADHK) mencapai 42,86 juta rupiah. Melebihi target sebesar 36,29 juta rupiah dengan capaian kinerja sebesar 113,48 %. Target PDRB per Kapita Kota Cimahi Tahun 2021 adalah 36,29 dengan realisasi 40,72 dan Capaian PDRB Kota Cimahi Tahun 2021 112,21%. Sedangkan target PDRB Kota Cimahi Tahun 2022 yaitu 37,77 dengan realisasi 42,86, dengan capaian kinerja 113,48%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, capaian PDRB tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,14 poin.

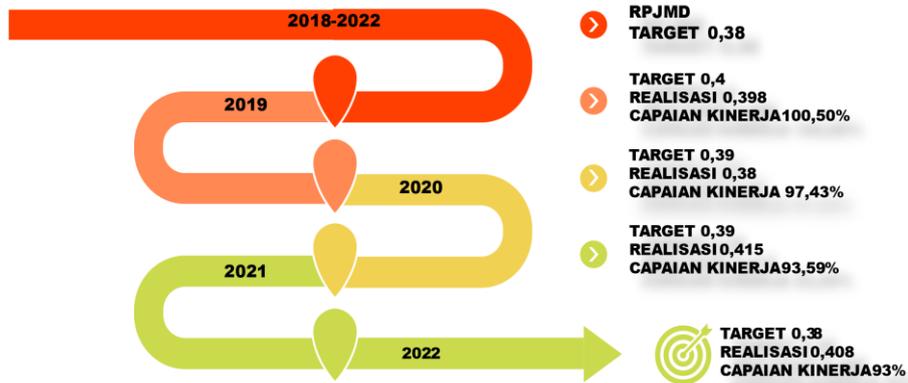
Namun perlu diingat bahwa PDRB per kapita bukanlah angka pasti mengenai pendapatan rata-rata seluruh penduduk di suatu wilayah, karena tidak semua penduduk memiliki penghasilan yang sama. **PDRB per kapita** hanya memberikan gambaran umum mengenai tingkat pendapatan rata-rata di wilayah tersebut.

SASARAN 13 MENINGKATKAN PEMERATAAN PENDAPATAN

INDEKS GINI

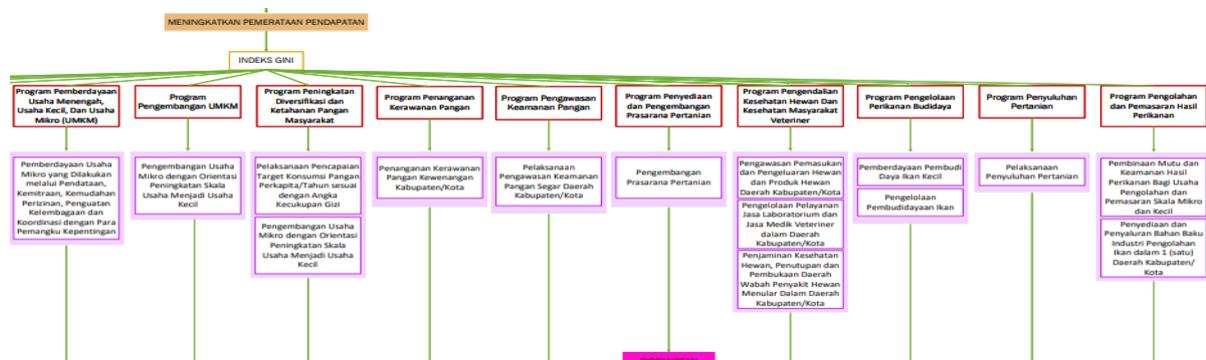
SASARAN 13 MENINGKATKAN PEMERATAAN PENDAPATAN

INDEKS GINI



Indeks Gini merupakan salah satu indeks untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu negara atau wilayah. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Indeks gini Kota Cimahi pada tahun 2022 dari target 0,380 adalah sebesar 0,408 sehingga dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93%. Meskipun belum memenuhi target namun angka ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya 0,415. Tingkat capaian Indeks Gini Kota Cimahi masih berada pada kategori moderat. Perbaikan distribusi pendapatan masih harus terus dilakukan sehingga kesejahteraan penduduk di Cimahi semakin merata.



Crosscutting IKU Indeks Gini (sumber data: Bappeltibangda Kota Cimahi)

SASARAN 14 : MENURUNNYA KEMISKINAN

INDIKATOR 1 : ANGKA KEMISKINAN



1. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

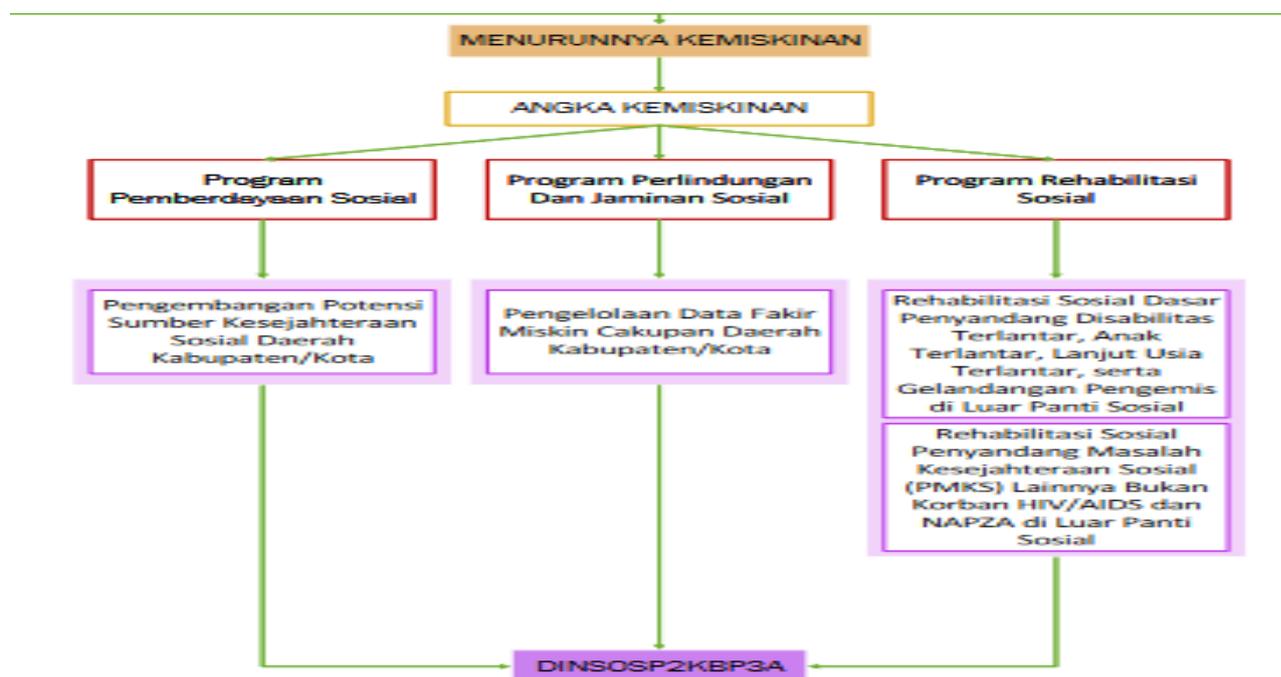
Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Angka Kemiskinan	5,5	5,11	97,72%	5,07	5,35	94,48%	5,02	5,11	98%

Tingkat kemiskinan adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan suatu daerah. Garis kemiskinan adalah garis batas pendapatan di bawah yang individu atau rumah tangga dianggap tidak memiliki akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, perumahan, dan layanan kesehatan. Semakin rendah tingkat kemiskinan semakin sedikit masyarakat miskin di suatu wilayah. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kota Cimahi mengalami kenaikan menjadi 5,11% dan 5,35% pada tahun 2021. Penurunan aktivitas perekonomian akibat covid mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan sehingga mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya mendorong kenaikan tingkat kemiskinan.

Pandemi Covid19 berdampak terhadap kenaikan jumlah kemiskinan di Kota Cimahi, yang ditandai dengan bertambahnya pengangguran dan penerima bantuan sosial dan bantuan stimulus ekonomi lainnya yang berasal dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun yang berasal dari APBD Kota Cimahi di tahun 2020. Namun persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2016 sampai dengan 2020 masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi dan nasional, karena nilainya selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Cimahi sebesar 5,11 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya sebesar 7,88 persen dan nasional 9,78 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kota Cimahi sebesar 5,35 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya sebesar 8,4 persen dan nasional 9,71 persen.

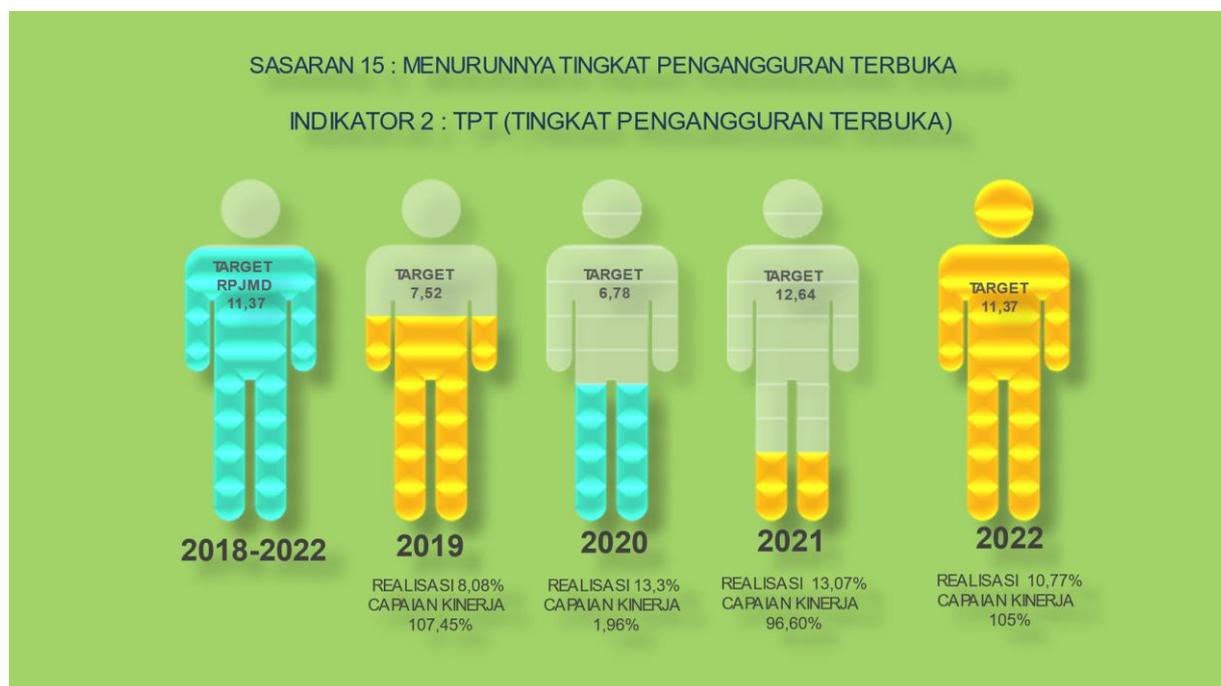
Setelah naik cukup signifikan pada tahun pada tahun 2021 menjadi 5,35% akibat Pandemi covid 19, pada tahun 2022 persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi 5,11 % , meskipun tidak mencapai target yang diharapkan yakni 5,02 % sehingga capaian kinerja pada tingkat kemiskinan adalah 98%. Meskipun demikian menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2022 mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas perekonomian daerah Pasca Covid 19 serta berhasilnya program jejaring pengaman sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga masyarakat sehingga angka kemiskinan menurun.

Crosscutting IKU Angka Kemiskinan

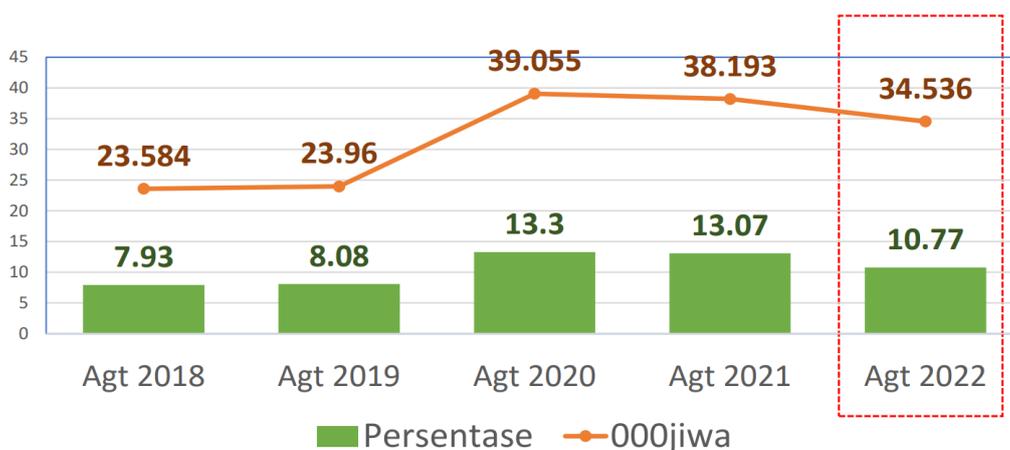


SASARAN 15 : MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

INDIKATOR 2 : TPT (TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA)



Jumlah dan Tingkat Pengangguran, Kota Cimahi, 2018 – 2022

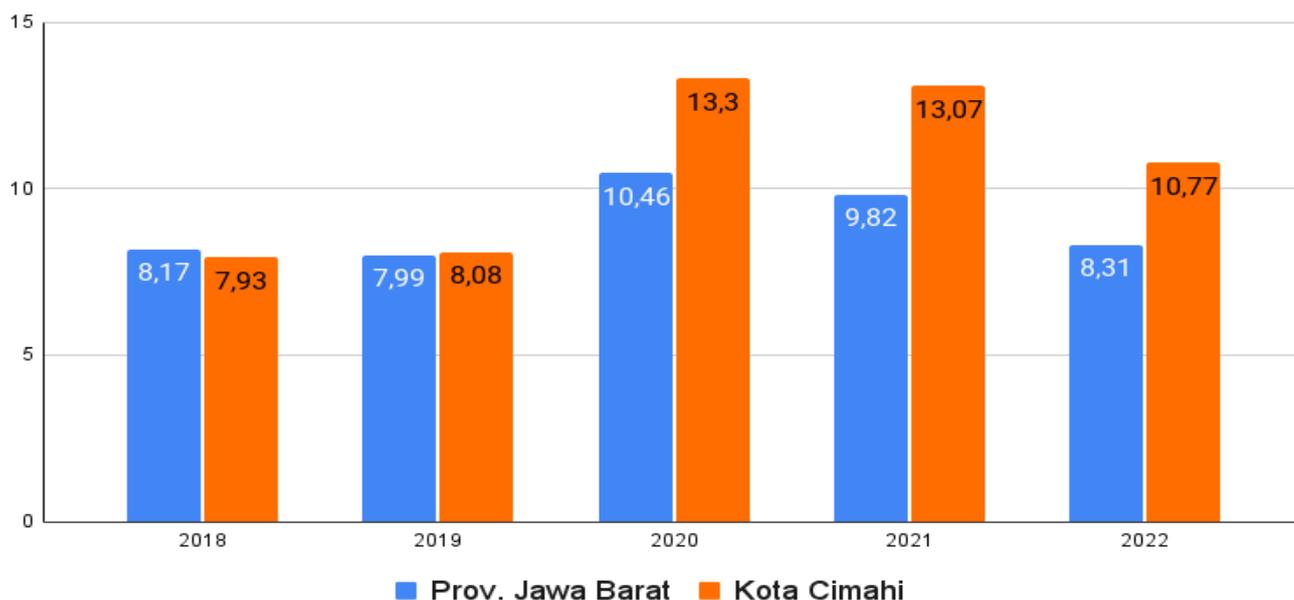


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi meningkat cukup signifikan menjadi 13,30 persen. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 13,07 persen. Turunnya produktivitas perekonomian akibat pandemi covid di tahun 2020 menyebabkan banyaknya lapangan usaha yang berhenti beroperasi sehingga menambah jumlah angka pengangguran di Kota Cimahi. Namun dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian Kota Cimahi yang didukung pula oleh bergulirnya program-program pemulihan ekonomi di Pusat, Provinsi dan di Kota Cimahi. Hampir seluruh lapangan usaha di kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2022 yang menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi di sektor tersebut. Seiring dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja, dengan demikian akan mengakibatkan

penurunan tingkat pengangguran. Setelah pada mengalami sedikit penurunan TPT pada tahun 2021, TPT di Kota Cimahi kembali menurun secara signifikan pada tahun 2022. Penurunan TPT sebesar -2,3 poin ini merupakan penurunan tertinggi di Jawa Barat.

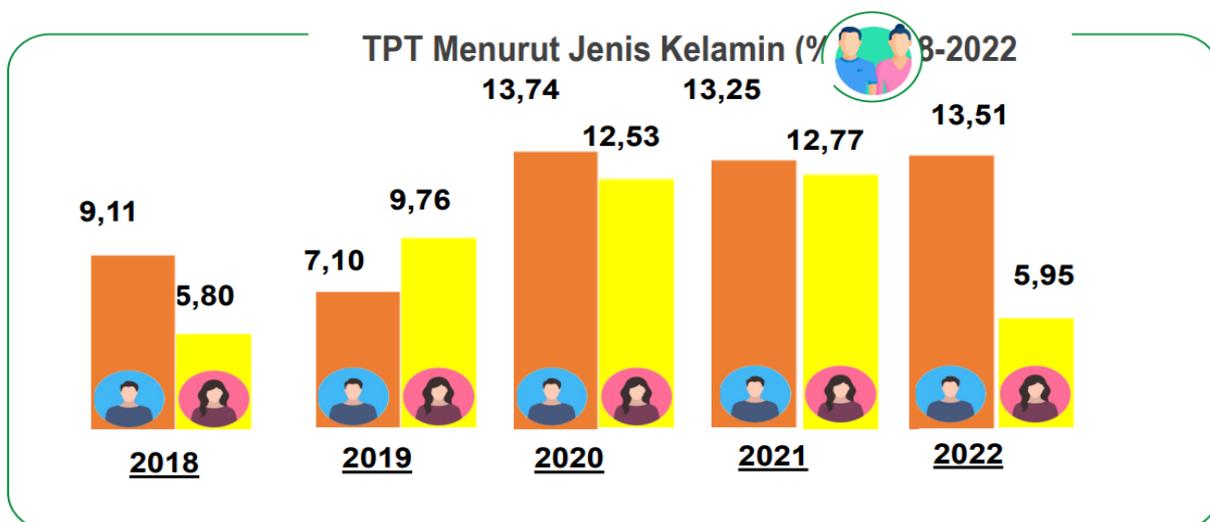
TPT Kota Cimahi Agustus 2022 sebesar 10,77 persen (34,5 ribu jiwa), artinya dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi, 10- 11 orang diantaranya termasuk pengangguran. TPT Kota Cimahi mengalami kenaikan cukup tajam pada saat pandemi di Tahun 2020, kemudian cenderung terus menurun sampai dengan Tahun 2022 sehingga kondisinya semakin mendekati sebelum pandemi.

TPT Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat

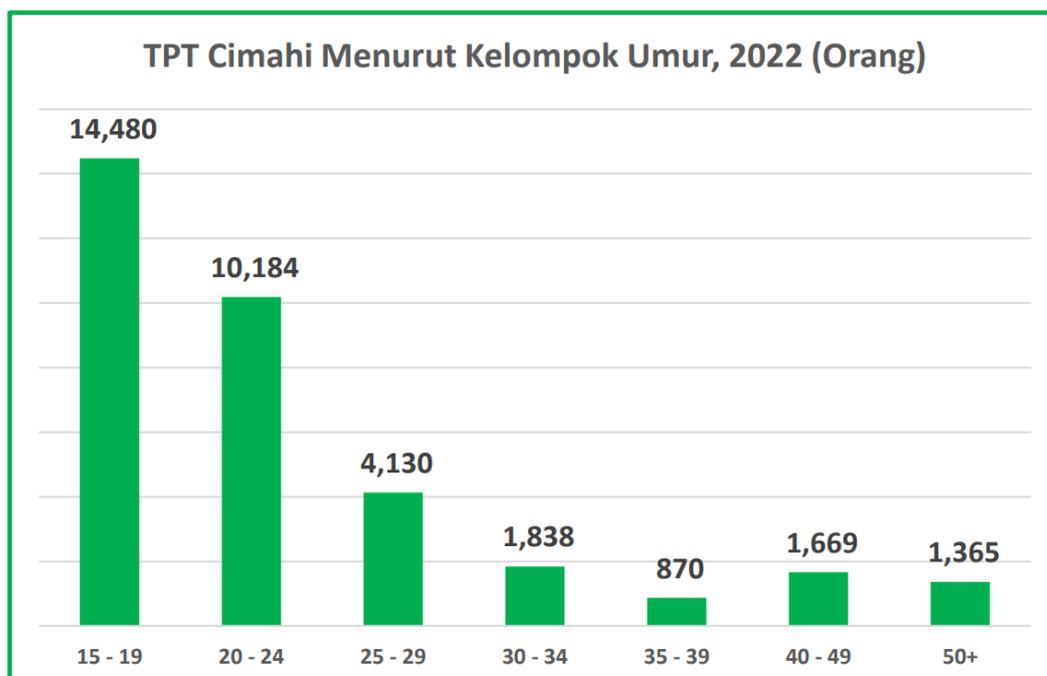


Dibandingkan dengan TPT di Provinsi Jawa Barat, TPT Kota Cimahi dalam 4 tahun terakhir selalu lebih tinggi dibanding dengan TPT di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena adanya ketergantungan pada sektor formal di Kota Cimahi, sehingga ketika terjadinya pandemic Covid 19 yang mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan banyaknya lapangan usaha yang berhenti beroperasi sehingga menambah jumlah angka pengangguran di Kota Cimahi.

TPT Kota Cimahi Menurut Jenis Kelamin (%), 2018-2022

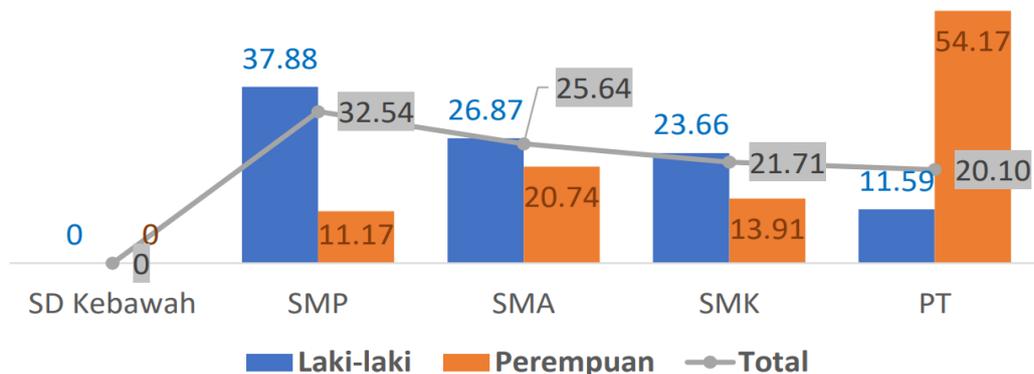


Dilihat dari jenis kelamin, sejak tahun 2020, TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari sisi jumlah, penganggur laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi penganggur laki-laki mencapai 13,51 persen pada 2022 sementara perempuan 5,95 persen. Penganggur laki-laki secara proporsi mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2021 yang sebesar 13,25 persen sedangkan perempuan menurun secara signifikan dari semula 12,77 persen. Penganggur laki-laki secara proporsi lebih besar dibandingkan perempuan adalah wajar karena jumlah laki-laki yang aktif secara ekonomi di pasar kerja juga lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menyebabkan mereka lebih aktif di pasar kerja.

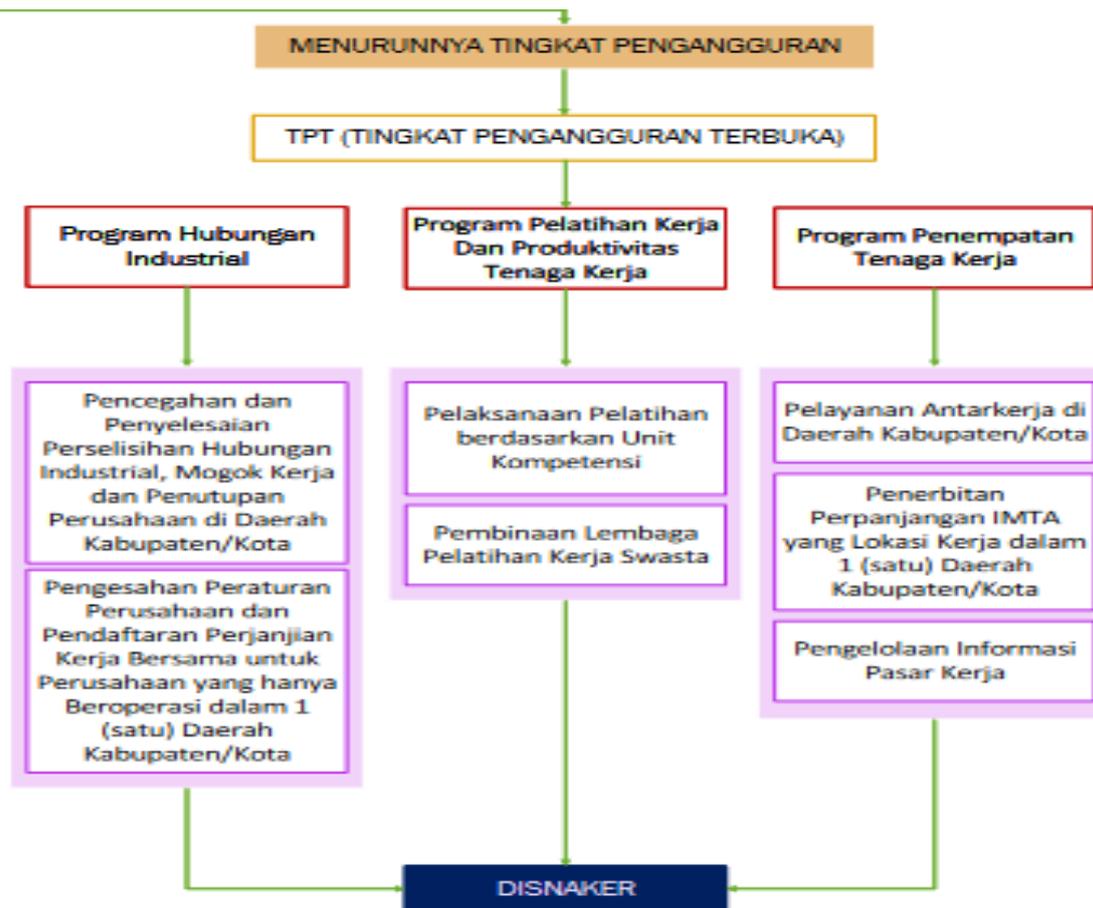


Pengangguran terbuka di Kota Cimahi didominasi oleh penduduk usia 15-19 tahun sebesar 14.480 orang atau sekitar 41,93 persen penduduk. Lalu diikuti oleh penduduk usai 20-24 tahun. TPT terkecil terjadi pada usai 35-39 tahun. Yang menarik adalah, terdapat sekitar 1.365 orang berusia 50 tahun ke atas atau bisa disebut memasuki usia tua yang termasuk pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut masih ada keinginan yang kuat untuk bekerja.

TPT Menurut Jenis Pendidikan (%), Agustus 2022



Ditinjau dari tingkat pendidikan, pengangguran dengan pendidikan Maksimum SD merupakan yang terendah, pada periode 2018-2022 sama sekali tidak terdapat pengangguran dengan pendidikan Maksimum SD. Sedangkan pengangguran dengan pendidikan Maksimum SMP merupakan yang tertinggi di Kota Cimahi. Permasalahan tingginya angka TPT pada lulusan sekolah kejuruan tampaknya terjadi juga di Kota Cimahi. Pada 2021 bahkan TPT nya mencapai 20,85 persen dan kembali meningkat menjadi 21,71 persen pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan besarnya *miss and match* angkatan kerja dengan pendidikan SMK. Hal ini menunjukkan Perlunya perbaikan kurikulum serta sarana prasarana workshop di sekolah kejuruan diperlukan agar lulusannya mudah memiliki pekerjaan baik bekerja di perusahaan ataupun berwirausaha sesuai dengan kejuruan.



Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2022		
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	11,37%	10,77%	105%

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentasi angka pengangguran di Kota Cimahi tahun 2019 hanya 8,09 persen. Namun angkanya naik tahun 2020 menjadi 13,30 persen. Pada tahun 2021, angka pengangguran di kota Cimahi berhasil diturunkan menjadi 13,07 atau turun sebanyak 0,23% jika dibandingkan dengan capaian angka pengangguran pada tahun 2020 yang mana pada tahun 2020 tingkat angka pengangguran di kota Cimahi mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan pandemi Covid-19. Release BPS Tahun 2022 dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional), tahun 2022 Kota Cimahi berhasil menurunkan angka pengangguran sebesar 2,3 persen di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 1,51 persen.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	6,78%	13,3%	1,96%	12,64%	13,07%	96,60%	11,37%	10,77%	105%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk aspek ketenagakerjaan. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 memiliki kecenderungan penurunan, namun pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan.

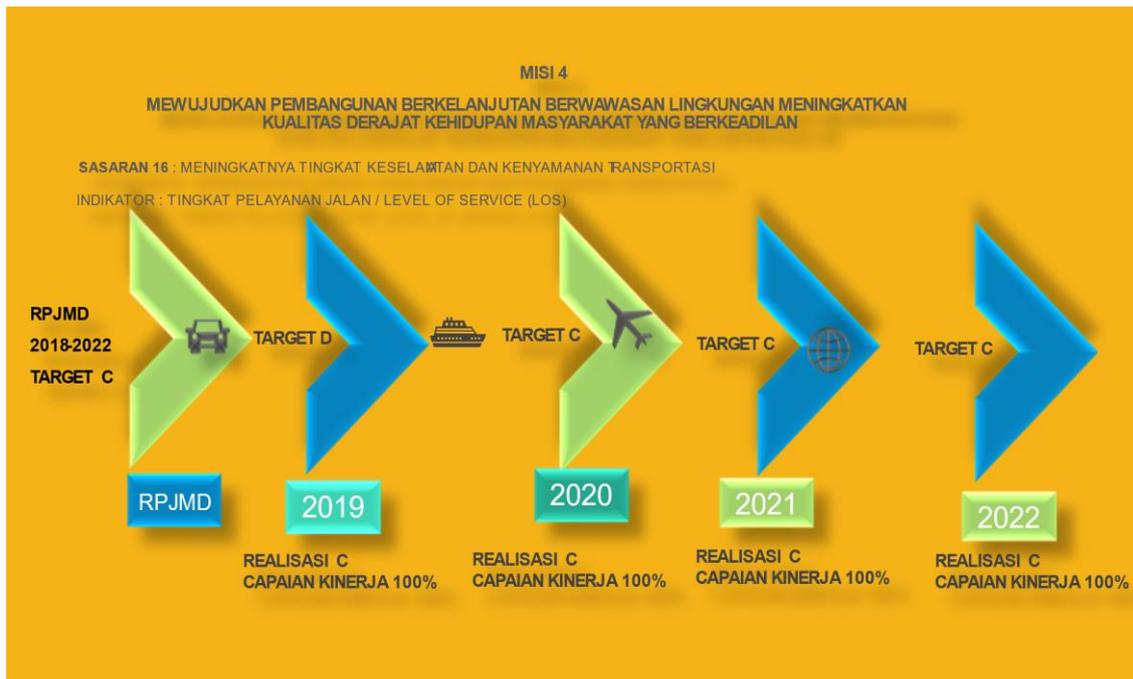
Pada tahun 2020, jumlah pengangguran di kota Cimahi mengalami kenaikan drastis akibat pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan sektor industri di kota Cimahi yang didominasi garmen dan tekstil mengalami penurunan aktivitas produksi yang berimbas pada banyaknya perusahaan yang memangkas karyawannya. Namun pada tahun 2021 sebagian perusahaan sudah mulai beraktivitas lagi setelah sebelumnya berhenti beroperasi sementara sehingga para pekerja yang dirumahkan sudah mulai dipekerjakan kembali. Sehingga pada tahun 2021, jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dengan capaian kinerja mencapai 96,60%. Pada tahun 2022 angka pengangguran di kota Cimahi mengalami penurunan sebesar 2,3% jika dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka pada tahun 2021.

MISI 4

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENINGKATKAN KUALITAS DERAJAT KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN

SASARAN 16 : MENINGKATNYA TINGKAT KESELAMATAN DAN KENYAMANAN TRANSPORTASI

INDIKATOR : TINGKAT PELAYANAN JALAN / LEVEL OF SERVICE (LOS)



1. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pelayanan Jalan/ Level Of Service (LOS) Kota Cimahi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)	C	C	100%

Berdasarkan rata-rata hasil *Traffic Counting* di beberapa ruas jalan di Kota Cimahi didapatkan hasil type Pelayanan **C** dengan LOS = **0,46** (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan).

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pengukuran Kinerja didasarkan pada tingkat pelayanan yang dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Tipe pelayanan pencapaian kinerja, dihitung dengan rumus bahwa semakin kecil volume lalu lintas per kapasitas jalan maka realisasi menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan semakin baik. Perhitungan traffic counting 15 ruas jalan berada pada Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Dalam menghitung pengukuran kinerja adalah :

$$\text{Rata-rata LOS 15 Ruas Jalan} = \frac{(\text{Jumlah LOS 15 Ruas})}{15} = \frac{6.9}{15} = 0,46$$

Berdasarkan hasil survey 16jam/hari

Pada weekend dan weekday

Data Pendukung

TINGKAT PELAYANAN

Batasan-batasan nilai dari setiap tingkat pelayanan dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Dengan tingkat pelayanan yang diperoleh, maka dapat ditentukan jalan tersebut masuk dalam tingkat pelayanan tertentu.

Adapun tingkat pelayanan (LOS) dilakukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$LOS = V/C$$

LOS = Tingkat pelayanan jalan

V = Volume lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

KARAKTERISTIK TINGKAT PELAYANAN

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	>50	0.00 - 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk pengemudi memilih kecepatan	40-50	0.21 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	32-40	0.45 – 0.74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat ditolerir	27-32	0.75 – 0.84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas. Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti	24-27	0.85 – 1.00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah	<24	>1.00

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C)
	kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar		

**TINGKAT PELAYANAN JALAN/LEVEL OF SERVICE (LOS)
15 RUAS JALAN DI KOTA CIMAHI**

No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas (Smp/jam)	Kecepatan (Km/jam)	Volume (Smp/jam)	Kepadatan	V/C (Smp/jam)	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jl. Daeng M Ardiwinata	2/2 UD	1.953	32,44	1047,61	37,88	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
2.	Jl. Jl. Rd. Demang Hardjakusumah	2/2 UD	2.245	33,92	1218,92	50,94	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
3.	Jl. Jati serut	2/2 UD	2.445	32,02	1304,59	57,16	0,53	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas (Smp/jam)	Kecepatan (Km/jam)	Volume (Smp/jam)	Kepadatan	V/C (Smp/jam)	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.	Jl. Gandawijaya	4/2 UD	1.337	27,68	721,95	42,03	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
5.	Jl. Lurah	4/2 UD	1.170	26,90	547,76	34	0,47	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
6.	Jl. Sisingamangaraja	2/2 UD	2.045	37,75	600,76	24,47	0,29	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
7.	Jl. Kebon Kopi	2/2 UD	1.285	31,97	868,77	38,10	0,68	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU
8.	Jl. Ranca bentang	2/2 UD	1.020	30,65	370,39	21,03	0,36	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari KAMIS
9.	Jl. Kerkof	2/2 UD	2.220	32,40	1127,27	51,03	0,51	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu

									dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
10.	JL. Sadarmanah	2/2 UD	1.285	33,95	653,93	29,20	0,51	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU
11.	Jl. Cibogo	2/2 UD	1.020	30,30	292,26	16,21	0,29	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU
No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas (Smp/jam)	Kecepatan (Km/jam)	Volume (Smp/jam)	Kepadatan	V/C (Smp/jam)	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Jl. Sudirman	4/2 UD	1.305	36,29	981	36,24	0,75	D	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari KAMIS
13.	Jl. Warung contong	2/2 UD	1.355	34,24	487,39	27,56	0,36	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
14.	Jl. Usman Dhomiri	2/2 UD	1.243	36,75	322,68	15,61	0,26	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu

									dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
15.	Jl. Cipageran	2/2 UD	2.045	35,03	560,51	24,78	0,27	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
JUMLAH							6,9		

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021		Capaian V/C Rasio Th.2021	Tahun 2022		Capaian V/C Rasio Th.2022
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)	C	C	0,66	C	C	0,46

Tahun 2022 Tipe Pelayanan sama dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Tipe pelayanannya **C** dengan LOS = **0,66** sedangkan pada tahun 2022 tetap **C** dengan LOS = **0,46**, meskipun berada pada Tingkat pelayanan **C** tetapi rangenya menurun dikarenakan ada titik-titik kemacetan yang kapasitas jalannya tidak bertambah tetapi jumlah kendaraan meningkat, tetapi Dinas Perhubungan melakukan upaya dengan adanya kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA) di beberapa jalan seperti di kawasan Dustira, yang meliputi Jl. Dustira, Jl. Baros, Jl. Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan Segitita Contong dan adanya alternatif jalan Underpass di jalan Dustira sehingga dapat mengurai kemacetan yang menuju jalan sriwijaya atau pasar antri.

2. Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun Ini dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

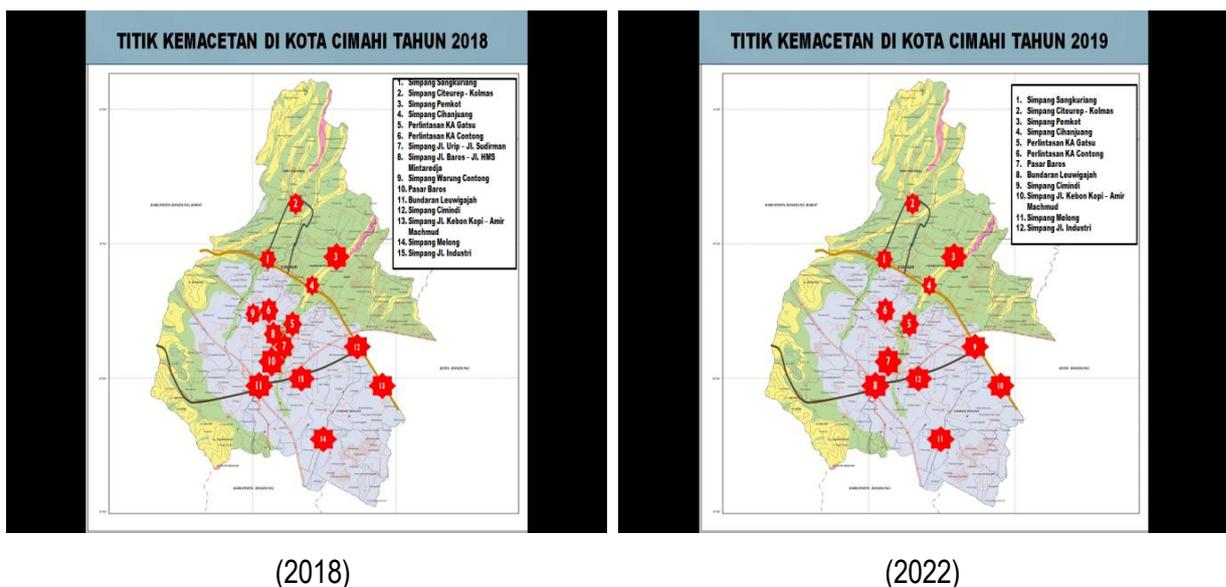
Indikator Kinerja	Target RPJMD 2017-2022	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)	C	C	C	100%

Target RPJMD 2017-2022 tipe pelayanan sudah tercapai yaitu C tetapi masih ada beberapa titik kemacetan di ruas-ruas jalan Kota Cimahi yang harus diupayakan lancar pada jam tertentu (jam sibuk pada *weekday* dan *weekend*).

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dikarenakan sebagai berikut :

- Adanya pelebaran jalan di depan pusdik armed cimahi untuk meminimalisasi kemacetan yang kerap terjadi di jalan baros khususnya di depan pusdik armed
- Adanya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dengan diaktifkannya kembali Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di persimpangan Baros depan Pusdikarmed sehingga dapat mengurai kemacetan lalu lintas.
- Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dengan Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan Dustira, yang meliputi Jl. Dustira, Jl. Baros, Jl. Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan Segitita Contong,
- Alternatif jalan *Underpass* di jalan dustira yang telah di resmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada pertengahan tahun 2022 sehingga dapat mengurai kemacetan dan adanya menjadi penurunan titik kemacetan dari tahun 2018 sebanyak 15 titik menjadi 13 titik pada tahun 2022.



4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana :

Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian	
		Keuangan	Kinerja
Rp. 33.565.820.444,-	Rp. 30.808.199.166,-	91,78%	99,19%

Dari tabel diatas menunjukkan efisiensi penggunaan sumber dana sebesar Rp. 2.757.621.278,- atau 8,21%.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja (Cross Cutting Program Kegiatan)

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja karena pada program tersebut terdapat kegiatan yang merupakan sektor perhubungan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, diantaranya:

1. Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar dan Penerangan Jalan Umum

Salah satu upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat adalah melalui pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, pagar, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Para pengguna jalan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi terlaksananya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari infrastruktur kota, seluruh jaringan jalan yang ada di Kota Cimahi perlu dilengkapi alat kelengkapan jalan yang memadai. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintahan Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya para pengguna jalan dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat.

2. Sektor Perparkiran

Pengguna jalan atau pengguna kendaraan dilarang parkir sembarangan supaya tidak terjadi kemacetan jika ada yang parkir liar ada tindakan dari dinas perhubungan seperti adanya kegiatan Gerakan penertiban perparkiran dan penggembokan roda kendaraan.

3. Sektor Pengawasan & Pengendalian Angkutan Umum

Adanya operasi penegakan hukum angkutan umum di jalan raya, penertiban angkot yang tidak memiliki izin trayek dan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang.

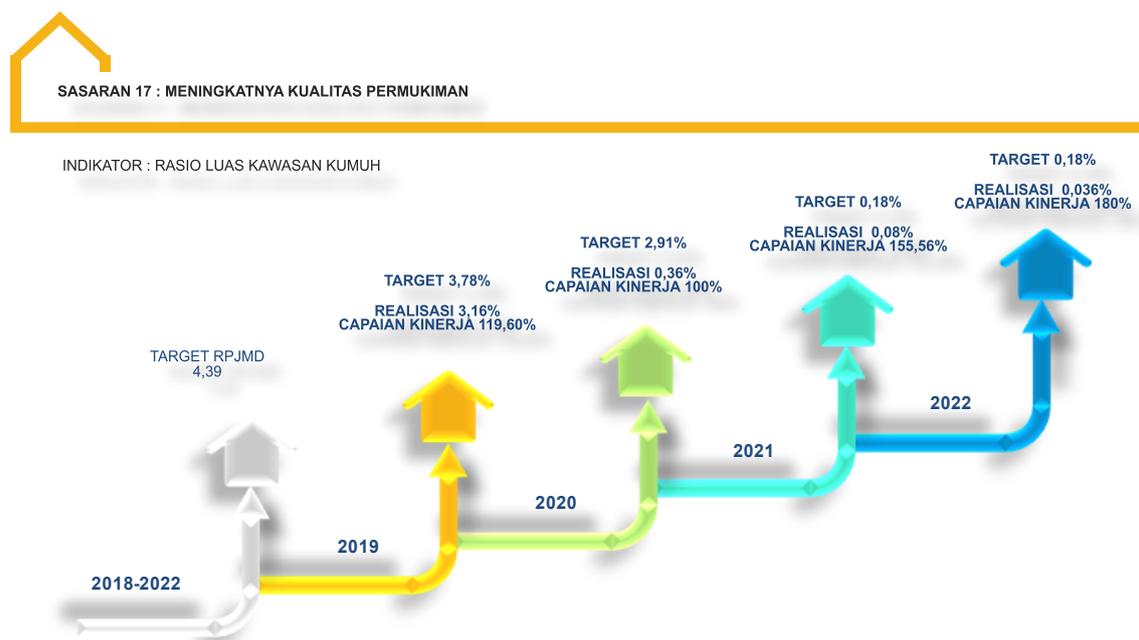
4. Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor

Kendaraan Angkutan Umum diwajibkan melakukan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan, dishub kota cimahi guna memudahkan para pengusaha kendaraan angkutan umum dan barang sudah menggunakan *Smartcard* atau buku uji digital sehingga para wajib uji kendaraan dapat mengakses proses pendaftaran pengujian secara *online* dan mengurangi calo atau pungutan liar.

5. Sektor Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Adanya pengalihan arus lalu lintas dari dua arah menjadi satu arah pada ruas tertentu dan jam tertentu yang mengalami kemacetan guna mengurangi kemacetan dan peresmian alternatif jalan Underpass di jalan dustira.

SASARAN 17 : MENINGKATNYA KUALITAS PERMUKIMAN
INDIKATOR : RASIO LUAS KAWASAN KUMUH



Luas kawasan kumuh terhadap luas kota yang sebelumnya ditargetkan sebesar 0,18 (rasio) pada tahun 2022 terlihat tidak tercapai pada akhir tahun 2022 dikarenakan pada akhir tahun 2021 perhitungan luas kawasan kumuh mengalami perubahan maupun penambahan pada aspek dan parameter yang diperhitungkan dalam pengurangan kekumuhan suatu kawasan. Sebelumnya terdapat 8 delapan aspek pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; dan Ruang Terbuka Publik. Sedangkan berdasarkan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat perubahan pada aspek dan penambahan parameter untuk menghitung pengurangan luas kawasan kumuh (7 aspek 19 parameter) yaitu:

1. **Kondisi Bangunan Gedung** : (a) Ketidakteraturan bangunan; (b) Kepadatan Bangunan; (c) Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
2. **Kondisi Jalan Lingkungan** : (a) Cakupan pelayanan jalan lingkungan; (b) Kualitas Permukaan jalan lingkungan
3. **Kondisi Penyediaan Air Minum** : (a) Ketersediaan akses aman air minum, (b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4. **Kondisi Drainase Lingkungan** : (a) Ketidakkampuan mengalirkan limpasan air; (b) Ketidaktersediaan drainase; (c) Ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota; (d) Tidak terpeliharanya drainase; (e) Kualitas konstruksi drainas
5. **Kondisi Pengelolaan Air Limbah** : (a) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; (b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

- 
6. **Kondisi Pengelolaan Persampahan** : (a) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; (b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; (c) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
 7. **Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran** : (a) Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran; (b) Ketidakterediaan Sarana proteksi kebakaran.

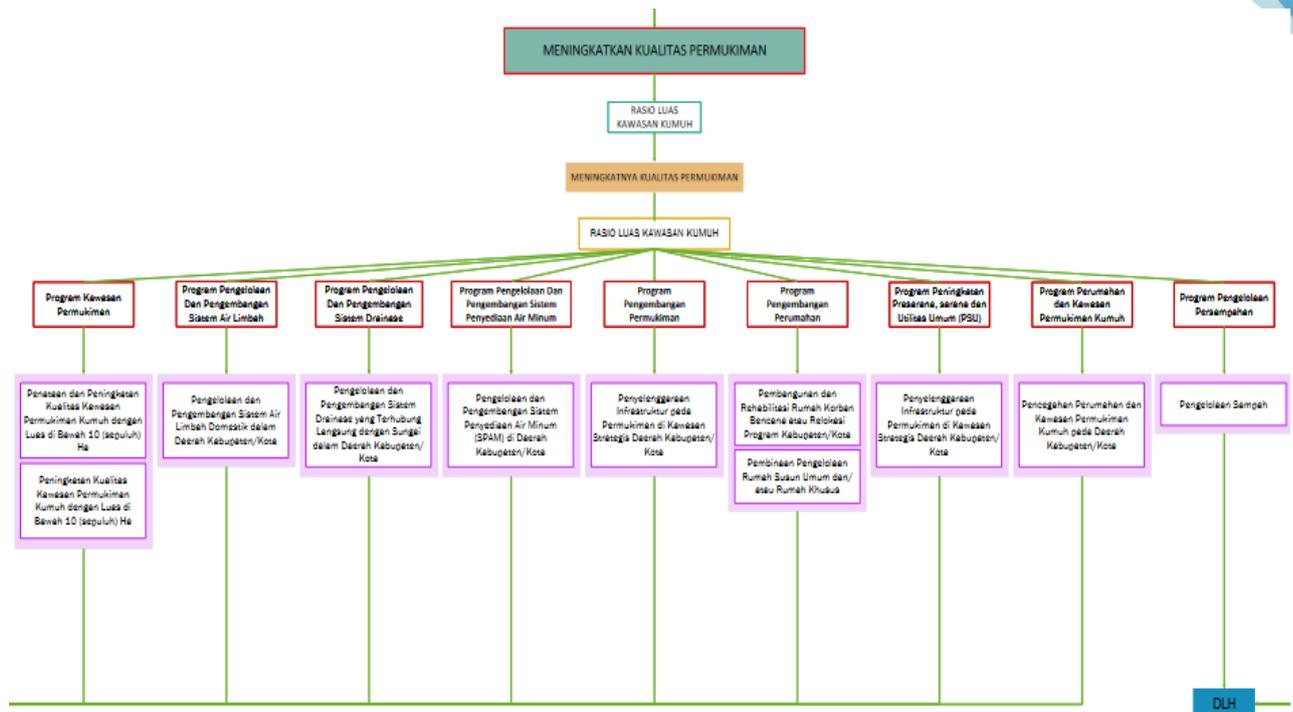
Sehingga berdasarkan perubahan aspek dan jumlah parameter tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pendataan ulang terhadap luas kawasan kumuh di Kota Cimahi pada awal tahun 2022 dan dihasilkan luas kawasan kumuh yang baru yaitu 156,47 ha (SK Walikota Cimahi No. 663/Kep.2330-DPKP/2021 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2021 dimana teridentifikasi kekumuhan di 15 kelurahan di 28 kawasan. Berdasarkan kinerja pengurangan luas kawasan kumuh yang telah dilakukan pada tahun 2022 sebesar 5,02 ha dengan menggunakan baseline SK Kumuh 2021 dan penyesuaian luas kota menjadi 4.248 ha (semula menggunakan luas kota 4.025 ha); maka realisasi rasio luas kawasan kumuh terhadap luas kota pada tahun 2022 adalah 0,036 merupakan sisa Kawasan kumuh (dalam bentuk rasio luas Kawasan kumuh) dan sisa luas Kawasan kumuh di kota Cimahi sebesar 154,45 ha.

2. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Peningkatan kinerja dilakukan melalui adanya upaya penanganan kawasan kumuh selama tahun 2022 sehingga telah mengurangi luas kawasan kumuh sebesar 5,02 Ha, serta adanya anggaran yang diberikan oleh pusat dan provinsi sehingga dapat mendukung kegiatan pengurangan luas kawasan kumuh.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait penanganan kumuh serta pendataan segala bentuk upaya penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan baik oleh OPD, kelurahan/kecamatan, maupun masyarakat.

Crosscutting IKU Rasio Luas Kawasan Kumuh (sumber data: Bappelitbangda Kota Cimahi)



2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam meningkatkan pengurangan luas kawasan kumuh perlu adanya peningkatan anggaran baik dari APBD maupun sumber lain serta peningkatan kapasitas SDM khususnya di Seksi Pengendalian dan Penataan Perumahan Kawasan Permukiman baik itu secara kualitas maupun kuantitas sehingga efisiensi sumber daya dan kinerja penanganan kawasan kumuh dapat ditingkatkan agar capaian pengurangan luas kawasan kumuh tahun selanjutnya lebih maksimal sesuai tujuan cimahi bebas kumuh.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja (Cross Cutting Program Kegiatan).

Program Kawasan Permukiman dan Program Pengembangan Perumahan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sudah sesuai dan menunjang untuk pencapaian target pengurangan luasan Kawasan kumuh dan rasio luas kawasan kumuh. Untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan adanya sinergitas kegiatan antara OPD dan kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang mendukung pengurangan luas kawasan kumuh. Perbaikan target pengurangan Rasio Luas Kawasan Kumuh harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam menyediakan sumber daya dengan tetap memperhatikan target RPJMD, target RPJMN, SPM dan Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG'S).

SASARAN 18 : MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA

INDIKATOR : INDEKS RESIKO BENCANA

SASARAN 18 : MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA INDIKATOR : INDEKS RESIKO BENCANA



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun capaian kinerja tahun 2022 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pengukuran Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Kelas Sedang (120)	Kelas Sedang (82,01)	Kelas Sedang (82,01)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Indeks Resiko Bencana	Kelas Sedang (120)	Kelas Sedang (105,41)	Kelas Sedang (105,41)	Kelas Sedang (120)	Kelas Sedang (91,71)	Kelas Sedang (91,71)	Kelas Sedang (120)	Kelas Sedang (82,01)	Kelas Sedang (82,01)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target RPJMD yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan RPJMD

Indikator	Target RPJMD 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Indeks Resiko Bencana	Kelas Sedang (120)	Kelas Sedang (120)	Kelas Sedang (82,01)	Kelas Sedang (82,01)

4. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa faktor penunjang keberhasilan untuk mencapai capaian kinerja Indeks Ketahanan Bencana yaitu:

1. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Kota Cimahi melalui APBD;
5. Adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang menjadi komando dan koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana

- secara nasional serta menjadi mitra kerja bagi BPBD Kota Cimahi sehingga pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan secara terpadu;
6. Peraturan Perundangan undangan mengenai penanggulangan bencana;
 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi;
 8. Adanya Organisasi Kemasyarakatan dan Relawan di bidang kebencanaan serta pemerhati bencana;
 9. Partisipasi Masyarakat dan kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dana dalam program-program kebencanaan.
 10. Perkembangan teknologi yang cukup pesat untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risik-risiko bencana.

Adapun Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
2. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan;
3. Terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;
4. Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
5. Lemahnya koordinasi dan jaringan komunikasi dalam penanggulangan bencana;
6. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;
7. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait kebencanaan.

5. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh program utama yang mendukung terhadap pencapaian SPM bidang kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan diharapkan dengan pelaksanaan program tersebut, dapat menunjang keberhasilan kinerja BPBD Kota Cimahi. Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

- c. Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - d. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
 - e. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - g. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan terdiri dari :

Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran, dengan keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari indikator keberhasilan lebih dari 90%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2022 telah berhasil melaksanakan sebagian besar program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan didalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilihat berdasarkan penggunaan anggaran terhadap rencana anggaran, dengan membandingkan antara *input* dan *output* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi dari data *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 5
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya rasio wilayah yang siap menghadapi bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.410.368.691	3.981.705.315	90,28
		Program Penanggulangan Bencana	2.570.387.100	2.452.702.203	95,42

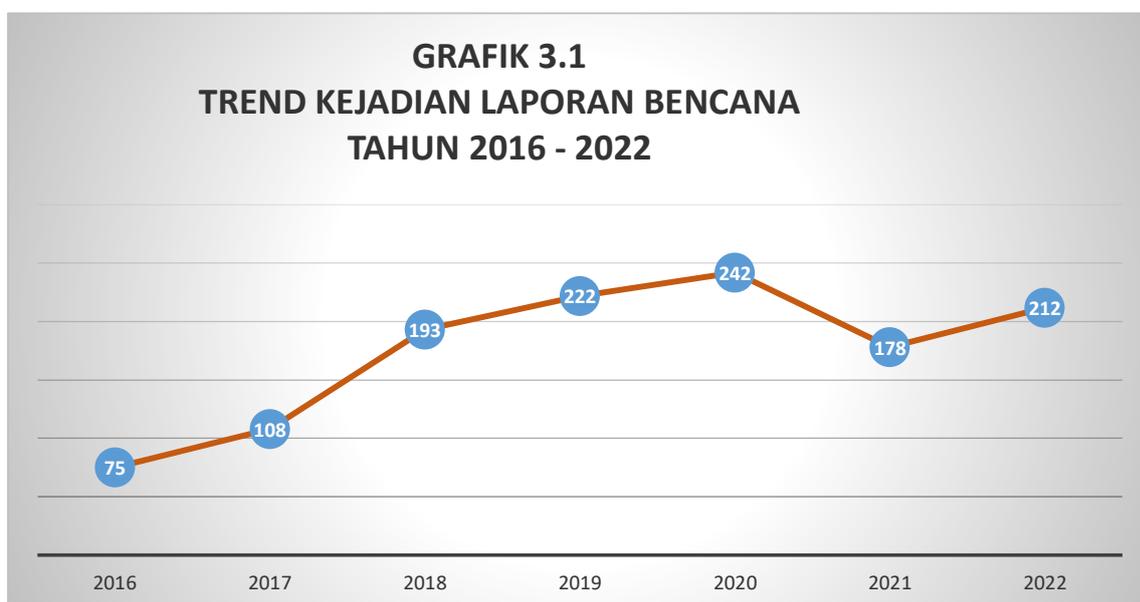
Berdasarkan tabel di atas, efisiensi anggaran terjadi pada seluruh program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan atau pemeliharaan barang di sesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kota Cimahi dibantu oleh personil Unit Reaksi Cepat (URC) siaga bencana. URC ini merupakan tenaga pendukung kegiatan Non-PNS merupakan sumber daya manusia yang direkrut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang

memiliki fungsi dalam mendukung upaya Tanggap Darurat Bencana. Personil yang direkrut berjumlah 9 orang terbagi pada 6 orang sebagai personil kaji cepat (*rapid assessment*) dan 3 orang sebagai personil Pusat Data dan Pengendali Operasi (*Pusdalops*) dengan waktu kerja 7 x 24 jam sesuai jadwal yang ditentukan.

Tren Kejadian Bencana di Kota Cimahi berdasarkan Log Book kejadian Bencana setiap tahun adalah sebagai berikut :

- Tahun 2022 tercatat 212 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani.
- Tahun 2021 tercatat 178 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2020 tercatat 242 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2019 tercatat 222 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2018 tercatat 193 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2017 tercatat 108 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani,
- Tahun 2016 tercatat 75 kejadian bencana dan kejadian lainnya yang ditangani.



Jumlah Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Cimahi sebanyak 14 orang ASN dan 21 orang Non ASN, berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.3458-Org/2022 Tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Dan Kelas Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Bila melihat grafik kejadian bencana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, idealnya membutuhkan penambahan jumlah personil dan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanggulangan bencana, namun pada pelaksanaannya BPBD Kota Cimahi, melakukan efisiensi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Cimahi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja (*Cross Cutting Program Kegiatan*)

PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN:

1. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA.

Pelayanan Informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah desa/kelurahan rawan bencana yang difokuskan kepada masyarakat berpotensi terpapar bencana (dalam satu jenis bencana) yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana bertujuan untuk menyusun Peta Risiko (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas) dengan skala minimal 1: 25.000 untuk wilayah administrasi Kota Cimahi dengan kedetailan sampai dengan Kelurahan. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Kota Cimahi yaitu menghasilkan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar yang kuat dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana maka pemerintah Kota Cimahi maupun pihak terkait harus melegalkan dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu, dokumen kajian risiko bencana yang legal dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) di Kota Cimahi.

b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) sebagai berikut :

1. Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tingkat Kota Cimahi.

Kesiapsiagaan merupakan upaya untuk mengantisipasi dan merespon bencana secara efektif yang perlu dibangun sejak dini. Kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana yang akan diterima. Oleh karena itu masyarakat harus memiliki kemampuan untuk bertahan dan membangun kembali kehidupannya setelah terkena bencana (build back better). Dari sisi kesiapsiagaan harus disiapkan upaya yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang lebih Tangguh dalam menghadapi kemungkinan ancaman bencana yang dapat terjadi.

Pemerintah melalui inisiasi BNPB mencanangkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati momen bersejarah kesadaran masyarakat Indonesia terkait ditetapkannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dilatarbelakangi 10 tahun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang jatuh pada 26 April 2017, peringatan HKB dilaksanakan setiap tahun secara rutin.

Di Kota Cimahi Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) dilaksanakan pada tgl. 25 April 2022, kegiatan berupa :

- Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022, dengan yang dipimpin oleh Plt.Walikota Cimahi dan dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Pegawai Pemkot Cimahi secara online.
- Himbuan partisipasi pelaksanaan simulasi sederhana kepada seluruh stakeholders melalui surat edaran dan himbuan di media sosial (instagram) dan penyampaian informasi melalui baligho di lokasi strategis terdiri dari Halaman DPRD Kota Cimahi, Alun-Alun Kota Cimahi,

Perempatan Citeureup, Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Cimindi Raya dan Bunderan Leuwigajah;

- Pembuatan Video Ucapan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kota Cimahi dari Plt.Wali Kota Cimahi, Sekretaris Daerah Kota Cimahi dan Kepala BPBD Kota Cimahi;



2. Simulasi Bencana Gempa Bumi

Pelaksanaan Simulasi Bencana Gempa Bumi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022, Lokasi pelaksanaan Simulasi Gempa Bumi di Rusunawa Cigugur Tengah kota cimahi. Peserta Simulasi Bencana Gempa di Rusunawa Cigugur Tengah sebanyak 1.484 orang terdiri dari Penghuni Rusunawa Cigugur Tengah sebanyak 1.164 Orang, Relawan Bencana Kota Cimahi sebanyak 100 Orang, Forum Pengurangan Risiko Bencana sebanyak 15 Orang, SKPD Pendukung Simulasi sebanyak 85 Orang, Unsur Pimpinan dan Undangan sebanyak 120 Orang.

3. Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Kota Cimahi

Salah satu pihak yang menjadi mitra dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi adalah Relawan Bencana Kota Cimahi yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 38/KEP.1985-BPBD/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Relawan Bencana Tingkat Wilayah Kota Cimahi dimana partisipasi dan perannya dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi sangat penting karena dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Cimahi.

4. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana

Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana di Rusunawa Cigugur Tengah melalui beberapa tahap terdiri dari :

1. Koordinasi dan Penetapan lokasi pemasangan rambu jalur evakuasi bencana;
2. Survei Lokasi dan titik-titik pemasangan rambu jalur evakuasi;
3. Pengadaan Rambu Jalur Evakuasi Bencana;
4. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Bencana.

Pemasangan rambu jalur evakuasi tersebut selain sebagai informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan Rusunawa Cigugur Tengah bila terjadi bencana di lokasi tersebut.

5. Jambore Relawan Bencana

Pelaksanaan kegiatan Jambore Relawan Bencana Kota Cimahi tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 2 Desember 2022, Lokasi Kegiatan adalah Datar Pinus Camp, Jl Raya. Pangalengan No. 354 Kab.Bandung.

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Jambore Relawan Bencana Kota Cimahi ini adalah dalam rangka menjalin silaturahmi antar relawan dengan aparaturnya agar Penyelenggaraan Bencana di Kota Cimahi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan tujuan sebagai berikut :

1. Membangun kemitraan dan sinergitas antara pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Cimahi dengan relawan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi;
3. Membangun komunikasi efektif antara Aparatur dan Relawan;

4. Menghasilkan kesepakatan bersama dalam penanggulangan bencana di Kota Cimahi.
5. Sebagai sarana pengawasan dan pembinaan yang menitikberatkan pada pengembangan diri peserta (relawan).

6. Pengelolaan Pusat Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi

Lingkup kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Bencana Daerah

Dalam hal ini BPBD Kota Cimahi akan membangun satu aplikasi yang bernama SIBEDA (Sistem Informasi Bencana Daerah) dimana secara garis besar bahwa Aplikasi tersebut mempunyai fungsi utama sebagai sistem Pelaporan dari Masyarakat terkait dengan bencana yang langsung dapat diterima oleh BPBD Kota Cimahi dan langsung dapat dilakukan tindak lanjut kaji cepat lapangan yang selanjutnya hasil kaji cepat tersebut dapat dilaporkan kembali secara digital, sehingga pengelolaan data kejadian dapat selesai secara cepat dan terperinci.

d. Pengelolaan Media Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Memiliki Platform digital berbasis media sosial hal ini diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan zaman untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat tidak hanya secara langsung tapi dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online. Saat ini BPBD Kota Cimahi banyak memberikan informasi melalui akun Instagram BPBD Kota Cimahi (@bpbdcimahkota) yang dimana sudah terintegrasi dengan platform lainnya yaitu facebook (@BPBDKOTACIMAHI) dan Twitter (@Bpbdkotacimahi).

e. Pelaksanaan Peliputan Lapangan dan Peliputan Kegiatan BPBD Kota Cimahi, Penyusunan Dokumentasi Video dan Foto.

Dalam mengisi data dan informasi perlu adanya pelaksanaan peliputan lapangan secara langsung oleh tim dari Pengelola Data dan Informasi BPBD Kota Cimahi. Peliputan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Cimahi selama Tahun 2020 baik kegiatan yang berupa Rapat Koordinasi maupun pelaksanaan peliputan penanggulangan bencana yang dilaksanakan di lapangan

7. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

1. Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana

Dilakukan pemasangan rambu evakuasi bencana sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dengan menggunakan atau menempatkan rambu dan papan informasi bencana pada daerah-daerah rawan bencana. Sedangkan tujuan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana antara lain:

1. Standarisasi pedoman terhadap rambu dan papan informasi bencana.
2. Informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

3. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

2. Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah merupakan upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan mitigasi dan simulasi bencana di sekolah sehingga terciptanya sekolah aman bencana dan dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara mandiri pada saat terjadi bencana.

b. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota.

Pengendalian Operasi yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan keberfungsian organisasi dan sumber daya dalam mencapai sasaran operasi tanggap darurat bencana. Dalam konteks SPM Sub Urusan Bencana, Pengendalian operasi difokuskan pada kemampuan Pusdalops untuk:

1. Menerima, menganalisis, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan para pemangku kebijakan.
2. Memberikan dukungan data dan informasi bagi SKPDB dalam mengelola sumber daya dan logistik darurat bencana.
3. Menerima, menganalisis, dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui komunikasi risiko bencana yang efektif.

c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Kegiatan Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan upaya untuk penyediaan peralatan kebencanaan sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Kota Cimahi.

d. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Pelaksanaan *Assesment* Pascabencana dilaksanakan atas dasar laporan kaji cepat Seksi Kedaruratan dan Logistik dan permohonan dari Kelurahan. Hasil *Assesment* Perhitungan Kerusakan dan Kerugian pada Kejadian Bencana di wilayah Kota Cimahi pada bulan tahun 2022 sebanyak 119 laporan yang telah diteruskan kepada Pj. Wali Kota Cimahi dengan tembusan dinas terkait sesuai dengan sektor yang diampu.

Tabel Rekapitulasi Laporan *Assesment* Pasca Bencana Tahun 2022

No	Kelurahan	BULAN												Jumlah Laporan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Cipageran	0	7	1		2				1	10	2	2	25
2	Cibabat	0		1			1		1			1		4

3	Citeureup	0	2		1	1	3	1	1	1	2	1	1	14
4	Pasirkaliki	0				1	1	1			1			4
5	Setiamanah	0												0
6	Padasuka	0	1	1	1	1						2	1	7
7	Cigugur Tengah	0												0
8	Baros	0						1				1	1	3
9	Karang Mekar	0										1		1
10	Cimahi	0				1						1	1	3
11	Leuwigajah	0	4	1	5	3	1	1	6	3	4		1	29
12	Utama	0	1	1		2	1	1		6	2	2		16
13	Cibeber	0			1			1	1	1				4
14	Melong	0			1			1				3	2	7
15	Cibeureum	0										2		2
JUMLAH														119

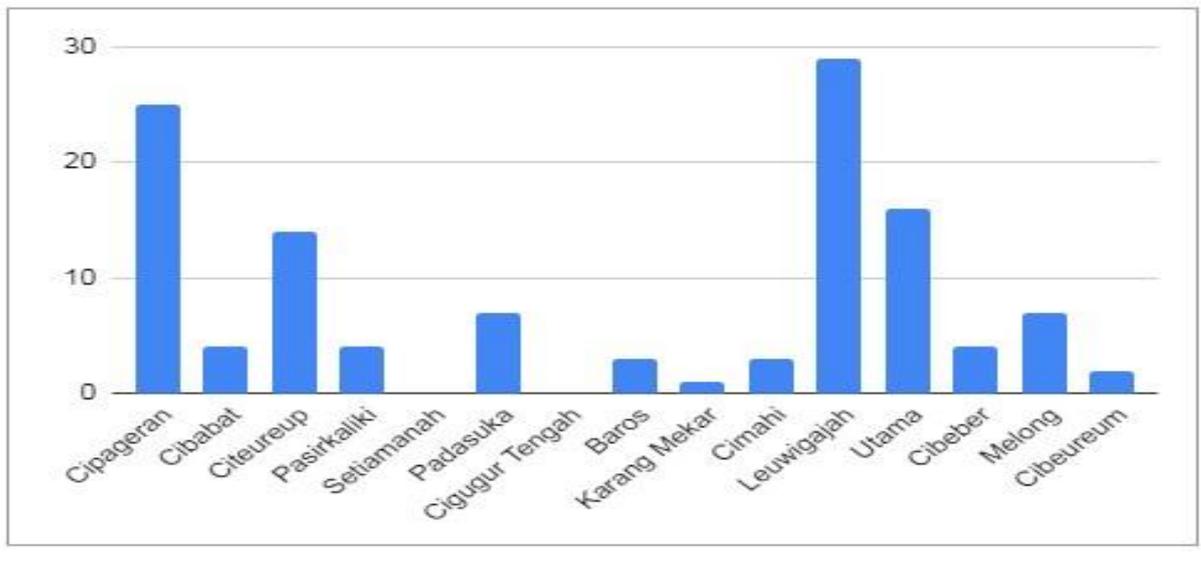
Tabel

Laporan Assessment Pasca Bencana Tahun 2022 Berdasarkan Sektor Jitupasna

NO	Sektor	Jumlah Laporan
1	Permukiman	96
2	Infrastruktur	23

TABEL
PASCA BENCANA TAHUN 2022
BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA CIMAHI

1. PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA



Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana yang terdiri dari:

1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

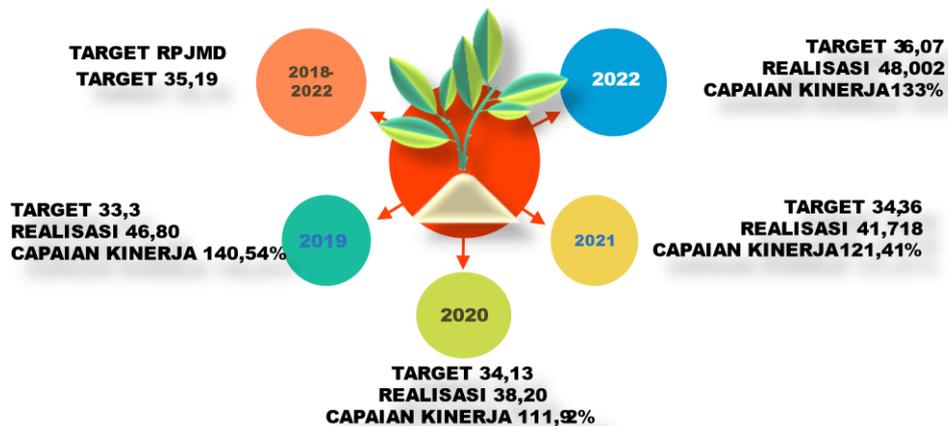
Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar/logistik bagi korban bencana dan upaya penyelamatan korban terdampak bencana.



SASARAN 19 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN 19 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN



INDIKATOR: INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2022		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	36,07	48,002	133%
1. Indeks Kualitas Air (IKA)		34,58	
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)		73,32	
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)		24,23	

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	34,13	38,209	111,95%	34,36	41,718	121,41%	36,07	48,002	133%
1. Indeks Kualitas Air (IKA)	35	14,00 52,01 (SISKANA)	40% 148,6%	10,1	16,66	164,95%		34,58	
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	55	68,91	125,29%	71,3	75,44	105,80%		73,32	
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	30,32	23,00	75,86 %	22,91	22,38	97,68%		24,23	

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan komposit dari 3 indeks, yaitu :

- a. Indeks Kualitas Air (IKA), merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU), merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan
- c. Indeks Kualitas Lahan (IKL), merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 34,58) + (0,405 \times 73,32) + (0,219 \times 24,23) \\
 &= 13,002 + 29,694 + 5,306 \\
 &= 48,00
 \end{aligned}$$

Capaian Nilai IKLH Kota Cimahi tahun 2022 sebesar 48,00 telah melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebesar 36,07 dengan capaian kinerja sebesar 133,07%. Nilai IKLH pada tahun 2020 sebesar 38,209 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 48,002. Namun demikian, berdasarkan klasifikasi predikat nilai IKLH, capaian tersebut masih termasuk kategori kurang.

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 90$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Klasifikasi nilai IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>)

1. Perbandingan Realisasi Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target RPJMD yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Indikator	Target RPJMD Perubahan 2017-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		37,76	48,00	117,16%
1. Indeks Kualitas Air (IKA)				
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)		10.2	34.58	339,01 %
		71.13	73,32	103,07 %
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)		23,39	24,23	103,59 %

Dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022, ditetapkan target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan komponen dari IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Ketiga komponen tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja diatas 100%.

2. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Cimahi telah menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan terus meningkatnya nilai IKLH dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang menjadi salah satu komponen penilaian indeks kualitas air pada tahun 2022, menunjukkan bahwa pada 5 (lima) sungai di Kota Cimahi yaitu : Sungai Cilember, Sungai Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan dan Sungai Cibeureum, dimana setiap sungai dipantau di tiga titik yang berbeda yaitu pada bagian hulu, tengah, dan hilir, didapatkan hasil status mutu air seperti tabel berikut:

lahan privat seperti industri yang mempunyai lahan yang cukup luas untuk dijadikan hutan kota atau taman kehati untuk menambah luasan RTH. Selain menambah luasan, dilakukan pula pengendalian terhadap RTH eksisting melalui pengendalian ijin penebangan pohon dan sosialisasi larangan paku pada pohon yang melibatkan peran serta masyarakat serta komunitas peduli lingkungan.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran	Capaian kinerja (%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	339,01%	90,09%	9,91%
2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	103,07%	90,09%	9,91%
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	103,59%	93,58%	6,42%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran “terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air” dan sasaran “terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara” menyumbang efisiensi sumber daya sebesar 9,91%, serta sasaran “terwujudnya perlindungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau” menyumbang efisiensi sebesar 6.42%.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja (Cross Cutting Program Kegiatan)

Pelaksanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 54.608.908.950,- meliputi pos Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 20.445.057.128,- serta pos Anggaran Program Urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 34.163.851.822,- yang terdiri dari 9 Program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2022. Adapun program yang menunjang kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran Rp. 247.680.110,-
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran Rp 2.390.517.112,-
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan alokasi anggaran Rp 1.742.484.900,-

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan alokasi anggaran Rp 4.354.400,-
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan alokasi anggaran Rp 966.300.700,-
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp. 113.050.300,-
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran Rp. 172.240.400,-
8. Program Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran Rp 28.527.223.900,-

MISI 5 : MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN

SASARAN 20 : MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR : TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

MISI 5 : MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN

SASARAN 20 : MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR : TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

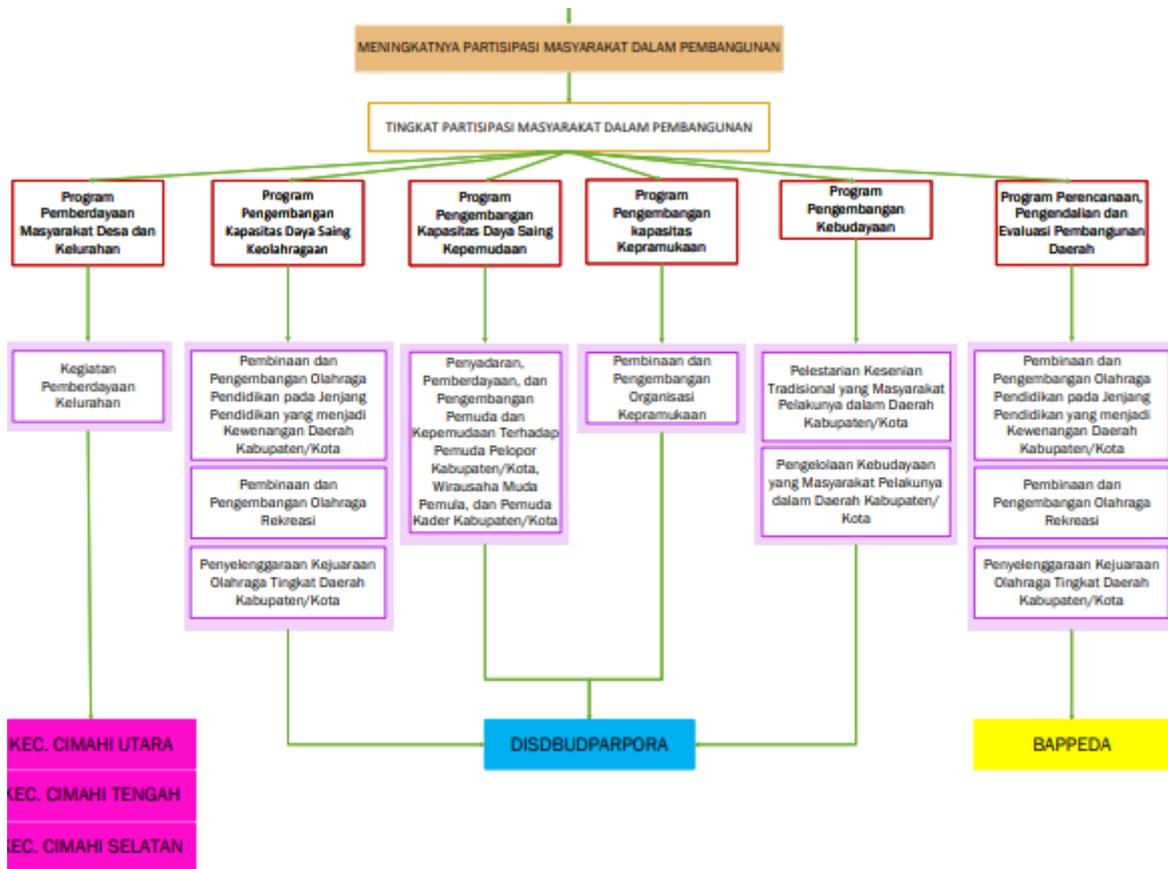


Secara keseluruhan sasaran "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan", untuk realisasi dari target 80% terealisasi 100% sedangkan secara fisik capaian kinerja tercapai 123,08%. Pada sasaran ini dilihat dari jumlah partisipasi masyarakat yang dilaksanakan pada kegiatan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta

Pemberdayaan sosial kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, kegiatan pelaksanaan PHBA dan PHBN di kecamatan dan kelurahan serta kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di kecamatan dan kelurahan yaitu berupa peran serta masyarakat dan kelembagaan serta tokoh masyarakat dalam peran aktif di kegiatan baik dalam kegiatan lomba-lomba/evaluasi maupun yang bersifat swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Untuk realisasi keuangan pada kegiatan-kegiatan ini tidak terserap 100% karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya efisiensi yang disesuaikan dengan kebutuhan, adanya beberapa sub

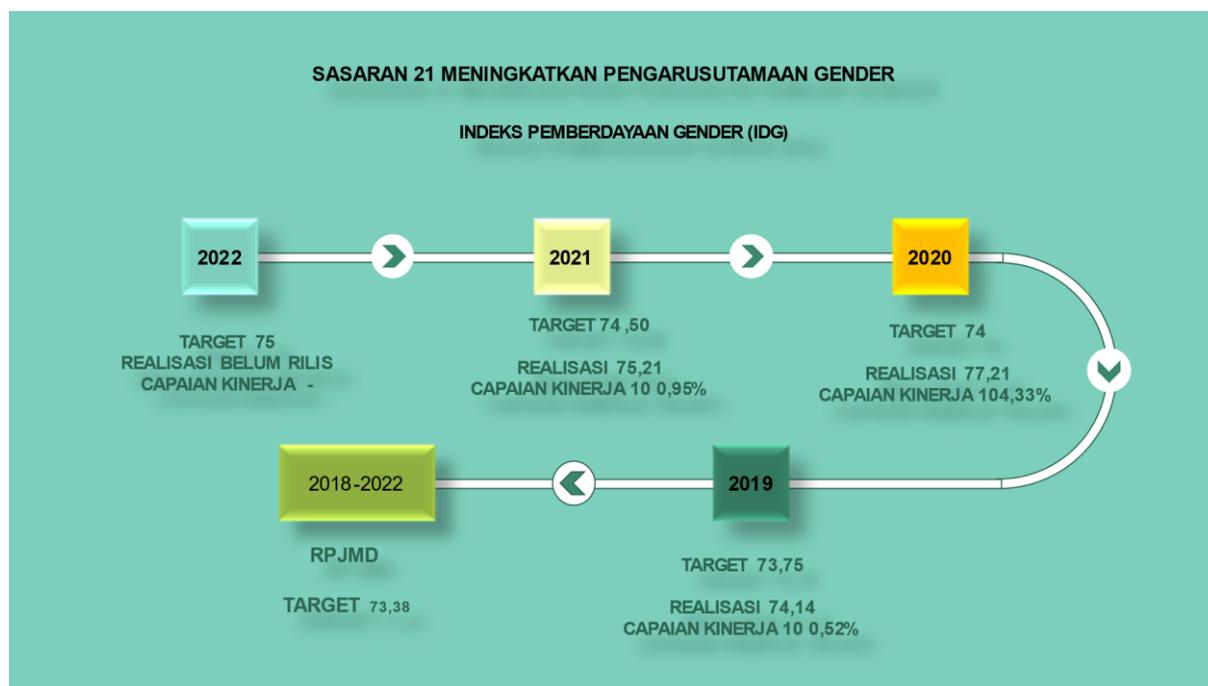
kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan alasan salah satunya sudah adanya CSR (*Coorporate Social Responsibility*).



Crosscutting IKU Tingkat Pembangunan dalam Masyarakat (sumber data: Bappelitbangda Kota Cimahi)

SASARAN 21 : MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

INDIKATOR : INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu:

1. keterlibatan perempuan dalam parlemen,
2. perempuan sebagai tenaga profesional, manager dll serta
3. sumbangan pendapatan perempuan.

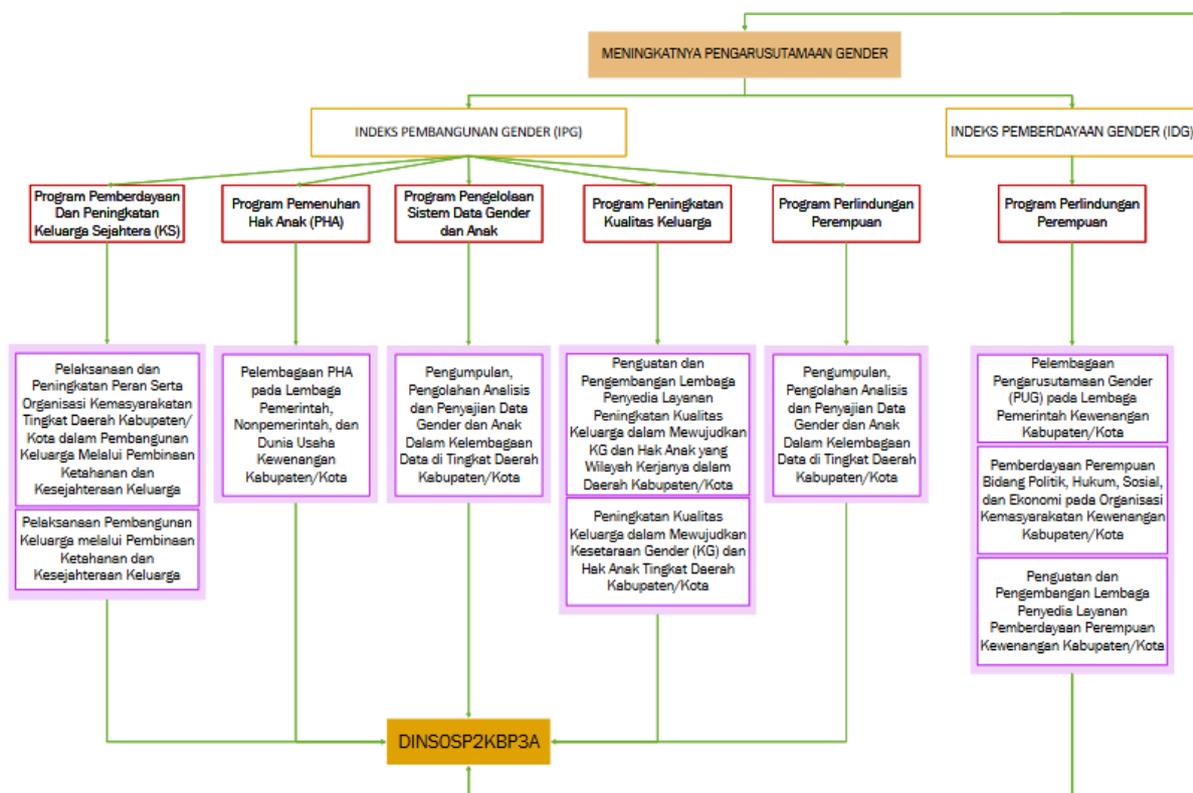
Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dalam kurun waktu 2017-2021 IDG Kota Cimahi mengalami nilai terendah pada tahun 2021 yakni di angka 74,07 dari semula 76,97 pada tahun 2017. Tren kenaikan sempat terjadi pada tahun 2018 di angka 77,21, namun pada tahun 2019 turun cukup signifikan di angka 74,14. Meski sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 di angka 70,24 namun penurunan kembali terjadi ditahun 2021 ke angka 74,07. Meskipun demikian nilai IDG Kota Cimahi masih di atas nilai IDG Provinsi Jawa Barat termasuk kota dan kabupaten

di sekitar kota Cimahi yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Yang sangat disayangkan angka IDG Kota Cimahi ini masih dibawah Nilai IDG Nasional. Hal ini juga menunjukkan nilai IDG Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan yang masih dibawah nilai IDG Nasional. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai keteringgalan nilai IDG Kota Cimahi dan rata-rata Kota/Kabupaten se-Jawa Barat perlu ditelaah lebih lanjut dari nilai komposit penyusunnya.

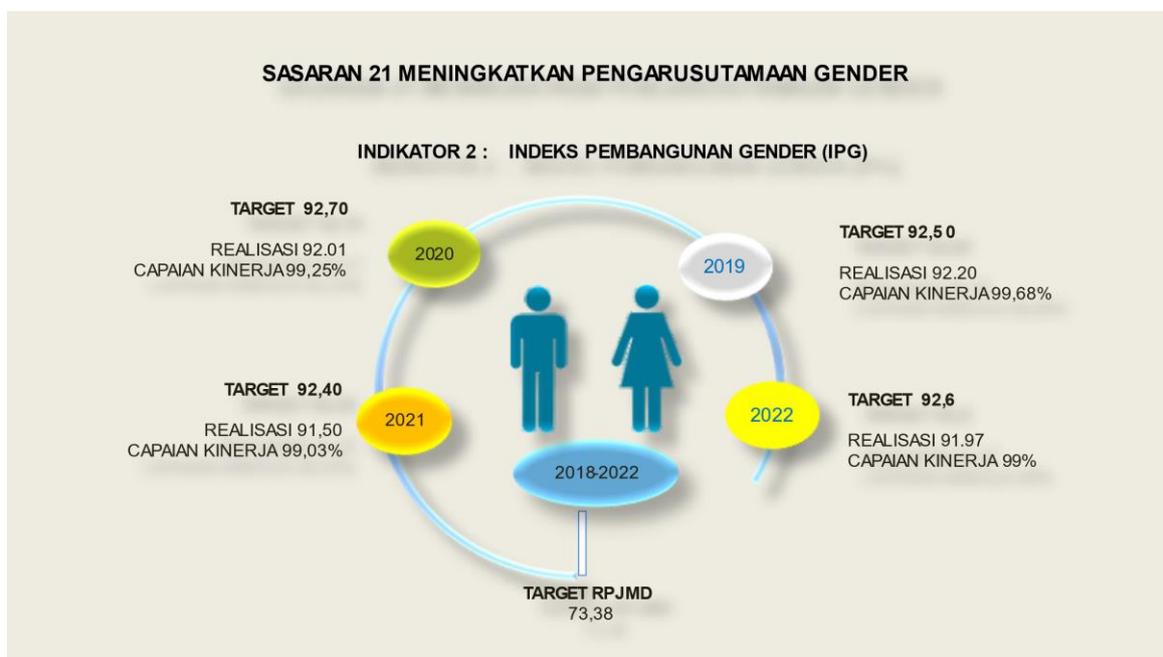
IDG	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Indonesia	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26
Jawa Barat	70,04	70,20	69,48	70,24	70,62
Kota Cimahi	76,97	77,21	74,14	75,13	74,07
Kota Bandung	58,84	63,63	70,38	70,49	70,81
Kab. Bandung	76,50	72,40	65,86	67,07	68,68
Kab. Bandung Barat	53,98	62,71	64,53	65,40	65,83

Crosscutting IKU IDG Kota Cimahi (sumber: Bappelitbangda Kota Cimahi)



SASARAN 21 MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

INDIKATOR 2 : INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)



1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th.2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Th.2022
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,40	91,50	99,03%	92,60	91,97	99%

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,47 poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja IPG pada tahun 2021.

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target yang Terdapat dalam RPJMD

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018- 2022	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	73,38	92,60	91,97	99%

--	--	--	--	--

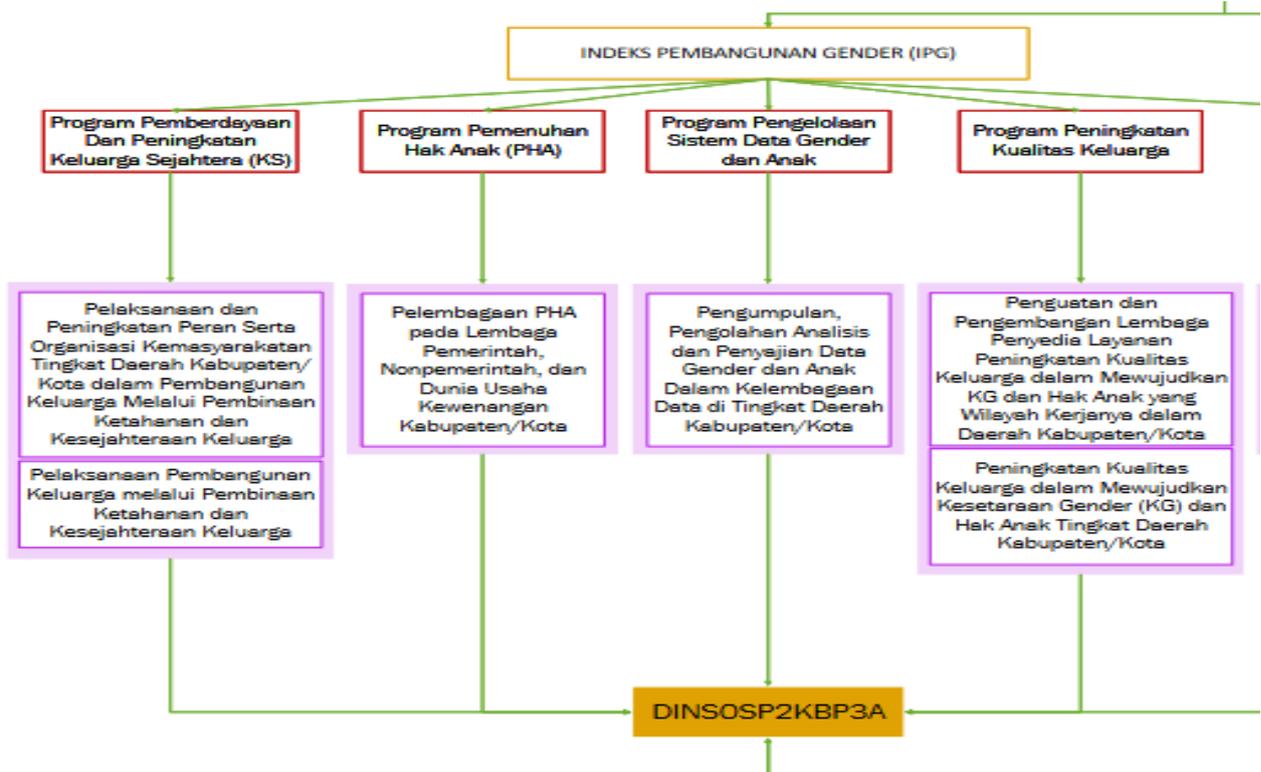
Tingkat keberdayaan gender di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). **IPG** mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*). IPG Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami stabilitas yang cukup tinggi di kisaran rata-rata 92. Tren kenaikan terjadi pada rentang waktu 2017 - 2018 yakni 92,33 menjadi 92,36 sedangkan tren penurunan terjadi pada tahun 2019 yakni di angka 92,20 menjadi 92,01 pada tahun 2020 dan 91,95 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 terjadi tren kenaikan kembali ke angka 91,97. Namun IPG Kota Cimahi masih berada di atas nilai IPG Provinsi Jawa Barat bahkan IPG Indonesia. Bila dibandingkan dengan kota/kabupaten sekitar kota Cimahi, Nilai IPG Kota Cimahi masih berada di bawah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tapi di atas Kabupaten Bandung Barat. Untuk menganalisis lebih dalam penyebab terjadinya kenaikan maupun penurunan nilai IPG ini, perlu ditelaah lebih lanjut pada nilai-nilai komposit penyusunnya.

IPG	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Indonesia	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63
Jawa Barat	89,18	89,19	89,26	89,20	89,36	89,80
Kota Cimahi	92,33	92,36	92,20	92,01	91,95	91,97
Kota Bandung	95,03	95,11	94,82	94,68	94,68	94,81
Kab. Bandung	93,43	93,59	93,96	93,95	93,85	93,97
Kab. Bandung Barat	79,11	79,18	79,29	79,06	79,06	79,69

Crosscutting IKU IPG Kota Cimahi (sumber: Bappelitbangda Kota Cimahi)



3.2 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Upaya yang dilakukan ke depan, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan waktu adalah dengan melakukan proses pengintegrasian Aplikasi E-Government yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yaitu pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMDA GAJI), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs), Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SIKIP), Sistem EReporting Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs), dan E-Reporting, Sistem E-Absensi. Sistem yang telah terintegrasi adalah Sistem Informasi Pengelolaan.

Pada masa pandemi covid-19, sistem absensi di lingkungan pemerintah daerah Kota Cimahi dilakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah kota Cimahi melaksanakan absensi melalui sistem SIKONCI yaitu sistem kehadiran berlokasi ASN Cimahi. Sistem absensi SIKONCI merupakan sistem absen yang berbasis GPS dan keakuratan absensinya disertai foto pengguna absen dimana setiap ASN Cimahi ketika melakukan absen wajib disertai foto. Pelaksanaan efisiensi lainnya adalah penggunaan *zoom meeting* dalam pelaksanaan rapat dan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Sedangkan untuk efisiensi manajemen aparatur dengan jumlah ASN yang semakin berkurang karena kuota penerimaan ASN di Kota Cimahi sedikit, masih perlu dilakukan penambahan ASN dengan melihat beban kerja ASN yang makin bertambah. Dengan adanya tenaga THL di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sedikitnya dapat membantu ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.3 EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

REFOCUSING PROGRAM/ KEGIATAN
EFISIENSI YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021 DAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	bertambah
1	Program	81	74	113	119	(+)6
2	Kegiatan	728	696	241	224	(-)17
3	Sub Kegiatan			611	634	(+)23

Pada tahun 2020 jumlah program adalah 74 program, dan pada Tahun 2021 jumlah program bertambah 39 program menjadi 113 program, jumlah kegiatan pada tahun 2020 sebanyak 696 kegiatan dan berkurang 455 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 241 kegiatan dan berkurang 17 kegiatan pada tahun 2022 menjadi 224 kegiatan, jumlah sub kegiatan sebanyak 611 sub kegiatan bertambah sebanyak 23 sub kegiatan pada tahun 2022 menjadi 634 sub kegiatan, sedangkan pada tahun 2021 ada indikator sub kegiatan dengan jumlah 611 sub kegiatan, penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur tentang perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut setiap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan diatur berdasarkan urusan. Hal ini menyebabkan setiap Perangkat Daerah memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing dan tidak lagi memungkinkan adanya crosscutting dari level program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 2.2
Jumlah Program berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
Kota Cimahi Tahun 2022

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	826.574.379.808,00	704.864.670.051,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	127.059.906.749,00	115.678.616.525,00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	251.052.700,00	251.052.700,00
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64.862.640.595,00	49.676.907.810,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.145.574.200,00	2.027.914.803,00
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	69.629.000,00	53.649.800,00
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.905.500,00	123.312.400,00
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	196.448.569.474,00	176.933.669.194,00
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.996.755.362,00	6.117.912.972,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	32.100.684.269,00	29.818.466.576,00
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	292.000.000,00	235.929.175,00
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.481.774.200,00	1.158.176.454,00
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.471.644.972,00	5.554.413.803,00

14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.586.350.735,00	8.101.954.778,00
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.412.607.500,00	6.035.711.026,00
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.999.274.589,00	1.811.356.085,00
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	947.705.400,00	604.555.704,00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.631.124.740,00	4.230.025.094,00
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.859.123.750,00	5.409.964.577,00
20	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.881.971.750,00	1.863.813.164,00
21	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.199.176.700,00	9.940.034.132,00
22	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.790.109.210,00	5.393.076.400,00
23	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.958.093.100,00	1.853.332.888,00
24	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.570.387.100,00	2.452.702.203,00
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.851.130.880,00	1.670.434.044,00
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.421.962.400,00	1.363.431.920,00
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.057.125.240,00	1.264.531.692,00
28	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	778.973.000,00	494.512.276,00
29	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.006.678,00	97.202.700,00

30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.687.298.100,00	2.587.291.920,00
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	607.011.300,00	538.625.400,00
32	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.211.257.200,00	1.176.996.990,00
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	962.865.000,00	871.836.139,00
34	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	131.170.000,00	114.636.643,00
35	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	60.405.000,00	57.207.700,00
36	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	210.438.700,00	185.404.941,00
37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	737.972.600,00	638.465.790,00
38	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	39.832.600,00	29.222.800,00
39	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	28.039.500,00	28.039.500,00
40	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	247.680.110,00	245.413.950,00
41	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.390.517.112,00	2.065.674.088,00
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.742.484.900,00	1.630.623.507,00
43	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	4.354.400,00	3.077.500,00

44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LING	966.300.700,00	930.629.444,00
45	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	113.050.300,00	107.906.000,00
46	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	172.240.400,00	78.562.946,00
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	28.527.223.900,00	25.304.461.012,00
48	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	486.749.000,00	467.371.316,00
49	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	356.785.000,00	330.388.316,00
50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	618.354.200,00	603.145.275,00
51	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	16.799.800,00	16.799.800,00
52	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	45.790.900,00	41.527.800,00
53	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	852.496.900,00	793.180.849,00
54	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	489.469.400,00	453.766.900,00
55	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.417.558.900,00	3.289.602.900,00
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.420.929.700,00	1.549.733.957,00
57	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.543.853.555,00	11.155.480.215,00

58	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.384.057.700,00	2.201.571.112,00
59	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.778.149.120,00	2.948.870.041,00
60	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.700.000,00	78.200.000,00
61	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	447.198.000,00	349.682.000,00
62	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	276.946.500,00	233.246.500,00
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	106.000.000,00	94.506.175,00
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	452.177.600,00	433.372.980,00
65	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.246.366.900,00	840.862.299,00
66	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	376.969.900,00	208.244.938,00
67	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	392.574.100,00	226.838.159,00
68	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.225.482.000,00	1.164.186.928,00
69	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	488.123.100,00	424.188.096,00
70	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	382.731.400,00	323.271.512,00
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.118.729.400,00	1.018.119.160,00
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	32.412.949.400,00	24.146.856.748,00
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	263.938.600,00	254.577.732,00

74	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	368.964.000,00	363.137.120,00
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.326.673.600,00	1.284.518.405,00
76	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	605.563.200,00	554.773.601,00
77	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	352.663.500,00	283.190.300,00
78	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	177.400.000,00	64.453.000,00
79	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	14.692.000,00	7.738.000,00
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	590.060.100,00	574.246.644,00
81	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	94.524.600,00	92.237.100,00
82	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.474.238.950,00	2.388.281.747,00
83	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	192.493.800,00	173.105.250,00
84	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	673.817.000,00	666.877.000,00
85	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	33.310.100,00	29.760.100,00
86	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.059.195.600,00	856.933.066,00
87	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	468.556.200,00	458.451.576,00
88	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	94.160.000,00	63.410.000,00
89	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.694.776.900,00	4.471.938.241,00

90	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	621.096.000,00	465.769.000,00
91	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	762.538.000,00	699.541.501,00
92	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	390.475.900,00	382.403.212,00
93	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	218.937.600,00	144.303.350,00
94	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.052.786.000,00	4.937.190.273,00
95	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	70.791.000,00	67.291.000,00
96	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	168.477.000,00	159.261.064,00
97	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	13.805.000,00	13.296.900,00
98	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.471.178.100,00	4.331.254.273,00
99	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.839.144.400,00	1.738.721.737,00
100	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	38.506.617.200,00	31.164.043.113,00
101	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.058.873.600,00	968.109.934,00
102	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.031.838.400,00	944.636.770,00
103	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.203.893.313,00	2.931.407.790,00
104	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30.842.163.500,00	8.621.615.634,00

105	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.279.637.300,00	1.181.903.331,00
106	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.038.227.600,00	2.034.921.966,00
107	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.762.004.200,00	1.526.994.500,00
108	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	870.526.600,00	851.216.544,00
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	457.128.000,00	334.174.187,00
110	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	609.132.000,00	464.100.310,00
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.730.418.700,00	3.516.849.245,00
112	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.744.596.188,00	48.103.519.168,00
113	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.084.231.050,00	1.817.063.035,00
114	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.748.544.528,00	7.440.719.919,00
115	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	445.803.100,00	416.759.400,00
116	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE	2.179.094.450,00	2.123.856.450,00
117	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	484.506.100,00	413.210.000,00
118	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	259.682.600,00	233.800.600,00

119	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	1.793.904.000,00	1.688.301.000,00
	JUMLAH	1.614.482.803.477	1.377.372.285.280

REKAPITULAS EFISIENSI PROGRAM, KEGIATAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN DAN REALISASI		CAPAIAN	EFISIENSI	
		ANGGARAN	REALISASI	%	JUMLAH	%
1	DINAS PENDIDIKAN	416.445.388.499	343.675.317.571	82,53%	72.770.070.928	17,47%
2	DINAS KESEHATAN	151.020.796.331	122.846.723.245	81,34%	28.174.073.086	18,66%
3	RSU DAERAH CIBABAT	245.511.027.176	225.331.342.538	91,78%	20.179.684.638	8,22%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.566.660.120	46.218.544.428	91,40%	4.348.115.692	8,60%
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	61.853.627.063	55.176.217.513	89,20%	6.677.409.550	10,80%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	26.333.408.625	24.150.362.993	91,71%	2.183.045.632	8,29%
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.980.755.791	6.430.337.518	92,12%	550.418.273	7,88%
NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN DAN REALISASI		CAPAIAN	EFISIENSI	
		CAPAIAN		CAPAIAN	EFISIENSI	
		ANGGARAN	REALISASI	%	JUMLAH	%
8	DINAS SOSIAL	15.306.138.072	9.402.955.945	61,43%	5.903.182.127	38,57%
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	17.705.598.242	13.852.285.742	78,24%	3.853.312.500	21,76%

	PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
10	DINAS TENAGA KERJA	10.949.849.853	10.296.205.880	94,03%	653.643.973	5,97%
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	12.637.284.053	11.483.166.213	90,87%	1.154.117.840	9,13%
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54.608.908.950	48.636.119.860	89,06%	5.972.789.090	10,94%
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.935.590.508	9.662.585.750	88,36%	1.273.004.758	11,64%
14	DINAS PERHUBUNGAN	33.565.820.444	30.808.199.166	91,78%	2.757.621.278	8,22%
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.628.765.680	11.783.600.177	86,46%	1.845.165.503	13,54%
16	DINAS ARSIP DAERAH	7.372.233.027	4.755.145.013	64,50%	2.617.088.014	35,50%
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	25.074.892.400	23.255.591.519	92,74%	1.819.300.881	7,26%
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27.685.509.874	22.221.241.505	80,26%	5.464.268.369	19,74%
19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	45.135.575.084	36.331.200.359	80,49%	8.804.374.725	19,51%
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.479.783.562	13.975.961.589	96,52%	503.821.973	3,48%
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50.749.837.030	18.417.302.650	36,29%	32.332.534.380	63,71%
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	13.218.455.665	12.440.471.798	94,11%	777.983.867	5,89%
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	13.060.709.350	10.369.843.717	79,40%	2.690.865.633	20,60%

24	SEKRETARIAT DAERAH	63.941.399.263	58.482.725.184	91,46%	5.458.674.079	8,54%
25	SEKRETARIAT DPRD	94.012.207.777	84.064.553.459	89,42%	9.947.654.318	10,58%
26	INSPEKTORAT KOTA	12.175.290.436	10.052.016.166	82,56%	2.123.274.270	17,44%
27	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	40.625,236,915.00	38,098,331,447.00	93,78	2,526,905,468.00	6,22
28	KECAMATAN CIMAHI UTARA	30.333.694.545	28.946.689.612	95,43%	1.387.004.933	4,57%
29	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	41.449.685.605	39.634.468.591	95,62%	1.815.217.014	4,38%
30	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	37.384.705.244	36.073.623.575	96,49%	1.311.081.669	3,51%
JUMLAH		1.614.782.803.477	1.377.671.970.280	85,32	237.110.833.197	14,68

Rekapitulasi efisiensi program, kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan pada APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2022, Jumlah total anggaran APBD Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.614.782.803.477,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.377.671.970.280,-** dengan capaian kinerja **85,32%**, dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 237.110.833.197,-** atau sebesar **14,68%**.

**LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 KOTA CIMAHI**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) / (c)	(f)	(g)
I. Bidang Kesehatan						
A.	Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19					
	Sub Total	22.072.614.450	15.175.307.181			
	Total DAU atau DBH	530.425.978.000,00				
	Persentase belanja untuk dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH					0,030
	Total Bidang Kesehatan	22.072.614.450	15.175.307.181	68,75%		
II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi						
	Total Penanganan Ekonomi	28.552.929.931	20.263.360.932	70,97%		

III. Bantuan Sosial <i>safety net</i> / jaring pengaman sosial						
1	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Logistik Warga Isolasi Mandiri	0	0	0	0	0
	Total Bantuan Sosial	0	0			
TOTAL		50.625.544.381	35.438.668.113	70%		

Laporan pencegahan dan/atau penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) s/d Desember tahun anggaran 2022 kota cimahi Jumlah total anggaran Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 50.625.544.381,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 35.438.668.113,-** dengan capaian kinerja **70%**, anggaran tersebut digunakan untuk bidang Kesehatan dan/atau penanganan Covid-19, Penanganan dampak dukungan ekonomi, dan bantuan sosial *safety net*/jaring pengaman sosial.

3.3 PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2019-2022



Penghargaan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 14 Desember 2022. hal ini karena Komitmen dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Cimahi



TOP 45 PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

Sebagai Makerspace Digital Kreatif Kepada UPTD Cimahi Technopark Disdagkoperin pada tanggal 06 Desember 2022 dari Kementerian PANRB



PENGHARGAAN/REWARD 5 (LIMA) BINTANG KEPADA PASAR RAKYAT YANG MELAKSANAKAN/MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DARI SNV (STICHTING NEDERLANDSE VRIWILLIGERS/NETHERLANDS DEVELOPMENT ORGANISATION)



**PENGHARGAAN 10 KOTA DI INDONESIA YANG
MEMILIKI KINERJA TERTINGGI TAHUN 2019.
25 APRIL 2019
STADION DIPONEGORO BANYUWANGI**



**PENGHARGAN BHAKTI KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENEGAH PENGHARGAN BHAKTI
KOPERASI DAN UMKM
11 JULI 2019
HASTINAPURA CONVENTION CENTER
PURWOKERTO**



**PENGHARGAAN SATYALANCANA
KARYA BHAKTI PRAJA
17 JULI 2019
JAKARTA CONVENTION CENTER**



**PENGHARGAN ANUGERAH
KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PRATAMA
23 JULI 2019
HOTEL FOUR POINTS
MAKASAR**



**PENGHARGAAN KEPALA DAERAH INOVATIF 2019
22 AGUSTUS 2019
KANTOR GUBERNUR SUMATRA BARAT**



**PENGHARGAAN BUDHIPRAJA
28 AGUSTUS 2019
LAPANG PUPUTAN RENON
BALI**



**INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
8 OKTOBER 2019
HOTEL BOROBUDUR JAKARTA**



**TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019
15 OKTOBER 2019
KEMENPAN RB JAKARTA**



**PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI SANGAT BAIK
7 NOVEMBER 2019
KEMENPANRB – BATAM KEPRI**



**WALIKOTA ENTREPRENEUR AWARD 2019
4 DESEMBER 2019
MARKPLUS, INC. – JAKARTA**



**PARITRANA AWARD 2019
12 AGUSTUS 2020
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KETENAGAKERJAAN**





**PENGHARGAAN NATAMUKTI NINDYA 2020
17 SEPTEMBER 2020
INTERNATIONAL COUNCIL FOR SMALL BUSINESS (ICSB)**



**PERINGKAT 3 KATEGORI KOTA ANUGERAH PEMERINTAH
DAERAH INOVATIF
10 NOVEMBER 2020
KEMENRISTEK/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**



**OUTSTANDING ACHIEVEMENT OF
PUBLIC SERVICE INOVATION 2020**



**INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
2020**



**PENGHARGAAN SNI
(STANDAR NASIONAL INDONESIA)
PASAR RAKYAT 1**



PENGHARGAAN RKCI/RTDI Tahun 2021 untuk Kota Sedang

- Kategori Kota Dengan Ekonomi Cerdas
- Kategori Kota Dengan Lingkungan Cerdas
- Kategori Kota Tangguh (Resilience City)

Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Cimahi sebagai Penyelenggara Publik Sangat Baik Tahun 2021



2

Penghargaan Penyusunan Dokumen, Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) dalam rangka penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Kategori Kota Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Ke-3 dengan Inovasi "Cimahi Small Business Inovation (CSBI)



3

Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) Awards 2021 dalam kategori Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dengan predikat nilai Baik



4

Penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



5

● **Piagam penghargaan Pasar Atas Baru Sebagai Pasar Rakyat Berprestasi tahun 2022**



6

● Penghargaan Public Service of The Year Jabar 2022 Indonesia Markplus Festival 2022 Jabar Banten



7

Literasi Digital Awards
Kategori Penyelenggaraan Urusan Persandian Terbaik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota
Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika



8